
**POTRET KESETARAAN GENDER
PADA REDAKSI SURAT KABAR
DI YOGYAKARTA**

Sanksi pelanggaran Pasal 72 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002

1. Barangsiapa dengan sengaja dan tanpa hak melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat (1) atau pasal 49 ayat (1) dan ayat (2) dipidana penjara paling singkat 1 (satu) bulan dan/atau denda paling sedikit Rp. 1.000.000,00- (satu juta rupiah) atau paling lama 7 (tujuh) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah)

2. Barangsiapa dengan sengaja menyiarkan, memamerkan, mengedarkan, atau menjual kepada umum suatu ciptaan dan barang hasil pelanggaran hak cipta atau hak terkait, sebagaimana dimaksud ayat (1) dipidana dengan pidana paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah)

**POTRET KESETARAAN GENDER
PADA REDAKSI SURAT KABAR
DI YOGYAKARTA**

Masduki,
Ninik Sri Rahayu

Penerbit Komunikasi UII
2010

Perpustakaan Nasional: Katalog Dalam Terbitan (KDT)
@ Masduki, dkk 2010

Potret Kesetaraan Gender

1. Gender 2. Komunikasi 3. Media

Penulis:
Masduki, Ninik Sri Rahayu

Editor :
Ninik Sri Rahayu

Tata Letak & Rancang Sampul:
Zarkoni

Penerbit:
Komunikasi UII

Jl. Kaliurang Km,14,5 , Besi Sleman Yogyakarta 55584
Telp./Faks: 0274-898444 ext 3267
[e-mail: komunikasiuii@yahoo.co.id](mailto:komunikasiuii@yahoo.co.id)

Cetakan I, Desember 2010
vi + 98; 14,5 x 21 cm
ISBN: 978-602-98263-2-6

KATA PENGANTAR

"Media itu *male dominated route*. Jurnalis selalu diandaikan laki-laki karena dunia media adalah laki-laki." Kalimat ini diutarakan jurnalis senior harian Kompas, Maria Hartiningsih dalam sebuah forum diskusi media dan gender. Maria tidak salah, meskipun juga tidak seratus persen benar, jika melihat perkembangan mutakhir media lokal. Yang pasti benar adalah bahwa isu dan kebijakan kesetaraan gender, bukan prioritas dalam kebijakan *newsroom management*, masih belum termasuk Sembako (*basic needs*).

Isu kesetaraan gender jelas bukan hal baru. Demikian pula mendiskusikan wacana gender dan media. Sudah memasuki tahap jenuh. Jika demikian, mengapa riset dan buku ini tetap dilakukan? Jawaban klisenya: riset berbeda dengan 'hanya' diskusi. Riset tidak hanya berfungsi mengeksplorasi apa yang sudah terjadi, tetapi memeriksa apa yang sudah dilakukan oleh para pihak, setelah sekian lama, lelah berdiskusi dari forum ke forum, berkampanye dari rubrik ke publik. Bagi institusi media termasuk surat kabar lokal, sebuah riset buku bukan soal menagih janji atas berjuta berita tentang perempuan yang telah disiarkan, tetapi menuntut komitmen atas nama kemanusiaan. Soal mengutamakan kemanusiaan inilah yang telah kian 'kering' di lingkungan media, tergerus soal 'keuntungan kapital'.

Bermula dari keprihatinan belum beranjaknya diskusi ke aksi atas suatu pemberitaan dan manajemen media yang ramah perempuan, penerbitan buku dari hasil riset interdisipliner ini dilakukan. Interdisipliner karena melibatkan

dua sisi sekaligus: sisi kajian komunikasi khususnya media, dan sisi kajian sosial ekonomi: gender dalam institusi ekonomi bernama surat kabar. Dua disiplin ini menjadi alat penting melihat fenomena struktural dan kultural dalam media lokal, yang belum pernah dilakukan sebelumnya, kecuali sebatas diskusi dan workshop, termasuk workshop yang digelar Aliansi Jurnalis Independen Yogyakarta, 26 November 2009, dimana salah satu peneliti turut menjadi pembicara. Forum yang diikuti puluhan jurnalis perempuan lokal ini makin menginspirasi buku ini.

Riset dilakukan di Yogyakarta, kota dengan beragam predikat: kota intelektual, pusat budaya Jawa dan kota multikultur. Setting Yogyakarta menarik jika diletakkan pada konteks jurnalisisme dan karakteristik individu jurnalis serta ruang redaksi (*newsroom*). Nilai-nilai lokal yang patriarkhis bertarung dengan intelektualisme berbasis kebebasan berpikir, advokasi anti diskriminasi yang amat kuat di kalangan aktifis sosial dan trend sentralisasi kebijakan media cetak pasca mengentalnya sistem manajemen media jaringan. Temuan dari riset sudah pasti belum terlalu masuk kepada isu sosiologis diatas, akan tetapi mencoba menyajikan preferensi awal dan gambaran singkat kondisi aktual relasi gender di ruang redaksi. Diharapkan buku berikutnya akan lebih mengeksplorasi ranah tersebut.

Peneliti dan penulis mengucapkan terima kasih dan penghargaan tertinggi untuk Kepala Direktorat Penelitian dan Pengabdian Masyarakat (DPPM) UII atas bantuan biaya riset ini, juga kepada Pemimpin Redaksi/Redaktur Pelaksana media cetak lokal: Octo Lampito (KR), Aditya Noviardi (Harian Yoga), YB Margantoro (Bernas), Amin Srachmad (Radar Yoga) dan Pito Agustin (Ketua AJI Yogyakarta/Jurnalis Koran Tempo). Terima kasih dihaturkan juga kepada 20 jurnalis yang bersedia mengisi kuisioner dan pihak lain yang berkontribusi.

Kebersamaan dalam riset ini telah melahirkan dinamika tersendiri yang bermuara kepada komitmen untuk membuat segala yang telah dilakukan, bermakna untuk perubahan di masa depan yang lebih baik bagi media.

Yogyakarta, 24 November 2010

Masduki, S.Ag, M.Si dan Ninik Sri Rahayu, SE, MM

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	I	
DAFTAR ISI	iv	
BAB I	PENDAHULUAN	1
	a. Latarbelakang Masalah	1
	b. Rumusan Masalah	3
	c. Tujuan Penelitian	5
	d. Manfaat Penelitian	6
BAB II	GENDER DAN MEDIA LOKAL	7
	a. Penelitian Terdahulu	7
	b. Pengarusutamaan Gender	11
	c. Model Kebijakan Berbasis Gender	13
	d. Pluralisme Manajemen SDM Media	16
	e. Kerangka Pikir Penelitian	21
BAB III	METODOLOGI PENELITIAN	23
	a. Populasi dan Sampel Penelitian	23
	b. Metode Penarikan Sampel, Penentuan Sampel Minimal dan Jumlah Sampel Jumlah Sampel Minimal dan Sampel yang diperoleh	23
	c. Identifikasi dan Aspek Variabel Penelitian	24
	d. Teknik Pengumpulan Data	27
	e. Pengujian Instrumen Penelitian	29
	f. Analisis Data	30

BAB IV	POTRET MEDIA LOKAL DI YOGYAKARTA	33
	a. Konteks Geografis Yogyakarta	33
	b. Ekologi Media Massa Di Yogyakarta	39
	c. Karakteristik Jurnalis Di Yogyakarta	52
BAB V	POTRET RELASI GENDER DI MEDIA LOKAL	55
	a. Sajian Data Kuantitatif	55
	b. Sajian Data Kualitatif	67
	c. Refleksi: Media, Gender Dan Demokrasi	81
BAB VI	KESIMPULAN DAN SARAN	91
	a. Kesimpulan	91
	b. Saran	93
	DAFTAR PUSTAKA	95
	BIO DATA PENULIS	97

BAB I

PENDAHULUAN

I.a. Latar Belakang

Di era "kampung global" (*global village*), terminologi populer milik Marshall Macluhan, sangat penting mempertanyakan secara kritis eksistensi identitas budaya kita termasuk ras, jenis kelamin dan kelas sosial (*race and class*). Studi-studi soal identitas gender dan relasi gender menjadi perhatian utama ketika media massa telah saling terkoneksi dan menyatukan masyarakat secara global. Pertama, karena ia membentuk ruang publik baru yang melampaui batas teritorial negara, etnis dan batas-batas primordial lainnya. Kedua, karena ia melahirkan bentuk kolonialisme baru berupa hegemoni budaya dan gender tertentu atas budaya lain. Sebagai warga Indonesia, ketika berinteraksi antar jenis kelamin, kerap kali jenis kelamin tertentu merasa dibawah tekanan, rendah diri, merasa sebagai pihak eksternal, *second class* dari budaya dominan yang hegemonik. Media massa cetak, film dan televisi bukan wilayah otonom yang bebas dari hegemoni budaya.

Keberadaan media massa di masyarakat sangat strategis. Ia membentuk sistem jaringan komunikasi sosial. Jaringan komunikasi yang saat ini beroperasi semakin bergerak dari jaringan komunikasi tradisional (lama) kepada jaringan komunikasi modern (baru). Jaringan komunikasi lama yang bercirikan tatap-muka, hubungan interpersonal yang mendalam, hubungan dengan status yang berbeda (*patron-client*), serta pemberi pesan dinilai oleh penerima berdasarkan identitasnya (siapa bicara, bukan apa isinya)

bergeser kepada jaringan komunikasi modern oleh adanya inovator (penggagas, pencipta media), dan melalui media massa. Aktor dalam media berperan menentukan isi dalam media itu.

Media massa bisa membentuk pemahaman, kepercayaan (*believes*) dan tindakan untuk "tidak percaya diri" atau pada saat yang sama melakukan eksploitasi dengan identitas sendiri dan media membuat audience selalu bermimpi menjadi anggota dari komunitas dominan dengan seluruh atribut gaya hidupnya. Misalnya, jenis kelamin laki-laki dipersepsi sebagai identitas lebih tinggi (*high culture identity*) dan perempuan sebagai identitas rendah (*low culture identity*). Soal standar kecantikan, perempuan yang berkulit putih disebut cantik, sedangkan perempuan berkulit hitam disebut jelek. Pada kondisi ini, studi kritis atas ruang redaksi pemberitaan media massa amat penting.

Data Serikat Penerbit Surat Kabar (SPS) Pusat menunjukkan, jumlah surat kabar yang beredar di Indonesia mencapai 5 juta tirasnya. 60 persen media cetak beredar di Jakarta. Terdapat sedikitnya 12 stasiun TV nasional dan 100 lebih televisi lokal, menambah jumlah TVRI yang mencapai 45 stasiun dengan area pelayanan mencapai 80 persen penduduk Indonesia. Sedangkan untuk radio, terdapat sedikitnya 1200 stasiun yang beroperasi, menambah dari total 52 stasiun RRI (Siregar, 2008). Menarik diteliti, bagaimana kondisi ruang redaksi dan ruang-ruang utama lainnya di perusahaan media, dalam konteks isu pengarusutamaan gender, terutama di media massa local lebih khusus lagi media cetak.

Dalam kegiatan politik lokal dan nasional, peran-peran media akan bisa lebih maksimal dan tulus memberi kesempatan pemimpin nasional dan lokal memaparkan visi, misi, dan program kerja yang langsung direspon (dikritisi) oleh

khalayak tertentu di daerah itu apabila didukung sikap pluralistik (pro gender) pengelola media setempat. Peran itu bisa maksimal jika diantara pengelola media sendiri terdapat pemahaman yang tidak bias gender dalam mengkomunikasikan pesan politik-sosial budaya kepada masyarakat. Ini semua dapat produktif jika ada keseimbangan performa dan eksistensi SDM dalam media.

Dalam konteks media berbasis komunitas, menurut pakar komunikasi Universitas Hasanuddin, S. Sinansari Ecip, media komunitas yang ideal ketika pengelolaan dan siaran disesuaikan kondisi geografis dan demografis. Geografis itu alamnya dan demografis adalah bagaimana penyebaran penduduknya. Dari segi program, melayani masyarakat, menghibur masyarakat. Perempuan adalah komunitas dominan di suatu daerah, baik kuantitasnya maupun problematik yang mereka hadapi, media komunitas berpeluang memfasilitasinya.

1.b. Rumusan Masalah

Hingga 2009 akhir, sejumlah persoalan serius dihadapi media massa lokal di Indonesia, diantaranya adalah : melemahnya citra lapangan kerja media sebagai jurnalis karena "obral" lowongan, kontrak kerja yang tidak dipenuhi perusahaan, kondisi tata aturan kerja yang minim, gaji yang rendah, dan isu diskriminasi berbasis gender dalam redaksi. Beberapa riset terdahulu menemukan, institusi media belum menjadi dunia yang cukup ramah terhadap perempuan. Kedatipun representasi perempuan dalam media menunjukkan peningkatan, namun akses terhadap tingkat pengambilan keputusan masih sangat terbatas.

Ungkapan "*Women still hitting glass ceiling in media*" dengan sempurna menggambarkan betapa tidak mudah bagi

perempuan untuk menduduki level manajemen dalam industri media. Minimnya keterwakilan perempuan berimplikasi serius terhadap jarangya isu perempuan terangkat ke permukaan. Kalaupun ada, media cenderung memberi ruang bagi hal-hal yang bersifat tradisional atau urusan perempuan seperti rumah tangga, mode, problem keluarga yang pada akhirnya mengukuhkan berbagai steriotype yang merugikan mereka.

Isu berikutnya adalah pembagian kerja berbasis gender yang masih menjadi corak dominan, jurnalis laki-laki bertanggung jawab terhadap isu-isu keras seperti misalnya teknologi, ilmu pengetahuan, bencana, ivestigasi mendalam dan konflik bersenjata sedangkan jurnalis perempuan lebih banyak terkonsentrasi pada isu-isu yang tergolong "soft" yakni seputar kesehatan, gaya hidup, kekerasan gender, media dan hak asasi manusia. Selain itu, muncul juga persoalan sensitif yakni diskriminasi dalam hal sistem penggajian, akses terhadap training dan pengembangan karir.

Ritme kerja yang tidak teratur juga menyisakan persoalan tersendiri bagi jurnalis perempuan karena mereka sulit untuk mengharmonisasi kepentingan karir, personal dan keluarga. Perempuan jurnalis terutama yang sudah menikah kerap kali berhadapan dengan persoalan peran ganda perempuan, yaitu ketika mereka harus menjalankan dua peran sekaligus baik di wilayah publik maupun di wilayah domestik. Hal ini berdampak terhadap panjangnya jam kerja perempuan karena harus merangkap peran tidak hanya menggeluti sektor produktif namun juga aktifitas reproduktif tak berbayar di level rumah tangga.

Berangkat dari berbagai persoalan tersebut, peneliti tertarik mencermati dan menggali fenomena bias gender baik pada level organisasi maupun level individu (jurnalis).

Penelitian ini diharapkan memberi gambaran sekaligus mendisain resolusi kebijakan pengembangan surat kabar lokal yang lebih sensitif gender.

Dari uraian latar belakang singkat diatas, maka rumusan permasalahan yang akan diteliti dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Bagaimana profil peran jurnalis di lihat dari perspektif gender?
2. Apakah terdapat kesenjangan gender antara jurnalis laki-laki dan perempuan dalam menjalankan perannya?
3. Bagaimana profil kesetaraan gender dalam aspek kebijakan dan produk yang dihasilkan oleh redaksi surat kabar di Yogyakarta?
4. Apa saja rekomendasi kebijakan redaksional yang dapat diajukan untuk mendorong pencapaian agenda kesetaraan gender dalam baik pada tingkatan organisasi maupun individu?

I.c. Tujuan

Secara makro tujuan penelitian ini untuk mempromosikan kesetaraan gender di media khususnya media cetak lokal, mempromosikan hak-hak jurnalis perempuan dan memberdayakan jurnalis perempuan dalam mendapatkan hak-haknya, mempromosikan kesadaran gender dalam agenda kebijakan media, meningkatkan jurnalis perempuan dalam asosiasi/kesatuan dan akses terhadap pengambilan keputusan, mendorong, mengakui dan mendukung perempuan dalam media dalam upaya disseminasi informasi dan perubahan kebijakan.

Dalam dimensi khusus penelitian ini memiliki beberapa tujuan berikut:

1. Untuk mengetahui profil peran jurnalis di lihat dari perspektif gender
2. Untuk mengetahui apakah terdapat kesenjangan gender antara jurnalis laki-laki dan perempuan dalam menjalankan perannya
3. Untuk mengetahui profil kesetaraan gender dalam aspek kebijakan dan produk yang dihasilkan oleh redaksi surat kabar di Yogyakarta
4. Untuk merumuskan rekomendasi kebijakan redaksional yang dapat diajukan untuk mendorong pencapaian kesetaraan gender dalam baik pada tingkatan organisasi maupun individu

I.d. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini akan memberikan kontribusi bagi pengkajian relasi media dan isu-isu kontemporer terutama gender dan pengkajian terkait eksistensi surat kabar lokal dan problematika kultural yang bermuara kepada pengambilan keputusan manajerial pada surat kabar lokal yang berperspektif gender.

2. Manfaat Praktis

Penelitian ini akan ikut mendorong aksi penguatan dan pengarusutamaan gender dalam dan melalui media sebagai upaya meningkatkan keadilan dan kesetaraan gender, sekaligus penyehatan manajemen redaksional di surat kabar lokal sebagai pilar kekuatan demokrasi dan kebebasan berekspresi di masyarakat Yogyakarta dan sekitarnya.

BAB II

GENDER DAN MEDIA LOKAL

II.a. Penelitian Terdahulu

Riset tentang media dan gender sudah relatif banyak di Indonesia. Hanya saja, riset yang fokus kepada surat kabar lokal dengan agenda akhir perumusan kebijakan ruang redaksi masih jarang. Adapun riset terdahulu yang menjadi rujukan antara lain adalah yang dilakukan organisasi International Federation of Journalist (IFJ) di Afrika Selatan dan riset yang dilakukan oleh Lembaga Pendidikan, Penelitian dan Penerbitan (LP3Y) di Yogyakarta dan juga riset perbedaan gender pada manajemen SDM oleh mahasiswa Prodi Ilmu Komunikasi UII di TVRI Yogyakarta tahun 2008.

Peneliti sendiri telah melakukan penelitian untuk isu gender pada tahun 2002 yang bertujuan menggambarkan profil SDM berdasar gender dan posisi perempuan pada lima radio komunitas di Bandung, Jawa Barat. Salah satu temuan riset ini dapat dilihat dalam tabel berikut ini :

Tabel 2.1. Posisi Perempuan Dalam Radio Komunitas

No	Nama Radio	Jumlah SDM	Posisi Perempuan
1	PASS, Katapang	15 Laki-Laki, 3 Perempuan	Penyiar, Sekretaris, Bendahara Pengelola
2	Cibangkong, Bandung	13 Laki-Laki, 2 Perempuan	Penyiar, Reporter, Sekretaris Pengelola
3	Reka Cipta Gabon, Pangalengan	14 Laki-Laki, Perempuan	Penyiar
4	MASE, Majalaya	7 Perempuan, 3 Laki-Laki	Penyiar, Reporter, Sekretaris Pengelola
5	KOMBAS, Banjaran	27 Laki-Laki, 3 Perempuan	Penyiar, Reporter, Sekretaris

Tabel di atas menunjukkan minim jumlah perempuan di radio. Terbatasnya jumlah perempuan berkorelasi dengan kultur patriarki yang turut menyebabkan keterpinggiran kelompok perempuan. Kultur ini terbawa hingga ke radio karena sejak awal umumnya radio komunitas lahir dari hobi komunikasi personal seperti *breaker*, hobi bersosialisasi antarwarga yang *notabene* didominasi laki-laki. Mengelola radio adalah memanfaatkan waktu luang di ruang publik diluar kegiatan rutin. Waktu luang diruang publik itu banyak dimiliki laki-laki, ketimbang perempuan.

Kaum perempuan tidak cukup memiliki waktu senggang karena kesibukan yang tiada henti mengelola kerja internal dalam rumah tangga atau menjadi buruh lembur di perusahaan manufaktur. Riset ini juga telah menemukan kenyataan bahwa pengelola radio komunitas termasuk kaum perempuan sendiri belum peduli dengan persoalan diskriminasi ini. Ditengah banyaknya persoalan yang dinilai "lebih mendasar" dalam pengelolaan radio komunitas, isu gender dalam temuan riset peneliti masih dikesampingkan. Kesadaran bahwa persoalan media alternatif seperti radio komunitas amat kompleks termasuk minimnya akses perempuan belum mampu memberi tekanan urgennya menempatkan posisi perempuan setara dengan laki-laki. Jumlah SDM perempuan yang minim, berimplikasi pada suara dalam pengambilan keputusan. Posisi perempuan dalam pengelola yang *stereotype* menempatkan kelompok ini sebagai hanya pencatat sejarah, pendengar dan pelaksana.

Riset oleh Gender Link Tahun 2008, Lembaga Swadaya Masyarakat di Afrika Selatan dalam tema riset "*Women Still Hitting Glass Ceiling in Media*" menghasilkan temuan antara lain. *Pertama*, Perempuan sebenarnya sudah cukup terwakili dalam *newsroom*, namun masih sangat sulit untuk menembus jajaran manajemen puncak. *Kedua*, media

masih menjadi lingkungan yang kurang ramah bagi perempuan terutama terkait dengan isu diskriminasi dan pelecehan seksual. *Ketiga*, masih terdapat pembagian kerja berbasis gender, jurnalis laki-laki bertanggung jawab terhadap isu-isu yang tergolong "*hard beat*" seperti teknologi, ilmu pengetahuan, bencana, investigasi mendalam dan konflik bersenjata sedangkan jurnalis perempuan lebih banyak terkonsentrasi pada isu-isu yang tergolong "*soft*" seputar kesehatan, gaya hidup, kekerasan, media dan HAM. *Keempat*, perempuan sulit mengharmonisasi kepentingan, dan tanggungjawab pekerjaan sebagai jurnalis yang memiliki ritme kerja tidak teratur dengan kepentingan dan tanggung jawab dalam rumah tangga.

Sementara itu, riset yang dilakukan oleh Asosiasi Jurnalis Afrika timur tahun 2008 dalam "*Enhancing Gender Equality in The media in East Afrika*" menghasilkan temuan antara lain: Pertama, jurnalis perempuan harus berhadapan dengan sejumlah kendala utamanya dalam mendapatkan hak secara profesional dan dalam memuat isu gender. Jurnalis perempuan juga belum mendapatkan kesempatan yang setara sebagaimana jurnalis laki-laki dalam hal akses terhadap training dan pengembangan karir. Kekerasan terhadap perempuan (pembaca) masih terus diperlihatkan oleh beberapa institusi media dengan menampilkan berita perempuan sebagai objek seksual, kekerasan seksual, intimidasi, melecehkan hasil kerja dan simbol-simbol kekerasan lain yang melukai hak dasar perempuan.

Kedua, jurnalis perempuan tidak dapat sepenuhnya berpartisipasi dalam aktifitas media karena persoalan-persoalan seperti jam kerja yang begitu panjang, jauhnya jarak tempuh ke lokasi pekerjaan, laki-laki lebih mendapatkan preferensi untuk aktifitas liputan, minimnya akses dan peran atas pengambilan keputusan, minim kemampuan teknis, dan

intimidasi dari kolega laki-laki. Oleh karenanya, perempuan kurang terwakili dalam liputan isu-isu keras dan publik seperti liputan perkembangan ekonomi dan politik.

Workshop jurnalis yang dilakukan Aliansi Jurnalis Independen sepanjang tahun 2009 menemukan sejumlah fenomena berikut: Secara umum, dari data yang dikumpulkan di 4 kota (Jakarta, Denpasar, Surabaya, Yogya) menyebutkan bahwa masih terdapat bias gender atas perlakuan yang dialami para jurnalis perempuan. Walaupun secara khusus ada kebijakan baru yang dikeluarkan media, seperti media mulai memperbanyak jumlah jurnalis perempuan. Namun ini bukan tanpa persoalan, karena banyaknya jumlah jurnalis perempuan ini tak lain dilakukan sebagai siasat media untuk 'mendekati' narasumber atau mempermudah untuk mendapatkan wawancara narasumber. Para jurnalis perempuan di Televisi misalnya banyak yang kemudian menjadi stand-upper karena wajah mereka yang dianggap cantik secara fisik. Kebijakan ini tidak ramah gender namun justru malah *genderless* (kehilangan makna gender). Dalam terminologi feminisme, justru ini adalah siasat media massa dalam melemahkan posisi perempuan, karena hanya mempolitisasi tubuh perempuan dalam sajian informasi teks dan visual.

Dari beberapa riset terdahulu diatas, riset yang akan dilakukan peneliti ini berbeda dalam dua hal. Pertama, konteks geografis di Yogyakarta yang memiliki media massa beragam, cetak dan elektronik, dan juga fokus kepada ruang redaksi yang menjadi kawasan sentral ritme kehidupan media massa. Kedua, konteks isu perburuhan yang lebih tajam dari isu makro yang diteliti sebelumnya. Riset ini juga bersifat multidisiplin, yaitu lintas kaian komunikasi dan kajian sosial: gender.

ii.b. Pengarusutamaan Gender

Istilah gender sering diartikan sebagai jenis kelamin (*sex*). Kedua istilah ini memang mengacu pada perbedaan jenis kelamin, tetapi istilah *sex* terkait pada komponen biologis. Artinya, masing-masing jenis kelamin (laki-laki dan perempuan) secara biologis berbeda. Sebagai perempuan dan laki-laki mempunyai kelebihan dan keterbatasan tertentu berdasarkan fakta biologisnya masing-masing. Misalnya, seorang yang berjenis kelamin pria bisa mengandung, melahirkan dan menyusui. Seorang yang secara biologis dilahirkan sebagai laki-laki mempunyai sperma. Perbedaan biologis masing-masing merupakan kodrat yang tidak bisa dipertukarkan. Sebaliknya, gender merupakan hasil konstruksi secara sosial budaya yang terdiri dari sifat, sikap dan perilaku seseorang yang ia pelajari (Sadli, 2004). Sehingga gender kerap disebut sebagai kodrat budaya.

Sifat-sifat seperti feminitas bagi perempuan dan maskulinitas bagi laki-laki ditentukan oleh lingkungan budayanya, melalui apa yang diajarkan orang tua, guru ataupun tokoh masyarakat dimana seseorang tersebut tinggal. Artinya gender seseorang diperoleh melalui suatu proses panjang, sebagai hasil belajar seseorang sejak dia masih anak-anak. Akibatnya, gender juga merupakan hasil interaksi faktor internal dan eksternal (apa yang dia pelajari dari lingkungan termasuk harapan lingkungan karena dia berjenis kelamin laki-laki atau perempuan). Gender seseorang yang berupa sifat dan perilaku khasnya sebagai perempuan dan laki-laki masih diperkuat dengan mitos dan stereotipi dan pembagian kerja secara seksual yang berlaku bagi masing-masing jenis kelamin.

Pengarusutamaan gender (*gender mainstreaming*) adalah suatu strategi untuk mencapai kesetaraan gender melalui kebijakan publik. Selain itu, ia juga merupakan suatu

pendekatan untuk mengembangkan kebijakan yang memasukkan pengalaman dan permasalahan-permasalahan perempuan dan laki-laki ke dalam perencanaan, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi kebijakan dan program dalam bidang-bidang politik, ekonomi, dan kemasyarakatan, termasuk didalam redaksi media massa. Tujuan pengarusutamaan gender ialah memastikan apakah perempuan dan laki-laki sama-sama menikmati manfaat pembangunan sehingga kesenjangan gender tidak ada lagi. Gender adalah dimensi yang harus dimasukkan dalam semua kebijakan-kebijakan, serta dalam perencanaan dan proses-proses pembangunan, sebab gender membantu memahami lebih baik sikap-sikap, kebutuhan-kebutuhan, dan peran perempuan dan laki-laki dalam masyarakat menurut faktor-faktor sosial, ekonomi, politik, dan budaya. Dengan demikian, gender harus dipandang sebagai bagian dari analisis umum suatu kegiatan, kebijakan, program, kejadian atau proses.

Gender harus diarusutamakan dan tidak harus dipandang sebagai suatu isu yang terpisah. Pengarusutamaan gender merupakan suatu strategi yang digunakan untuk mencapai kesetaraan, sehingga dalam pembangunan, perempuan menjadi mitra sejajar laki-laki. Selama ini banyak praktek yang menunjukkan adanya ketimpangan gender yang berarti pula ada masalah gender. Gender menjadi masalah kalau ada salah satu pihak yang dirugikan atau mengalami ketidakadilan. Keadaan yang menunjukkan salah satu jenis gender lebih baik kedudukannya dari jenis gender yang lain disebut ketimpangan. Ketimpangan gender bisa terjadi pada laki-laki maupun perempuan dan ini perlu dihilangkan dengan menghapuskan nilai-nilai yang tidak demokratis dalam pembagian tugas gender.

Ketimpangan gender yang merugikan perempuan langsung atau tidak adalah kerugian masyarakat kolektif.

Ketertinggalan perempuan mengakibatkan mereka tidak dapat berperan dan menjadi mitra sejajar laki-laki sehingga hubungan kedua pihak menjadi timpang. Perempuan, karena jenis kelaminnya lebih banyak mengalami ketidakadilan gender. Hal ini terjadi karena nilai-nilai dan norma-norma masyarakat membatasi ruang gerak mereka dan memberi peran dan tugas yang dianggap kurang penting dibanding laki-laki. Ketimpangan gender terjadi di masyarakat, misalnya, ekonomi, pendidikan, kesehatan, keluarga, termasuk media massa, hukum, dan adat. Dalam penyehatan kehidupan sosial, ketimpangan antara perempuan dan laki-laki adalah salah satu ketimpangan yang perlu diperjuangkan demi keadilan dan kemashlahatan kolektif.

II.c. Model Kebijakan Berbasis Gender

Kebijakan dimaknai sebagai serangkaian tindakan yang mempunyai tujuan tertentu yang diikuti dan dilaksanakan oleh seorang pelaku atau sekelompok pelaku guna memecahkan masalah tertentu. Kebijakan diartikan pula sebagai program pencapaian tujuan, nilai-nilai dan praktek-praktek yang terarah. Ada tiga aspek dalam konteks kebijakan yang penting dipahami. Pertama, adanya isu-isu utama kebijakan yang terkait dengan masalah sosial masa lampau, masa kini dan yang diproyeksikan untuk masa depan. Kedua, proses guna memutuskan kebijakan yang akan dibuat mengacu pada peralatan atau sarana yang digunakan oleh pembuat kebijakan untuk mencapai tujuan. Ketiga, interaksi sekelompok aktor-aktor kunci atau yang populer disebut *stakeholders* selama proses perumusan kebijakan institusional.

Kebijakan berkaitan dengan pengarusutamaan gender, termasuk di lingkungan perusahaan privat dapat dikategorikan sebagai kebijakan publik. Menurut Thomas R. Dye dikutip Putra

adalah: *"public policy is whatever government choose to do or not to do"*. Apapun yang dipilih oleh pemerintah atau pelaku usaha untuk dilakukan ataupun tidak dilakukan dalam masalah tertentu merupakan sebuah kebijakan. Kebijakan biasanya tertuang dalam bentuk penetapan tindakan-tindakan yang tidak saja cukup untuk dinyatakan tetapi dilaksanakan dalam bentuk yang nyata. Kebijakan publik dapat diklasifikasi dalam tiga kelompok besar yaitu distribusi, regulasi dan redistribusi. Kebijakan redaksional berbasis kesetaraan gender adalah juga meliputi distribusi kewenangan dan regulasi yang mengatur dan mengontrol keadilan distribusi itu.

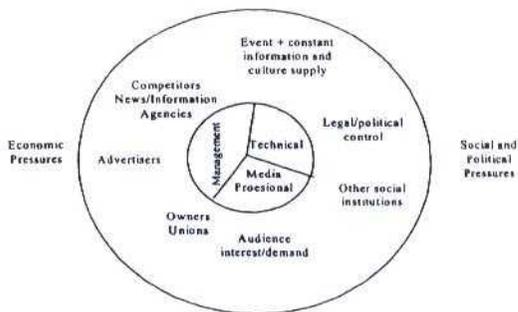
Kebijakan adalah suatu tindakan yang mengarah pada tujuan yang diusulkan oleh seseorang, kelompok atau pemerintah dalam lingkungan tertentu sehubungan dengan adanya hambatan seraya mencari peluang mencapai tujuan atau mewujudkan sasaran yang diinginkan. Kebijakan negara dirumuskan oleh pihak-pihak yang memiliki wewenang dalam sistem politik pemerintahan dan mengarah pada satu tujuan daripada suatu tindakan yang spontan atau acak. Kebijakan negara dalam bentuknya yang positif dibuat berlandaskan hukum dan kewenangan tertentu.

Pembuatan kebijakan publik ibarat arena atau panggung teater. Di panggung itu terdapat komunikasi atau pertunjukan yang dilakukan di depan publik dalam suatu kegiatan panggung, namun ada pula kegiatan yang dilakukan di belakang panggung. Para pembuat kebijakan di area itu mengerjakan pekerjaan rutin, dengan cepat dan cakap diwarnai waktu masuk dan waktu keluarnya. Mereka dapat pula keluar dengan peran bukan sebagai siapa-siapa, atau kembali ke panggung menjadi bintang atau mungkin saja mereka jatuh tersungkur. Dalam masyarakat yang pluralistik, penentuan suatu kepentingan publik dihasilkan dari sebuah keputusan politik yang melibatkan banyak pihak. Kebijakan publik menjadi proses interaksi yang kompleks tanpa

awal dan akhir (*complexly interactive process without beginning or end*).

Media massa adalah institusi yang menjalankan fungsi strategis sebagaimana diurai oleh ahli komunikasi dari Amerika Serikat Denis McQuail. Media berperan memproduksi dan mendistribusi pengetahuan dalam wujud informasi dan pandangan sebagai respon atas kebutuhan sosial, menyediakan saluran untuk menghubungkan orang tertentu dengan orang lain dari pengirim ke penerima, dari masyarakat ke institusi terkait, menyelenggarakan sebagian besar kegiatannya dalam lingkup publik dan merupakan institusi yang terbuka bagi semua orang untuk berperanserta. Dengan demikian media massa adalah institusi publik. Meski tidak punya kekuasaan, namun institusi media berkaitan dengan kekuasaan negara karena adanya kesinambungan pemakaian media, mekanisme hukum dan pandangan yang berbeda antara negara yang satu dengan lainnya dalam pengelolaan media sebagai pilar negara.

Media massa juga terkait dengan industri dan pasar karena dependensinya pada imbalan kerja, teknologi dan pembiayaan. Media massa adalah sebuah institusi sosial yang kompleks. Diagram yang dibuat oleh Denis McQuail berikut ini menggambarkan media massa mencakup beragam aspek sejak manajerial, SDM profesional hingga aspek teknik. Diagram berbentuk lingkaran dibawah ini memperlihatkan bahwa organisasi dan lingkungan media massa termasuk media lokal berinteraksi dan dipengaruhi oleh organisasi sosial, ekonomi dan politik, peristiwa yang terjadi dalam masyarakat umumnya dan khalayak pada khususnya.



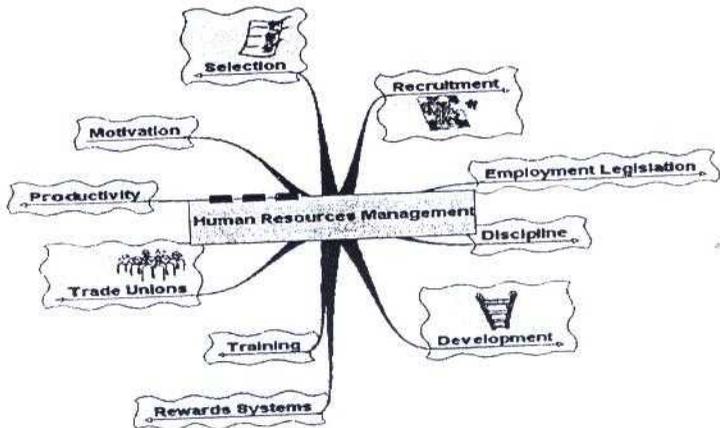
(Sumber: Dennis McQuail, 1987)

Di mayoritas negara, terdapat hubungan yang erat antara struktur sosial dengan sistem media massa. Dalam struktur sosial yang didasarkan pada sistem politik dan ekonomi tertentu terdapat hubungan antar-sistem yang sangat dipengaruhi oleh sistem media yang dikembangkan, sebaliknya sistem media juga dipengaruhi atau dibentuk secara paradigmatik oleh struktur sosial. Sistem media massa merupakan sebuah sarana pengendali sosial untuk menyeimbangkan sistem secara keseluruhan. Keberlangsungan sistem media senantiasa berkarakter tertentu berdasarkan struktur sosial, apakah ia demokratis atau otoritarian. Dalam konteks kajian gender, fenomena bias gender di ruang publik dan di internal redaksi sendiri mempengaruhi kebijakan di redaksi media massa.

II.d. Pluralisme Manajemen SDM Media

Media massa sebagai institusi bisnis selalu menganut model manajemen yang berasaskan pada perencanaan, pelaksanaan, kontrol dan evaluasi. Dalam perusahaan media nasional dan lokal, sebagaimana dalam perusahaan komersial umumnya, terdapat beberapa kategori dan

tahapan kebijakan manajemen di sektor SDM sebagaimana digambarkan berikut:



Apa saja tahapan kebijakan dalam media yang terkait isu gender? Ada lima aspek. Pertama, akses (penguatan akses perempuan mengkonsumsi media): pembaca koran saat ini masih mayoritas laki-laki. Kedua, partisipasi (penguatan jumlah dan peran perempuan dalam struktur manajemen media/newsroom). Ketiga, kontrol (penguatan posisi struktural/kontrol perempuan dalam manajemen media/newsroom). Keempat, manfaat (penguatan kesetaraan pelayanan kerja dan penghargaan kinerja: regulasi perburuhan). Kelima, ekspose atau publikasi berita, bias penggambaran perempuan di media. Riset ini akan fokus kepada aspek yang kedua dan ketiga mengingat keduanya sangat krusial.

Sosiolog Samuel Huntington menilai, kebijakan berbasis kesetaraan gender terkait dengan sikap pluralistik sebagai bangunan ide, cara kerja dan pengakuan

hasil kerja yang berdasarkan penggunaan kata "kita", bukan "mereka". Sikap itu terefleksi dalam kalimat "apapun hasilnya, adalah risiko kolektif kita", bukan karena dia atau mereka yang "lain", "aneh", dan sebagainya. Kesetaraan gender merupakan bagian dari isu utama pluralisme. Di sektor jurnalisme, wacana pluralisme bukan hal baru, tetapi belum terlaksana dengan baik.

Studi yang dilakukan banyak peneliti media di Asia terkait pengaruh berbagai faktor internal dan eksternal terhadap isi media menjelaskan besarnya faktor pluralisme dalam membentuk isi atau kebijakan redaksional media massa. Faktor individu jurnalis yang berasal dari kelompok beragam akan ikut memberi warna berita yang beragam dan secara komersial menguntungkan karena fenomena itu merepresentasi aspirasi khalayak yang pluralistik. Organisasi newsroom yang menerapkan nilai-nilai universal sebagai bagian tradisi jurnalistik sangat mempengaruhi karakter dan dinamika kerja SDM selama proses produksi berita. Pluralisme adalah jaminan kualitas berita, jaminan bertahannya sebuah media dalam merebut hati khalayak. Koran sekelas Kompas di Indonesia, relatif dikenal sebagai koran pluralistik, mampu eksis dibandingkan dengan koran Republika atau koran-koran primordial lainnya.

Fokus isu pluralisme adalah pada struktur kelembagaan ruang pemberitaan dan kultur interaksi dalam dinamika kerja SDM yang terlibat di dalamnya. Problem kultural dinilai lebih krusial ketimbang problem struktural. Secara struktural, sudah banyak posisi penting di ruang pemberitaan misalnya produser, pemimpin redaksi yang tidak lagi mempertimbangkan faktor jenis kelamin, etnis dan ras dalam rotasi pengisiannya. Ketika proses pemagangan antara 3 sampai 9 bulan yang mirip perpelonconan untuk membentuk militansi calon reporter, sikap kolektif

yang seharusnya diajarkan sedari awal bekerja dalam tim redaksi, secara sistematik kerap kali sengaja disembunyikan senior pada juniornya. Fakta yang ditemukan di Filipina dan juga di Indonesia adalah, transfer pengetahuan dan budaya perusahaan media massa sarat sektoralisme, diskriminasi terhadap "pendatang baru", kaum muda, kelompok kritis dan kelompok marginal, disamping sarat feodalisme.

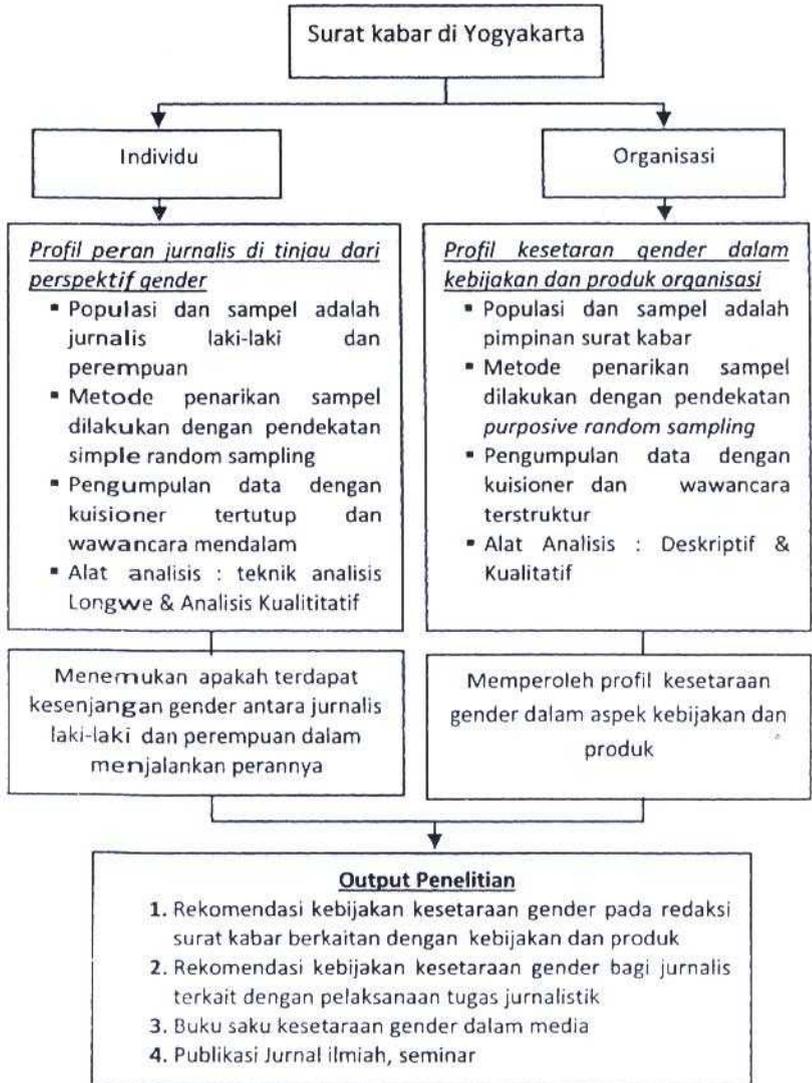
Datangnya energi baru dan militansi baru dari generasi SDM yang direkrut oleh "penguasa ruang berita lama" seringkali dihambat justru oleh mereka yang merekrut demi menjaga status quo. Pluralisme pandangan antar dua kelompok, yaitu kelompok kritis versus kelompok mapan tidak terjadi dan hidup sebagai sebuah proses pembelajaran kualitas kerja redaksi, tetapi lebih mirip suatu pertarungan untuk saling menjegal. Glenda M. Gloria, managing editor Newsbreak, majalah politik terkemuka di Filipina menilai sikap yang implisit dan eksplisit anti-pluralisme masih dominan dalam ruang pemberitaan media cetak dan elektronik.

Jika dalam proses rekrutmen reporter atau presenter sudah tidak lagi bias gender, maka ketika sudah dalam proses pemagangan hingga penerimaan di ruang berita, tidak ada jaminan sikap itu konsisten diterapkan. Fenomena anti-pluralisme awalnya muncul akibat jarak struktural yang terjadi antar pemimpin redaksi dengan reporter. Awalnya hanya ditentukan dua faktor. Pertama, pengetahuan plus senioritas dalam pengalaman. Kedua, jabatan atau kewenangan yang berbeda. Dalam perkembangan akibat perbedaan yang tidak mengarah pada energi kreatif, diskriminasi melembaga hingga tingkat struktur manajemen ruang berita terbawah. Suasana menjadi tidak sehat oleh "gank-gank reporter"-redaktur berbasis SARA.

Momentum demokratisasi dan pulihnya kepercayaan atas media jurnalistik saat yang tepat mengimplementasikan pluralisme dalam aksi. Kontradiksi antara kata (berita) dan perbuatan (kebijakan redaksi) makin harus dikurangi, sehingga memperkuat kredibilitas media dan kepercayaan khalayak. Pertanyaannya bukan hanya berapa jumlah perempuan di redaksi, tetapi bagaimana perlakuan terhadap mereka, sejauhmana kebijakan redaksi mencerminkan pluralisme. Awal kebijakan pluralisme bisa dengan menerapkan sistem seleksi dan regenerasi berdasar kompetensi bebas SARA, bisa pula dengan rotasi wilayah liputan jurnalis.

II.e. Kerangka Pikir Penelitian

Kerangka pikir penelitian di gambarkan dalam skema berikut ini:



BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

III.a. Populasi dan Sampel Penelitian

Populasi adalah jumlah keseluruhan dari unit analisis yang ciri-cirinya dapat diduga. Sampel adalah bagian dari populasi yang merupakan representasi, dilihat dari sisi jumlah maupun keterwakilan informasinya. Populasi dan sampel dalam penelitian ini adalah pimpinan surat kabar yang beredar di Yogyakarta serta jurnalis yang bekerja, baik dalam institusi media yang sama tersebut maupun jurnalis media lokal lainnya dengan status sudah menikah.

III.b. Metode Penarikan Sampel, Penentuan Sampel Minimal dan Jumlah Sampel yang diperoleh

Untuk mengumpulkan data dengan responden para pemimpin surat kabar digunakan metode *purposive random sampling*. Masing-masing institusi media adalah satu orang, sehingga jumlah sampel 4 orang pimpinan media terpilih. Sedangkan untuk mengumpulkan sampel yang bersumber dari jurnalis digunakan metode acak sederhana (*simple random sampling*). Dengan asumsi rata-rata jumlah jurnalis pada empat surat kabar di Yogyakarta adalah 25 orang dan penentuan sampel minimal pada tiap media adalah 20% maka jumlah sampel minimal yang harus di peroleh 5 orang dari tiap-tiap media atau 20 orang secara keseluruhan.

Penelitian ini berhasil memperoleh sampel sebanyak 23 responden namun hanya 20 kuisioner dari responden yang

dapat diolah karena ketidaklengkapan data. Temuan di lapangan juga menunjukkan bahwa sampel minimal pada tiap media tidak semuanya terpenuhi terutama di Radar Jogja dan Harian Jogja. Hal ini disebabkan dinamika dan ritme kerja jurnalis sangat tinggi sehingga sulit untuk dilakukan wawancara dan pengisian lembar kuisioner, namun jika mengacu pada ketentuan jumlah sampel minimal secara keseluruhan, maka jumlah yang diperoleh sudah memenuhi syarat minimal sebagaimana dalam table berikut ini:

Tabel 2.2: Penentuan Jumlah Sampel Minimal dan Sampel yang diperoleh

No	Nama Surat Kabar	Asumsi rata-rata jumlah jurnalis	Sampel Minimal (20% dari populasi)	Sampel yang diperoleh
1	Kedaulatan Rakyat	25	5	5
2	Bernas	25	5	4
3	Radar Jogja	25	5	3
4	Harian Jogja dan jurnalis media cetak lain	25	5	8
	Jumlah	100	20	20

III.c. Identifikasi dan Aspek Variabel Penelitian

Penelitian ini bermaksud untuk mendapatkan gambaran atau potret *gender equality* dalam surat kabar yang beredar di Yogyakarta baik dalam level korporat maupun level individu. Dalam level korporat subtransi yang hendak di gali adalah sejauh mana produk dan kebijakan editorial yang di hasilkan ramah gender. Sedangkan profil *gender equality* pada level individu akan digali dari jurnalis laki-laki dan

perempuan dalam menjalankan aktifitasnya baik di wilayah publik sebagai jurnalis maupun dalam wilayah domestik. Adapun pengertian yang perlu dijelaskan adalah aspek-aspek berikut ini :

- a. Profil adalah daftar obyek-obyek yang di miliki oleh setiap subyek. Subyek riset ini adalah pimpinan media dan jurnalis dalam institusi tersebut.
- b. Kesetaraan gender adalah kesamaan kondisi bagi laki-laki dan perempuan untuk memperoleh kesempatan serta hak-haknya sebagai manusia, agar mampu berperan dan berpartisipasi dalam kegiatan politik, hukum, ekonomi, sosial budaya, pendidikan dan pertahanan dan keamanan nasional (hankamnas), serta kesamaan dalam menikmati hasil pembangunan tersebut. Kesetaraan gender juga meliputi penghapusan diskriminasi dan ketidakadilan struktural, baik terhadap jurnalis laki-laki maupun perempuan.
- c. Jurnalistik adalah aktifitas merencanakan, mencari, mengolah, mengedit sebuah fakta atau data menjadi sajian berita yang menarik
- d. Kebijakan diartikan sebagai aturan tertulis yang merupakan keputusan formal organisasi, yang bersifat mengikat, yang mengatur perilaku dengan tujuan untuk menciptakan tatanilai baru dalam organisasi. Kebijakan akan menjadi rujukan utama para anggota organisasi dalam berperilaku. Kebijakan pada umumnya bersifat problem solving dan proaktif.
- e. Produk diartikan sebagai hasil akhir dari sebuah proses. Dalam konteks ini produk editorial atau berita surat kabar.

Untuk variabel profil kesetaraan gender dalam kebijakan dan produk yang dihasilkan oleh surat kabar di Yogyakarta di ukur dari aspek-aspek sebagai berikut : Pemetaan SDM, Afirnative action, Sistem rekrutmen, Sistem seleksi, Lingkungan kerja, Kebijakan ramah keluarga, Pembangunan kapasistas, Promosi, Training, Pemberitaan mengenai issu Gender, Luas liputan, Kedalaman liputan, Penggunaan bahasa, Visualisasi dan Pengemasan.

Sedangkan untuk mendapatkan profil gender equality dalam tataran individu (jurnalis) akan di analisis dengan menggunakan pendekatan LONGWE. Pendekatan ini melibatkan lima aspek yakni Kesejahteraan, Akses, Kesadaran, Partisipasi, dan Kontrol baik dalam lingkup publik (aktifitas produktif) maupun dalam lingkup domestik (aktifitas reproduktif). Secara terperinci aspek-aspek tersebut di jabarkan sebagai berikut:

Tabel 2.3: Aspek-Aspek Variabel Penelitian

Aspek	Sub Aspek
Aktifitas publik jurnalis (Produktif)	<ol style="list-style-type: none"> 1. Rapat redaksi untuk membuat perencanaan tugas liputan/agenda reportase. 2. Peliputan lapangan 3. Riset dokumen untuk pengembangan berita 4. Menghadiri pertemuan pers dengan berbagai pejabat publik dan kelompok masyarakat 5. Meliput berbagai peristiwa seremonial pemerintah, kriminalitas, hiburan, olah raga dan perang 6. Mengembangkan komunikasi intensif dengan sumber berita baik dalam kesempatan formal maupun informal 7. Merespon penugasan setiap saat dan melakukan peliputan untuk peristiwa tak terduga. 8. Bekerja dalam tim dengan fotografer, kamerawan, dan editor

	<ul style="list-style-type: none"> 9. Membawa alat tulis dan perekam yang memadai 10. Menulis naskah berita yang diperoleh dari lapangan baik untuk berita pendek (<i>straight news</i>) maupun berita panjang (<i>feature</i>). 11. Menyampaikan naskah berita ke editor dan berdiskusi terkait perbaikannya 12. Mengikuti rapat redaksi untuk mengevaluasi kinerja liputan harian/mingguan
Aktifitas domestik	<ul style="list-style-type: none"> 1. Melakukan pekerjaan yang berhubungan dengan kebersihan rumah 2. Mengantar/menjemput anak dari dan ke sekolah 3. Menyediakan makanan untuk keluarga 4. Mendampingi anak belajar di rumah 5. Melakukan kegiatan yang berkaitan dengan kesehatan anak 6. Belanja keperluan sehari-hari 7. Melakukan kegiatan yang berkaitan dengan kebersihan anak 8. Melakukan pertemuan orangtua wali di sekolah 9. Melihat perkembangan anak di sekolah 10. Memeriksa tugas anak 11. Menjalin hubungan dengan masyarakat sekitar rumah

III.d. Teknik Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan teknik wawancara dan kuisionerr. Terdapat dua bentuk kuisioner yaitu kuisioner terbuka yang diperuntukan bagi pemimpin surat kabar dan kuisioner tertutup yang diperuntukan bagi jurnalis (lihat lampiran). Kuisioner tertutup untuk subyek jurnalis dikembangkan dari aspek-aspek dalam variabel penelitian dengan desain sebagai berikut :

A1 = Kesejahteraan dalam bidang publik

A2 = Akses dalam bidang publik

- A3 = Kesadaran dalam bidang publik
- A4 = Partisipasi dalam bidang publik
- A5 = Kontrol dalam bidang publik
- B1 = Kesejahteraan di bidang domestik
- B2 = Akses di bidang domestik
- B3 = Kesadaran di bidang domestik
- B3 = Partisipasi di bidang domestik
- B4 = Kontrol di bidang domestik

Desain kuisisioner dibuat pertanyaan dengan pilihan jawaban sebagai berikut :

- (+) Jika mendapat kesempatan untuk melakukan kegiatan tersebut (skor 3)
- (N) Jika tidak punya pendapat tentang kegiatan tersebut (skor 2)
- (-) Jika mendapat hambatan untuk melakukan kegiatan tersebut (skor 1)

Dengan keterangan pada masing-masing aspek sebagai berikut :

1. Kesejahteraan: Kegiatan tersebut meningkatkan pemenuhan kebutuhan dasar (Pangan, pendapatan, kesehatan dll)
2. Akses: Responden mendapat informasi tentang kegiatan tersebut
3. Partisipasi: Melakukan kegiatan tersebut
4. Kontrol: Keputusan untuk melakukan kegiatan tersebut ada ditangan diri sendiri tanpa melibatkan orang lain.

III.e. Pengujian Instrumen Penelitian

a. Uji validitas

Uji validitas dimaksudkan untuk mendeteksi apakah alat ukur (butir-butir pertanyaan dalam suatu kuisioner) yang digunakan untuk mengumpulkan data itu memang benar-benar alat yang sesungguhnya, artinya alat tersebut sah atau valid. Validitas didefinisikan sebagai ukuran seberapa cermat suatu tes melakukan fungsi ukurnya terhadap suatu gejala. Untuk menguji validitas dapat dilakukan dengan pendekatan teknik koreksi produk moment angka besar (Karl Pearson 1973) dengan rumus sebagai berikut :

$$r_{xy} = \frac{N \sum XY - (\sum X)(\sum Y)}{\sqrt{\{N \sum X^2 - (\sum X)^2\} \{N \sum Y^2 - (\sum Y)^2\}}}$$

Keterangan :

N = Jumlah subyek

X = Nilai item

Y = Skor tiap-tiap faktor

R = Koefisien koreksi antara variabel x dan y

Uji validitas item dalam penelitian ini dilakukan dengan menggunakan program SPSS 14 for windows. Dengan menggunakan standar r bt sebesar 0,25 diperoleh dan item gugur sebanyak 37

b. Uji Reliabilitas

Adalah derajat ketepatan atau tingkat presisi dan tingkat keajegan konsistensi suatu alat ukur, artinya jawaban seseorang terhadap pertanyaan

adalah konsisten atau stabil dari waktu ke waktu. Pendekatan yang digunakan untuk uji ini adalah dengan mencari koefisien alpha dari Cronbach dengan formulasi sebagai berikut (Mustafa :2002):

$$\alpha = n(r_{12}) / 1 + \{(r_{12}) (n-1)\}$$

r_{12} = Mean korelasi antar item

n = Banyaknya item yang di uji

Uji reliabilitas pada instrument penelitian dari item-item yang sah diperoleh tingkat reliabilitas angket atau kuisisioner penelitian sebesar 0,977. Uji reliabilitas ini menghasilkan alat instrumen penelitian yang sah

III.f. Analisis Data

Adapun analisis atas data yang ditemukan di lapangan akan menggunakan dua teknik, yaitu teknik analisis berperspektif gender yang dikembangkan oleh Longwe dan analisis kualitatif. Secara ringkas kedua teknik tersebut dapat dijelaskan berikut:

1. Teknik Analisis Longwe

Teknik analisis Longwe adalah suatu teknik analisis yang dikembangkan sebagai metode pemberdayaan perempuan dengan lima kriteria analisis yang meliputi kesejahteraan, akses, kesadaran kritis, partisipasi dan kontrol (Widaningroem, 1998 dalam Handayani, 2006). Lima dimensi pemberdayaan ini adalah kategori analitis yang bersifat dinamis, satu sama lain bersifat sinergis saling menguatkan dan melengkapi dan mempunyai hubungan yang hirarkhis. Kerangka-kerja

pemberdayaan perempuan Sara Longwe mengkonseptualisasikan lima tahap progresif untuk mencapai kesetaraan dan pemberdayaan gender. Jenjang kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan dapat dinilai dengan cara mengkaji jenjang kontrol, partisipasi, penyadaran, akses dan kesejahteraan, yang berhubungan dengan kebutuhan strategik dan praktis perempuan.

- Dimensi kesejahteraan : Dimensi ini merupakan tingkat kesejahteraan material yang di ukur dari tercukupinya kebutuhan dasar seperti makanan, penghasilan, perumahan, dan kesehatan yang harus dinikmati oleh perempuan dan laki-laki.
- Dimensi Akses : Kesenjangan gender dilihat dari adanya perbedaan akses antara laki-laki dan perempuan terhadap sumber daya. Lebih rendahnya akses akses mereka terhadap sumberdaya menyebabkan produktifitas perempuan cenderung lebih rendah dari laki-laki. Selain itu, dibanyak komunitas, perempuan diberi banyak tanggung jawab melaksanakan hampir semua pekerjaan domestik sehingga tidak mempunyai cukup waktu untuk mengurus dan dan meningkatkan kemampuan dirinya.
- Kesadaran kritis : Kesenjangan gender di tingkat ini disebabkan adanya anggapan bahwa posisi sosial ekonomi perempuan yang lebih rendah dari laki-laki dan adanya pembagian kerja gender tradisional. Pemberdayaan di tingkat ini berarti menumbuhkan sikap kritis dan penolakan terhadap cara pandang tersebut. Berkaitan dengan pemahaman mengenai perbedaan peran seks dan peran gender dan keyakinan bahwa hubungan gender dan pembagian

gender tenaga kerja hendaklah adil dan disepakati oleh ke dua belah pihak, dan tidak didasarkan pada dominasi oleh satu pihak terhadap pihak lainnya

- Dimensi partisipasi : Partisipasi aktif perempuan diartikan bahwa pemerataan partisipasi perempuan dalam proses penetapan keputusan yaitu partisipasi dalam proses perencanaan penentuan kebijakan dan administrasi pada media setempat.
- Dimensi kontrol : kesenjangan gender di tingkat ini terlihat dari adanya hubungan kuasa yang timpang antara laki-laki dan perempuan. Kesetaraan dalam kuasa berarti adanya kuasa yang seimbang antara laki-laki dan perempuan, satu tidak mendominasi atau berada dalam posisi dominan atas lainnya.

2. Analisis Kualitatif

Adalah metode penalaran dengan menguraikan data dalam bentuk keterangan dan penjelasan yang berpijak pada pendapat para ahli, teori-teori yang relevan, literatur dan argumentasi dari peneliti sendiri. Untuk mendukung hal tersebut maka analisis ini akan banyak mengacu pada hasil wawancara secara mendalam kepada key person atau pengambil keputusan yang berkaitan dengan kebijakan organisasi.

BAB IV

POTRET MEDIA LOKAL DI YOGYAKARTA

IV.a. Konteks Geografis Yogyakarta

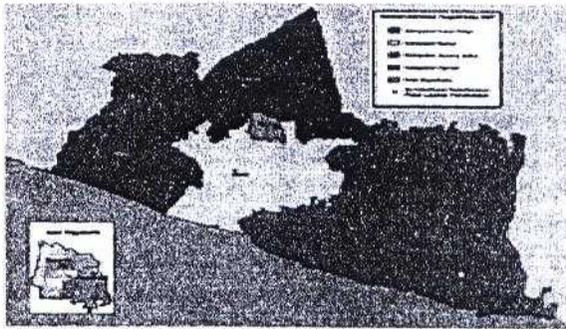
Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) terletak di bagian selatan Pulau Jawa dan berbatasan dengan Provinsi Jawa Tengah di sebelah utara. Provinsi DIY yang merupakan provinsi terkecil kedua di Indonesia setelah Propinsi DKI Jakarta dan secara geografis, di sebelah selatan DIY berbatasan dengan Samudera Indonesia dan dibatasi dengan garis panjang pantai sepanjang 110 km.

Di sebelah utara menjulang tinggi gunung paling aktif di dunia, Merapi (2.968 m). Di sebelah barat mengalir sungai Progo yang berawal dari Propinsi Jawa Tengah. Sedangkan di sebelah timur mengalir sungai Opak yang bersumber dari Puncak Merapi dan bermuara di laut Jawa. Secara administratif, wilayah DIY berbatasan dengan Kabupaten Magelang (di sebelah barat laut), Kabupaten Klaten (di sebelah timur), Kabupaten Wonogiri (di sebelah tenggara), dan Kabupaten Purworejo (di sebelah barat). Luas keseluruhan DIY adalah 3.185,80 km² atau kurang dari 0,5% luas daratan Indonesia dengan ibukota Provinsi Kota Yogyakarta.

Secara administratif DIY terbagi dalam 5 wilayah daerah tingkat II, yaitu :

1. Kotamadya Yogyakarta dengan luas 32,5 km²
2. Kabupaten Bantul dengan luas 506,85 km²
3. Kabupaten Gunungkidul dengan luas 1.485,36 km²
4. Kabupaten Kulonprogo dengan luas 586,27 km²
5. Kabupaten Sleman dengan luas 574,82 km²

Berikut ini peta keseluruhan wilayah DIY, diambil dari www.google.com:



Pemerintahan Daerah Istimewa Yogyakarta dapat dirunut asal mulanya dari tahun 1945. Beberapa minggu setelah Proklamasi 17 Agustus 1945, atas desakan rakyat dan setelah melihat kondisi yang ada, Hamengkubuwono IX mengeluarkan dekrit kerajaan yang dikenal dengan Amanat 5 September 1945. Isi dekrit tersebut adalah integrasi monarki Yogyakarta ke dalam Republik Indonesia. Dekrit dengan isi yang serupa juga dikeluarkan oleh Paku Alam VIII pada hari yang sama. Dekrit integrasi dengan Republik Indonesia semacam itu juga dikeluarkan oleh berbagai monarki di Nusantara, walau tidak sedikit monarki yang menunggu ditegakkannya pemerintahan Niderland Indische setelah kekalahan Jepang.

Pada saat itu kekuasaan Kasultanan Yogyakarta meliputi:

1. Kabupaten Kota Yogyakarta dengan bupatinya KRT Hardjodiningrat,
2. Kabupaten Sleman dengan bupatinya KRT Pringgodiningrat,

3. Kabupaten Bantul dengan bupatinya KRT Joyodiningrat,
4. Kabupaten Gunungkidul dengan bupatinya KRT Suryodiningrat,
5. Kabupaten Kulonprogo dengan bupatinya KRT Secodiningrat.

Wilayah yang kemudian menjadi keraton dan ibukota Yogyakarta telah lama dikenal sebelum Sultan Hamengkubuwono 1 memilih tempat itu sebagai pusat pemerintahannya. Wilayah itu dikenal dalam karya sejarah tradisional dan dalam *leluri* dari mulut ke mulut. *Babad Giyanti* mengisahkan bahwa Sunan Amengkurat telah mendirikan *dalem* yang bernama Gerjiwati di wilayah itu. Kemudian oleh Paku Buwana II dinamakan Ayogya.

Dasar filosofi pembangunan daerah Yogyakarta adalah Hamemayu Hayuning Bawana, sebagai cita-cita luhur untuk menyempurnakan tata nilai kehidupan masyarakat Yogyakarta berdasarkan nilai budaya daerah yang perlu dilestarikan dan dikembangkan. Dasar filosofi yang lain adalah Hamangku-Hamengku-Hamengkoni, Tahta Untuk Rakyat, dan Tahta untuk Kesejahteraan Sosial-kultural. Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta secara legal formal dibentuk Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1950 (Berita Negara Tahun 1950 Nomor 3) dan UU Nomor 19/1950 (Berita Negara 1950 Nomor 48) yang diberlakukan mulai 15 Agustus 1950 dengan PP Nomor 3/950 (Berita Negara Tahun 1950 Nomor 58).

Sebagian besar perekonomian di Yogyakarta disokong hasil cocok tanam, kerajinan (kerajinan perak, kerajinan wayang kulit, dan kerajinan anyaman), dan wisata. Ada juga sebagian warga yang hidup dari ekspansi dunia pendidikan

seperti rumah kost buat mahasiswa. Adalah pemandangan yang biasa ketika anda sampai di Stasiun Yogyakarta atau di halte khusus tempat perhentian bus-bus pariwisata, disambut oleh banyak tukang becak. Mereka akan mengantarkan anda ke tempat tujuan mana saja yang layak untuk anda nikmati seperti toko baju, toko bakpia, mal, atau sekadar membeli cinderamata kaos.

Transportasi yang ada terdiri dari transportasi darat (bus umum, taksi, kereta api, andhong (kereta berkuda), dan becak) dan udara (pesawat terbang) pada Bandar Udara Adi Sutjipto. Pada awal Maret 2008, pemerintah DIY telah mengoperasikan bis TransJogja sebagai usaha untuk membuat transportasi nyaman, murah dan andal. Infrastruktur jalan raya di Yogyakarta cukup rapi dan bersih untuk menjadikan Yogyakarta sebagai kota pariwisata walaupun sering mengalami kemacetan.

Kota Yogyakarta selain dijuluki sebagai Kota Gudeg, juga dijuluki Kota Pelajar. Di kota ini terdapat universitas negeri tertua di Indonesia, Universitas Gadjah Mada (UGM) dan juga berbagai universitas swasta terkenal lainnya seperti UPN "Veteran", STIMIK AMIKOM, STMIK AKAKOM, Sekolah Tinggi Teknologi Kedirgantaraan (STTKD), STIE YKPN, STIE SBI, Sekolah Tinggi Pembangunan Masyarakat Desa "APMD", Universitas Kristen Duta Wacana (UKDW), Universitas Islam Indonesia (UII) universitas swasta tertua di Indonesia, Universitas Muhammadiyah (UMY), Universitas Sanata Dharma (USD), [Universitas Atma Jaya (UAJY)], Univrsitas PGRI (UPY), Universitas Teknologi (UTY), Universitas PGRI Yogyakarta (UPY), dan lain sebagainya. Juga ada Institut Seni Indonesia Yogyakarta (ISI Yogyakarta), Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga (UIN Sunan Kalijaga) dan Universitas Negeri Yogyakarta (UNY) dan Universitas Ahmad Dahlan

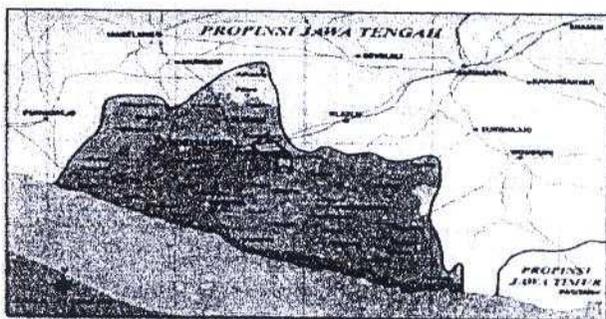
(UAD). Ada pula program kejuruan yang menawarkan jenjang D3 seperti POLISENI. Bisa dikatakan sebagian besar penduduk yang bermukim di Yogyakarta relatif memiliki pendidikan sampai tingkat SMU.

Yogyakarta sangat kental dengan budaya Jawa. Seni dan budaya bagian tak terpisahkan dalam kehidupan masyarakat Yogyakarta. Sejak masih kanak-kanak sampai dewasa, masyarakat Yogyakarta sering menyaksikan dan bahkan, mengikuti berbagai acara kesenian dan budaya di kota ini. Bagi masyarakat Yogyakarta, di mana setiap tahapan kehidupan mempunyai arti tersendiri, tradisi adalah sebuah hal yang penting dan masih dilaksanakan turun temurun. Tradisi tidak lepas dari kesenian yang disajikan dalam upacara-upacara kraton. Kesenian Yogyakarta sangat beragam, terangkai indah dalam sebuah upacara adat. Kesenian khas di Yogyakarta antara lain adalah kethoprak, jathilan, dan wayang kulit. Selain seni, Yogyakarta juga dikenal pusat pengrajin perak di Kotagede (bekas bukota kerajaan Mataram) dan gaya yang unik dalam membuat batik kain dicelup (di Bantul dan kota Yogya).

Penduduk DIY tercatat sebanyak 3.220.808 jiwa (Susenas, BPS, 2004) dengan persentase yang hampir berimbang antara penduduk perempuan dan laki-laki yaitu masing-masing sebesar 50,81% dan 49,19%. Pertumbuhan penduduk pada tahun 2004 adalah 0,42%, pertumbuhan tertinggi terjadi di Kota Yogyakarta yakni sebesar 1,79%, diikuti oleh Kabupaten Sleman (0,42%), Kabupaten Kulonprogo (0,19%), Kabupaten Gunungkidul (0,16%) dan Kabupaten Bantul (0,07%). Dengan luas terkecil, Kota Yogyakarta justru memiliki kepadatan penduduk tertinggi yaitu 12.246 jiwa per km². Kabupaten Gunungkidul dengan luas terbesar menduduki peringkat terakhir kepadatan

penduduk yaitu 462,33 jiwa per km². Kepadatan penduduk Kabupaten lainnya adalah Kabupaten Sleman 1.642 jiwa per km², Kabupaten Bantul 1.610 jiwa per km² dan Kabupaten Kulonprogo 641 jiwa per km².

Berikut ini peta lengkap pembagian kabupaten/kota di Yogyakarta:



Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat penduduk Indonesia 2010 mencapai 237.556.363 jiwa. Dari jumlah itu, laki-laki mendominasi ketimbang perempuan. Keterangan tertulis dari BPS, Senin 16 Agustus 2010 menyebutkan rasio jenis kelamin penduduk Indonesia berada pada angka 101 dengan jumlah penduduk laki-laki sebanyak 119.507.580 jiwa dan jumlah penduduk perempuan sebanyak 118.048.783 jiwa. Provinsi dengan jumlah penduduk laki-laki lebih banyak dari perempuan. Antara lain Aceh dan Sumatera Utara dengan rasio 100 yang artinya jumlah laki-laki dan perempuan hampir sama. Provinsi dengan jumlah laki-laki lebih banyak adalah Riau, Jambi, Sumatera Selatan, Bengkulu, Lampung, Bangka Belitung, Kepulauan Riau, DKI Jakarta, Jawa Barat, Banten, Bali, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, Kalimantan Selatan, Sulawesi Utara, Sulawesi Tengah, Sulawesi Tenggara, Gorontalo, Sulawesi Barat, Maluku, Maluku Utara,

Papua Barat, dan Papua. Adapun provinsi dengan penduduk perempuan lebih banyak dari laki-laki adalah Sumatera Barat, Jawa Tengah, DI Yogyakarta, Jawa Timur, Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur, dan Sulawesi Selatan.

Rasio jumlah penduduk laki-laki dan perempuan terkecil (94) terjadi di Nusa Tenggara Barat dengan jumlah laki-laki sebanyak 2.180.168 jiwa dan perempuannya sebanyak 2.316.687 jiwa. Adapun di Papua rasionya paling besar yaitu 113: laki-laki 1.510.285 jiwa sedangkan perempuan sebanyak 1.341.714 jiwa. Laju pertumbuhan penduduk nasional pada 2010 tercatat sebesar 1,49% dengan laju pertumbuhan tertinggi terjadi di Provinsi Papua yaitu 5,45% dengan total jumlah penduduk mencapai 2.851.999 jiwa. Laju pertumbuhan terendah terjadi di Jawa tengah yaitu 0,37% dengan jumlah penduduk sebanyak 32.380.687 jiwa. Setengah lebih penduduk Indonesia tinggal di Pulau Jawa (57,49%) yang tersebar di Provinsi Jawa Barat terbanyak (18,11%), Jawa Timur (15,78%), dan Jawa Tengah (13,63%).

IV.b. Ekologi Media Massa di Yogyakarta

Ekologi media atau *media ecology* merupakan salah satu kajian interdisipliner dari teori media yang didalamnya melibatkan kajian tentang lingkungan dan industri media. berdasarkan pada asosiasi ekologi media. Ekologi media didefinisikan sebagai kajian industri lingkungan media, bahwa teknologi dan teknik-teknik, model-model komunikasi dan kode-kode komunikasi memainkan sejumlah peranan penting dalam kehidupan manusia. Marshall McLuhan mengatakan ekologi media berarti menyusun beberapa media yang beragam guna membantu sesama sehingga enggan keluar dari rangkaian tersebut atau tatanan yang terbentuk tersebut, karena pada hakikatnya mereka saling menunjang

satu sama lainnya. Misalnya, radio memiliki peranan yang lebih besar dari TV dalam hal yang berhubungan dengan kemampuan literasi, akan tetapi televisi memberikan bantuan yang sangat besar dalam mengajarkan masalah kebahasaan. Neil Postman mendirikan program kajian ekologi media di New York University tahun 1971 dan menjelaskannya sebagai berikut:

Ekologi media melihat pada mengenai bagaimana media mempengaruhi persepsi manusia, pemahaman, perasaan, dan nilai - nilai, dan bagaimana interaksi publik dengan fasilitas-fasilitas media yang tersedia atau menghalangi berbagai kesempatan yang tersedia untuk bertahan hidup. Istilah ekologi menyangkut masalah kajian terhadap lingkungan mengenai strkturnya, isi dan pengaruhnya terhadap manusia. bersama dengan McLuhan dan Postman, ekologi media kemudian meluas kepada yang lainnya seperti dalam kajian Harold Innis, Walter Ong, Lewis Mumford, Jacques Ellul, Eric Haveock, Susanne Langer, Erving Goffman, Edward T Hall, George Herbert Mead, Margaret Mead, Levi-strauss.

Dari tahun ke tahun, jumlah media cetak lokal dan nasional di Indonesia sangat dinamis. Tahun 1997, terdapat 287 media cetak di Indonesia. 1999, setelah reformasi, jumlahnya membludak hingga 852 media cetak. Tahun 2006, jumlahnya menurun hampir setengahnya menjadi 852. Di Yogyakarta, pasca reformasi politik tahun 1998 bermunculan koran dan majalah baru. Antara lain *Harian Jogja* (Harjo), sebuah harian umum yang diterbitkan kelompok *Bisnis Indonesia*.

Menurut catatan direktur eksekutif SPS Asmono Wikan, Harjo mulai resmi terbit tanggal 20 Mei 2008, tampil

dengan komposisi 2 x 4/1 4/1 1/4, dengan ukuran 7 kolom x 540 mm (gutter: 4 mm). Semboyan *Harjo* adalah Berbudaya, Membangun Kemandirian. *Harian Jogja* hadir menggenapi kisah pertempuran yang tentu akan segera bergolak dengan para *incumbent* –*Kedaulatan Rakyat*, *Bernas Jogja*, dan *Radar Jogja*. Sementara, di luar itu, di Jogja juga muncul edisi Jateng – DIY dari *Kompas* dan *harian Seputar Indonesia*. Mengapa Jogja dipilih oleh Bisnis Indonesia untuk melebarkan sayapnya, setelah sukses di Solo dan Depok Jawa Barat? Karena berdasarkan survei ACNielsen, pembaca Jogja adalah yang tertinggi dibanding pembaca dari kota-kota lain. Masyarakat Jogja paling gemar membaca (koran). Tapi, apa benar juga masyarakat Jogja memiliki daya beli koran yang lebih tinggi dari kota-kota lain di Indonesia? Ini belum pasti. Secara skematis peta media massa lokal di Yogyakarta adalah:

**Tabel 4.1: Peta Media Lokal di Yogyakarta
(kecuali Radio Siaran)**

No	Jenis	Nama	Lingkup	Keterangan
1	Televisi	TVRI Yogyakarta	Jaringan	-
2		Yogya TV	Lokal	
3		RB TV	Lokal	
4	Surat Kabar	Kedaulatan Rakyat	Lokal	
5		Minggu Pagi	Lokal	
6		Merapi	Lokal	
7		Harian Yogya	Jaringan	
8		Radar Yogya	Jaringan	
9		Harian Bernas	Lokal	
10		Koran Tempo	Jaringan	Ada halaman lokal
11		Republika	Jaringan	Ada halaman lokal
12		Seputar Indonesia	Jaringan	Ada halaman lokal

13		Kompas	Jaringan	Ada halaman lokal
14		Suara Merdeka	Lokal	Ada halaman lokal
15	Majalah	Kabare	Lokal	-
16		Fresh	Lokal	-

Data diolah dari berbagai sumber

Pada konteks lain, Asmono mencatat, di beberapa kawasan di kota Jogja, muncul sebuah usaha unik. Yakni persewaan koran, tabloid, dan majalah. Jadi, setiap orang boleh membaca tabloid atau majalah di tempat itu, sambil dibawa pulang, dengan ongkos sewa ala kadarnya. *Joke* yang konon ada benarnya itu, muncul sebagai olok-olok bagi orang-orang Jogja yang lebih gemar meminjam dan menyewa media cetak ketimbang membeli sendiri. Apa pun *joke* itu, rasanya perlu dibuktikan lebih lanjut kebenarannya. Tak bisa dipungkiri, populasi Jogja dominan dipenuhi oleh para pelajar dan mahasiswa dari seantero Indonesia. Mereka tentu tak bisa diharapkan menggandakan belanja media mereka. Kalau pun *toh* harus membeli koran, mereka umumnya akan membeli satu jenis koran saja.

Jika demikian, menariknya di Jogja, koran-koran yang sudah ada maupun yang akan terbit baru, memiliki pembaca yang berkarakter unik, harus memerhatikan aspirasi pembaca muda. Seperti di kota-kota lain di Indonesia, sudah jamak terjadi, ada pembaca fanatik bagi setiap media cetak. Di Jogja pun begitu. Mayoritas adalah pembaca fanatik *Kedaulatan Rakyat*. Koran baru seperti *Harian Jogja*, menghadapi situasi yang cukup sulit. Sehingga menurut Asmono, justru tidak perlu nekat menabrakkan diri pada komunitas pembaca fanatik koran-koran *incumbent* di Jogja. Dengan cara, kelebihan dan gayanya sendiri, *Harian Jogja* dan juga koran lain seperti Jawa Pos dan Kompas akhirnya mencari ruang-

ruang bagi pembaca baru di Jogja dan sekitarnya. Fenomena ini barangkali jamak juga terjadi di kawasan lain.

Berlakukannya UU No 22/2002 tentang Penyiaran, membuat TV local dan berjaringan mulai mengudara. Kesiapan dilakukan owner TV nasional dan lokal, misalnya RBTV dan Jogja TV di Yogyakarta. Adanya kerjasama TV lokal dengan TV nasional untuk membuka TV berjaringan. Grup raksasa TV nasional MNC membentuk SUN TV untuk memayungi jaringan TV lokalnya. Sudah ada 13 TV di kawasan Sumatera (Deli TV, Minang TV, Sky TV Palembang, Lampung TV, Urban TV Batam), di Pontianak, Kalimantan, KCTV, Banjarmasin, SUNTV Makasar, BMC di Denpasar, dan di Jawa ada MHTV Surabaya, ProTV Semarang, BMsTV, Purwokerto, IMTV Bandung, SunTV Jakarta. Jaringan TV Jawa Pos melalui Jawa Pos TV sebagai cikal bakal dan Jawa Pos Media Chanel (JPMC) menjalin kerjasama dengan TV lokal seperti PADTV dan Padang TV (Padang), Jambi TV, Batam TV, Lampung, SBOTV, Banjar TV, PONTV, CB Chanel, JakTV, RTV (Tasik/Cirebon) Malioboro TV, Simpanglima TV Semarang.

Kehadiran TV berjaringan yang tidak hanya ada di ibukota Provinsi melainkan di kota-kota kecil berdampak bagi berkembangnya media cetak. yang sejak 1998 tabloid lokal juga semakin marak. Dua grup raksasa media Kelompok Kompas Gramedia melalui PT Indopersda Primamedia melakukan kerjasama dan menerbitkan koran-koran lokal Serambi Aceh, Sriwijaya Pos, Bangka Pos, Tribun Batam, tribun Jambi, Tribun Pekanbaru, Tribun Kaltim, Banjarmasin Pos, Metro Banjar, Tribun Timur, Tribun Jabar, Surya, Pos Kupang dll, Jawa Pos News Network (JPPN) tercatat memiliki 168 media cetak surat kabar/tabloid dengan nama depan/belakang Radar, Express, Pos hampir merata di semua Provinsi. Di Jabar daerah kekuasaan Pikiran Rakyat Grup saja JPPN memiliki dua koran di kota Bandung, Tasikmalaya,

Cirebon, Bogor dan TV lokal di Tasik dan Cirebon. Di Yogyakarta, pada awal tahun 2011 diprediksi akan berdiri satu koran lokal lagi di Yogyakarta yang merupakan jaringan KKG.

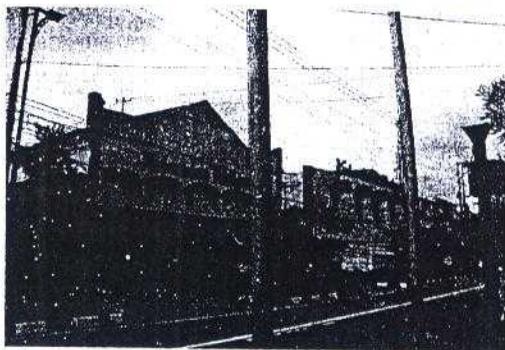
Sejak 2009, Grup Pikiran Rakyat yang notabene lebih dulu mendirikan surat kabar lokal mengubah nama dan formatnya dari Mitra Fialog Cirebon menjadi Kabar Cirebon, Priangan (tasik) menjadi kabart Tasik, dan Fajar Banten menjadi Kabar banten. Perseteruan di media lokal dimulai dari peperangan antara Jawa Pos dengan Suara Merdeka untuk menusuk ke jantung Jateng-DIY awal 90-an. Suara Merdeka yang hanya punya satu media pendamping Koran sore Wawasan terkoreksi pangsa pasarnya oleh JPNN dengan mendirikan Radar Banyumas, Tegal, Pekalongan, Kudus, semarang, Solo dan Yogya. Belum terhitung masuknya grup media Bisnis Indonesia melalui Solopos dan Harian Jogja.

Secara teoritik dan empiris, persaingan antar media lokal dari beragam format memberi kemudahan khalayak, membuka kesempatan bekerja di media. Jika meraup konsumen dan bisa meraih rating maka iklan akan mudah diperoleh seperti yang terjadi pada lima besar radio siaran di Yogyakarta: RB, GCD, Geronimo, Unisi dan Swaragama. Kue iklan media di Yogyakarta yang relatif kecil, terobati oleh potensi kue iklan dari Jakarta yang memerlukan segmen pasar di Yogya.

Dari sisi kepemilikan dan isi, pengamat media Lukas Ispandriarno mencatat beberapa fenomena penting. Media lokal di Yogyakarta terbagi ke dalam kategori media umum yang diterbitkan (dan dilahirkan) di Yogyakarta, seperti *Bernas Jogja* dan *Kedaulatan Rakyat (KR)*, termasuk media lokal yang merupakan anak kandung terbitan nasional yang berinduk di Jakarta atau Surabaya seperti *Kompas* sebagai bagian dari *Kompas* dan *Radar Jogja* sebagai bagian dari *Jawa Pos*. Kategori lain muncul ketika *KR* melebarkan sayap

bisnisnya dengan menerbitkan media kriminal *Merapi* sedangkan *Jawa Pos* melahirkan *Meteor* yang juga beredar di Yogyakarta yaitu *Meteor Jogja*. *Meteor* dan *Merapi* tergolong sebagai koran kuning (*yellow newspaper*) yang mempraktikkan *yellow journalism*.

Berikut gambar kantor redaksi KR di kawasan Mangkubumi Yogyakarta:



Jurnalisme kuning menekankan pada sensasi seks, kriminal, dan berita malapetaka; judul besar-besaran; penggambaran yang kasar; dan bergantung pada kartun serta berwarna-warni (Stanley J. Baran, *Introduction to Mass Communication, Media Literacy and Culture*, McGraw-Hill, New York, 2004, hlm. 109). Koran *Merapi* misalnya menuliskan empat kata di bawah namanya: "kriminal", "hukum", "sport", "supranatural" dan secara visual halaman depannya memenuhi kriteria yang disebutkan Baran. Namun dalam suatu diskusi Pemimpin Redaksi *Merapi* kurang berkenan dengan sebutan ini. Soemadi M Wonohito dalam sambutan Ultah ke-4 koran *Merapi* mengatakan: " Karena itu pula isian Koran *Merapi* mengacu pada budaya lokal. Ini

tercermin dari penyajian berita-berita kriminal dikemas dengan santun dan bijak, tanpa kehilangan kecerdasan dan kekritisannya.”

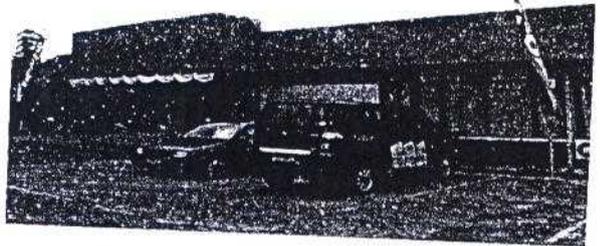
Dalam catatan Lukas Ispandriarno, masing-masing koran lokal memiliki jumlah halaman berbeda, terbanyak adalah *KR* yaitu 24, kadang 28 atau 32 halaman. *Meteor* dan *Merapi* (12), *Bernas Jogja* termasuk *Bernas Magelang* (12), *Radar Jogja* dan *Kompas Yogyakarta* masing-masing 8 halaman. *Kompas* sering menyisipkan tambahan 2-4 halaman iklan. Usia, pengalaman, manajemen, dan kepiawaian berbisnis membuat masing-masing media memiliki jumlah (halaman) iklan yang beragam. *KR* tetap menduduki posisi tertinggi dengan jumlah total 9-9,5 halaman iklan, *Bernas* dan *Kompas* (masing-masing 3-3,5), *Radar* (2-3), *Meteor* (2), *Merapi* (1-1,5). Perhitungan ini merupakan hasil penjumlahan dari iklan yang terdapat di halaman yang terpisah-pisah sehingga totalnya tidak bulat. Dari data ini terlihat bahwa halaman iklan telah memakan, karena telah memberi makan, minimal sepertiga dari total halaman. Sebagai misal, *Kompas* yang terbit 8 atau 10 halaman, sebanyak 3-3,5 halamannya disediakan untuk bisnis. Dari 24 halaman *KR*, lebih dari 9 halamannya dibeli pengiklan. Walaupun hanya mendapatkan 1 halaman iklan namun *Merapi* punya induk yang gemuk yaitu *KR*.

Selain ruangan yang secara khusus disediakan untuk iklan, media lokal juga berstrategi dengan menyediakan “rubrik” khas seperti Metro Bisnis, Expo, Selular (*Bernas*), Exbis, Sains-Teknologi-Otomotif, Info Kafe&Resto (*KR*), Pasugatan (*Kompas*), Komunikasi Bisnis (*Radar*). Dalam berbagai rubrik itu, kadang tidak jelas benar, apakah itu berita atau berita bercampur iklan, atau iklan namun juga berita (*advertorial*), atau memang benar-benar iklan. Peralpnya, tidak ada tanda *advertorial* (*adv*) di sana. Lagi pula,

dalam berita bercampur iklan itu terdapat inisial penulisnya. Khalayak pembaca barangkali tidak ambil peduli dengan jenis "berita bisnis" seperti itu, namun pertanyaan patut dilayangkan kepada pengelola media tersebut, adakah uang yang masuk dari "sumber berita"?

Radar Jogja misalnya menulis judul "New Topsy Kenalkan Keriting Satelit" lengkap dengan foto seseorang yang sedang dikeriting di Salon New Topsy (Rubrik "Komunikasi Bisnis", 17/5/07). *KR* juga menampilkan tajuk "Polusi Udara-Salah Pilih Kosmetik" (baris pertama, "Akibatkan Varises dan 'Kopros' di Wajah (sub judul dengan cetak tebal). (Berita "Sleman", *Kedaulatan Rakyat*, 16/6/07). "Pasugatan" adalah salah satu rubrik iklan milik *Kompas* yang kadang ditulis dengan huruf agak besar hitam putih, kadang dengan huruf lebih besar dan berwarna. Namun judulnya bisa mengecoh pembaca misalnya "Universitas Kristen Satya Wacana Hari Ini Mewisuda 483 Sarjana Baru" (*Kompas*, 12/5/07).

Berikut kantor redaksi *Radar Jogja* di kawasan lingkaran utara Yogyakarta:

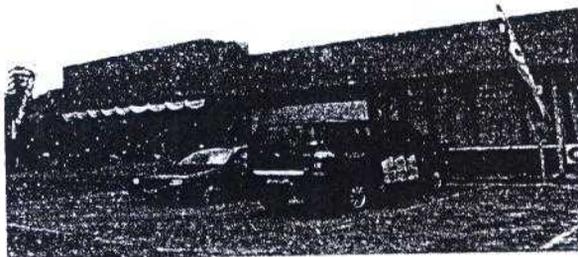


Perolehan dari iklan tentu menjadi modal utama yang menggeliatkan kehidupan media lokal, karena itu, iklan yang

dalam berita bercampur iklan itu terdapat inisial penulisnya. Khalayak pembaca barangkali tidak ambil peduli dengan jenis "berita bisnis" seperti itu, namun pertanyaan patut dilayangkan kepada pengelola media tersebut, adakah uang yang masuk dari "sumber berita"?

Radar Jogja misalnya menulis judul "New Topsy Kenalkan Keriting Satelit" lengkap dengan foto seseorang yang sedang dikeriting di Salon New Topsy (Rubrik "Komunikasi Bisnis", 17/5/07). *KR* juga menampilkan tajuk "Polusi Udara-Salah Pilih Kosmetik" (baris pertama) "Akibatkan Varises dan 'Kopros' di Wajah (sub judul dengan cetak tebal). (Berita "Sleman", *Kedaulatan Rakyat*, 16/6/07). "Pasugatan" adalah salah satu rubrik iklan milik *Kompas* yang kadang ditulis dengan huruf agak besar hitam putih, kadang dengan huruf lebih besar dan berwarna. Namun judulnya bisa mengecoh pembaca misalnya "Universitas Kristen Satya Wacana Hari Ini Mewisuda 483 Sarjana Baru" (*Kompas*, 12/5/07).

Berikut kantor redaksi *Radar* Yogya di kawasan lingkaran utara Yogyakarta:

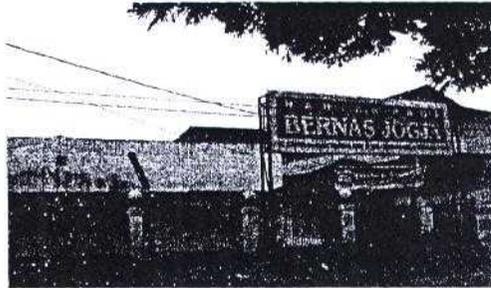


Perolehan dari iklan tentu menjadi modal utama yang menggerakkan kehidupan media lokal, karena itu, iklan yang

"menggiurkan" merupakan sebuah strategi jitu. Bagi koran kuning seperti *Meteor* atau *Merapi*, iklan seks sepertinya oke-oke saja. Iklan Pengobatan Tradisional, Ibu Dewi Pembayun, Mak Eroh, Mak Erot, Telepon Asik, Obat Seks (*Merapi*), tawaran "wanita cantik" dengan tajuk *Play girl club*, Les Cinta, Sumuk Cinta, Jalur Khusus Pecinta Tante2, Hot dan Pasti Menantang, lengkap dengan foto dan Tlp (*Meteor*) muncul hampir setiap hari. Tapi koran seperti *KR* dan *Radar* ternyata juga terperosok menampilkan reklame sejenis seperti, iklan "obat" yang berkaitan aktivitas seks: viagra, juga *sex toys*, serta "ahli" alternatif alat vital Mak Erot (*KR*), dan Kuat Ereksi (*Radar Jogja*).

Masyarakat awam acapkali menempatkan koran pada posisi miring. Ketika harga kebutuhan pokok melambung dan pemerintah berusaha mengendalikannya dengan melakukan operasi pasar (OP). Dalam praktik, OP sering salah sasaran dan harga tetap melambung. Muncullah celetukan "Itu *kan* (harga) menurut Koran. Beli saja di Koran!". Pada sisi yang lain, koran sendiri menempatkan dirinya cermin masyarakat, menggunakan "bahasa masyarakat". Istilah "dimassa" dalam judul "Gagal Merampok, Babak Belur Dimassa" (*Radar Jogja*, 31/3/2007) dan "Bobol Warung, Dimassa" (*Bernas Jogja*, 16/6/2007) menurut kaidah berbahasa Indonesia jelas keliru. "Massa" bukanlah kata kerja.

Berikut gambar kantor redaksi BERNAS di Sonosewu, Yogyakarta:



Lukas Ispandriarno menilai, kelihatannya sangat sederhana, namun hal diatas menjadi salah satu cermin budaya sejumlah media. Bahasa sebagai unsur budaya dan menjadi faktor utama di media massa kurang mendapat perhatian dari pemilik atau pimpinan redaksi. Para redaktur tentu memiliki pengalaman kebahasaan yang lebih jauh, meski tidak berarti lebih baik (benar). Cara profesional untuk mengatasi problem ini adalah dengan memiliki editor bahasa. Tak punya dana untuk membayar editor bahasa? Cara lain adalah memberikan pelatihan-pelatihan bagi calon jurnalisnya, termasuk latihan berbahasa Indonesia dengan benar. Inilah sebenarnya salah satu misi yang harus dilakukan organisasi jurnalis.

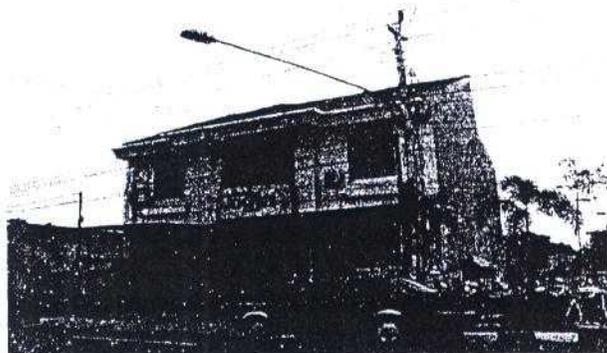
Otonomi daerah memberikan kedudukan "kuat" politisi lokal, pejabat eksekutif (gubernur, bupati, walikota), legislatif (dewan provinsi, kota dan kabupaten), maupun lembaga yudisial (aparatus peradilan). Mereka seolah tidak tersentuh oleh tekanan-tekanan yang datang dari masyarakat (konstituen). Media lokal memiliki posisi dan peran strategis untuk betul-betul menjadi pilar keempat (*the fourth estate*).

Tapi peran ini belum dijalankan secara maksimal. Ada posisi *patron and client* antara politisi dengan jurnalis atau media. Secara struktural lembaga eksekutif (misalnya pemerintah kabupaten dan kota) masih menyediakan anggaran untuk media. Ini menciptakan relasi ketergantungan antara media dengan narasumber. Di negeri tetangga, Filipina, konsekuensi lebih jauh dari relasi ini adalah ketika jurnalis dibeli dengan uang segar oleh para politisi dan pebisnis (Florentino-Hofilena dalam Gloria, 2000). Pasca tumbangannya Marcos, korupsi di tubuh pers justru makin kental dan lebih sistematis. Menurut studi ini: *'It is also disturbingly creative and difficult to detect. Transactions have become more sophisticated, and in some cases, even institutionalized'*.

Goyahnya sikap independen dan konsistensi media terbaca dalam pemberitaan kasus Korupsi Pengadaan Buku Paket di Dinas Pendidikan Sleman. Media lokal *Kompas* dan *Radar* yang gencar memberitakan sejak Mei 2005 namun kemudian menghentikannya. Setelah keluar izin Presiden untuk pemeriksaan Bupati Sleman, media kembali bersemangat mengabarkannya, termasuk *Radar*. Namun akhirnya *Radar Jogja* harus menyetopnya cukup lama. Sementara itu, media yang masih terus meliput sidang pengadilan dua tersangka, Muhdori Masuko Haryono dan Muchamad Bachrun, jatuh pada budaya *ewuh pekewuh* ketika harus menuliskan nama saksi Bupati Sleman, Ibnu Subiyanto. Meski menulis judul "Dua Saksi Kembali Mangkir" namun isi berita harian *Bernas* ini tak sedikitpun menuliskan siapa kedua saksi itu. *Lead* beritanya berbunyi: "Sidang lanjutan kasus pengadaan buku BP di Sleman untuk tersangka Drs MB kembali digelar dengan agenda pemeriksaan tiga orang saksi. Namun dua dari tiga saksi kembali mangkir tidak menghadisi sidang" (*Bernas Jogja*, 13/4/07). Harian *KR* malah tidak memuat berita kedatangan Jaringan Pemantau Peradilan

Yogyakarta (JPPY) ke kantor sementara Kejaksaan Tinggi DIY yang meminta adanya pemanggilan paksa terhadap saksi (*Kompas*, 12/4/07). Kolom 3-5 di halaman satu bawah yang kadang memuat berita korupsi buku di Sleman diisi berita terungkapnya "Warnet Pornografi" (*KR*, 12/4/07).

Berikut gambar redaksi Harian YOGYA di alun-alun selatan Yogyakarta:



Sepanjang 2006-2010, surat kabar lokal yang terbit di Yogyakarta menghadapi masa transisi konsolidasi untuk menjadi institusi bisnis yang pro-konsumennya. Kompetisi dengan media lain hanyalah salah satu persoalan krusial di era multimedia. Yang tidak kalah krusial adalah problem internal manajemen ditengah tuntutan kesejahteraan, tuntutan *good corporate governance* dan isu-isu sosial seperti implementasi kebijakan sensitif gender. Surat kabar dituntut jadi model karena umur lebih tua dibanding kehadiran media lain dan dalam berbagai percaturan kebijakan di DIY, surat kabar masih memiliki pengaruh lebih kuat ketimbang televisi dan radio. Inisiatif untuk melakukan transformasi semakin kuat, tidak hanya dari publik, tetapi dari komunitas jurnalis itu sendiri.

IV.c. Karakteristik Jurnalis di Yogyakarta

Bagian ketiga ini akan menjalin 'benang merah' antara konteks geografis Yogyakarta sebagai salah satu kota yang unik di Indonesia dengan konteks ekologis media lokal di Yogyakarta ke dalam suatu pertanyaan besar: bagaimana keduanya membentuk karakter personal jurnalis yang berkiprah di daerah ini selama lebih dari 30 tahun? Apakah ada korelasi antara nilai-nilai kultural Yogyakarta sebagai pusat kebudayaan Jawa dengan karakteristik jurnalis yang sarat feodalisme, santun, "ngono ya ngono ning ojo ngono" atau Hamemayu Hayuning Bawana, tahta untuk rakyat, "mangan ora mangan kumpul" dan sebagainya. Riset pemetaan kondisi jurnalis di Jakarta, Medan, Semarang, Makassar dan Surabaya yang dilakukan LP3Y tahun 2005-2006 menyajikan ciri khas jurnalis setiap kota tersebut dengan nuansa kultural setempat, bagaimana fenomena di Yogyakarta? Uraian data berikut ini tidak akan menjawab secara tegas dan tuntas, hanya memberikan gambaran yang pada riset lain pasti akan memandu analisis sosiologis dan psikologisnya.

Sebagaimana kota-kota besar lain di Indonesia, pertumbuhan dan dinamika jurnalis di Yogyakarta relatif tinggi. Secara kuantitas, nyaris belum ada statistik, upaya serius mengetahui berapa angka pasti jurnalis aktif di Yogyakarta. Terdapat dua kesulitan untuk melakukan hal itu. Pertama, tingkat 'hit n run' atau turn over atau pindah antar media yang cukup tinggi sehingga potensi duplikasi dan bias akurasi status profesi menjadi tinggi. Kedua, sumber penggalan data baik institusi media maupun asosiasi jurnalis lokal tidak dapat menjamin akurasi karena tidak semua jurnalis bergabung dalam satu asosiasi atau tidak selalu seorang jurnalis hanya bekerja pada satu media baik lokal

maupun nasional. Asosiasi seperti Aliansi Jurnalis Independen dan Persatuan Wartawan Indonesia Yogyakarta hanya memiliki data anggota masing-masing, itupun diupdate tiap sekali dalam dua tahun (rata-rata). Perhitungan kasar hanya dapat dilakukan dengan basis jumlah institusi media. Jika terdapat 20 media cetak dan elektronik, dengan asumsi setiap media mempekerjakan rata-rata 25 jurnalis, maka total menjadi 500 orang. Sekali lagi, apakah data tersebut dapat dijamin akurasinya? *Wallaahu'alam*.

Dilihat dari sejumlah karakteristik, jurnalis di Yogyakarta memiliki kesamaan dengan jurnalis di kota lain, sebagaimana pada tabel berikut ini:

Tabel 4.2: Karakteristik Jurnalis di Yogyakarta

Aspek	Konteks
Jenis kelamin	Laki-laki dan perempuan
Lingkup kerja	Lokal, nasional dan internasional
Bentuk media	Cetak, radio, online, televisi, internet
Status profesi	Tetap, kontrak, koresponden dan freelance
Asosiasi	PWI, AJI, IJTI, PJI, independen
Pendidikan	SMU, Sarjana S1 dan S2 berbagai disiplin ilmu
Usia	20-60 tahun
Fokus liputan	General dan spesipik
Daerah liputan	DIY, Jawa Tengah bagian selatan
Tradisi liputan	Straight news, investigative, indept
Interaksi dalam liputan	Membentuk pokja, unit khusus instansi dan atau individual
Regenerasi	Pemagangan, penugasan senior ke junior

Lantas apa aspek yang menjadi perbedaan? Secara teoritis, dua hal yang membedakan secara diametral adalah: sikap 'santun'dalam liputan dan publikasi kasus atau isu-isu yang mengadopsi nilai-nilai kultural Jawa dan sikap intelektual

yang terinspirasi dari kuatnya kultur akademik Yogyakarta sebagai pusat pendidikan tinggi di Indonesia. Dua kutup: area liputan yang menyatu antara komunitas masyarakat Jawa tradisional dengan budaya akademik, kebebasan berpikir dan kritisisme civitas akademika terhadap isu-isu nasional dan internasional menjadikan rutinitas jurnalis Yogyakarta lebih terpola: kampus dan kampung (termasuk area kantor Negara) dan kemudian membentuk karakter yang khas.

Dikaitkan dengan isu-isu gender, jurnalis di Yogyakarta sebetulnya memiliki peluang lebih besar mengadopsi karena gencarnya aktifitas advokasi di dalam dan diluar kampus, akan tetapi pada saat bersamaan mereka harus berkompromi dengan kultur Jawa tradisional yang cenderung patriarchal, tertutup. Meskipun paradoks ini diintervensi kerasnya kebijakan redaksional dari pusat jaringan media diluar Yogya seperti Jawa Pos, jurnalis lokal Yogya tetap dilematis. Secara simbolik, iklim kultural Yogyakarta barangkali tergambar dalam foto ini:



BAB V

POTRET RELASI GENDER DI MEDIA LOKAL

V.a. Sajian Data Kuantitatif

V.a.1. Gambaran Umum Responden Penelitian

Responden dalam penelitian ini terdiri dari dua kelompok yang yaitu pimpinan surat kabar lokal di Yogyakarta serta jurnalis yang bekerja dalam institusi tersebut.

1. Pimpinan Media.

Responden yang merupakan pimpinan media cetak lokal Yogyakarta berjumlah lima orang dengan data sebagai berikut :

Tabel 5.1 : Pimpinan Media Cetak di Yogyakarta

No	Nama	Media Cetak	Posisi
1	Octo Lampito	KR	Pemimpin Redaksi/ Mantan Ketua PWI DIY
2	Aditya Noviardi	Harian Yogya	Redaktur Eksekutif
3	Amin Surachmad	Radat Yogya	Pemimpin Redaksi
4	YB. Margantoro	Harian BERNAS	Redaktur Pelaksana
5	Pito Agustin Rudiana	Koran Tempo	Reporter Senior/ Ketua AJI Yogyakarta

Dari kelima responden wawancara mendalam yang diperoleh hanya terdapat satu perempuan yang berposisi sebagai reporter senior sekaligus ketua asosiasi: AJI Yogyakarta. Terhadap kelima narasumber tersebut di lakukan *indepth interview* untuk menggali sejauh mana *gender equality* tercermin dalam organisasi media cetak lokal di Yogyakarta.

2. Wartawan

Wartawan yang menjadi responden dalam penelitian ini berjumlah 20 orang, terdiri dari 13 laki-laki dan 7 perempuan dengan kriteria sudah menikah dan telah bekerja sebagai jurnalis minimal satu tahun (Tabel 5.2)

Tabel 5.2: Jenis Kelamin Responden

No	Jenis kelamin	Jumlah	Prosentase
1	Laki-laki	13	65%
2	Perempuan	7	35%
	Total	20	100%

Mayoritas responden penelitian sudah memiliki anak dengan prosentase 95% dan sisanya sebanyak 5% belum memiliki anak (Tabel 5.3)

Tabel 5.3: Ada tidaknya Anak yang dimiliki Responden

No	Kepemilikan Anak	Jumlah	Prosentase
1	Memiliki anak	18	90 %
2	Belum memiliki Anak	2	10 %
	Total	20	100%

Gambaran responden jika di lihat dari faktor usia menunjukkan bahwa separuh responden (50%) berada dalam rentang usia antara 30 – 39 tahun (Tabel 5.4).

Tabel 5.4: Perbandingan Usia Responden

No	Rentang Usia	Jumlah	Prosentase
1	20 - 29 tahun	2	10 %
2	30 -39 tahun	9	45%
3	40 – 49 tahun	7	35 %
4	50 – 59 tahun	2	10%
	Total	20	100%

Sedangkan jika diamati dari masa kerja tampak bahwa jurnalis dengan masa kerja antara 10-19 tahun dan 20-29 tahun mempunyai prosentase yang sama, masing-masing sebanyak 35% (Tabel 5.5).

Tabel 5.5: Masa Kerja Responden Penelitian

No	Masa kerja	Jumlah	Prosentase
1	0 - 9 tahun	6	30 %
2	10 -19 tahun	7	35%
3	20 – 29 tahun	7	35%
	Total	20	100%

Dari gambaran umum responden riset kelompok jurnalis, secara ringkas, dapat dikemukakan kecenderungan dominan responden penelitian ini adalah mayoritas laki-laki, sudah memiliki anak , berusia antara 40-49 tahun dengan masa kerja antara 10-19 tahun dan 20 -29 tahun.

V.a.2 Profil Peran Jurnalis dari Perspektif Gender

Profil peran jurnalis dalam penelitian ini dilihat dari dua dimensi peran, yaitu peran publik dan domestik.

1. Peran di Bidang Publik (Aktifitas jurnalistik)

Tabel 5.6: Profil Peran Jurnalis pada bidang publik (A)

Indikator	Perempuan	Laki-laki	Total	Profil
Kesejahteraan (A1)	2,857	2,692	2,75	Laki-laki < Perempuan
Akses (A2)	2,768	2,875	2,838	Laki-laki > Perempuan
Kesadaran (A3)	2,86	3	2,95	Laki-laki > Perempuan
Partisipasi (A4)	2,75	2,827	2,8	Laki-laki > Perempuan
Kontrol (A5)	2,746	2,855	2,817	Laki-laki > Perempuan

Sumber : data primer, di olah kembali, 2010

Profil peran pada bidang publik, atau aktifitas responden sebagai jurnalis, berdasarkan perspektif gender dapat dikemukakan sebagai berikut: Angka kesejahteraan perempuan adalah 2,857 dan laki-laki 2,692; akses perempuan 2,768 dan laki-laki 2,875; kesadaran perempuan 2,86 dan laki-laki 3; partisipasi perempuan 2,75 dan laki-laki 2,827 sedangkan untuk aspek kontrol, porsi jurnalis perempuan adalah 2,746 dan laki-laki 2,855.

Data-data di atas mengungkapkan gambaran menarik bahwa ternyata pada bidang publik (jurnalistik) mampu memberikan tingkat kesejahteraan yang lebih tinggi pada perempuan di banding laki-laki. Hal ini dapat diterjemahkan bahwa jurnalis perempuan berpandangan profesi ini mampu meningkatkan pemenuhan kebutuhan dasar seperti sandang, pangan, papan dan kesehatan. Artinya, pada aspek ini perempuan beranggapan pekerjaan sebagai jurnalis yang terkesan sangat maskulin tidak sekedar memberi ruang untuk aktualisasi diri namun juga sarana meningkatkan kemampuan secara ekonomi. Namun, pada ke empat aspek lain yaitu

akses, kesadaran, partisipasi, kontrol perempuan relatif tertinggal dibanding laki-laki.

Pada dimensi akses atau informasi mengenai aktifitas jurnalistik, penguasaan informasi oleh jurnalis laki-laki lebih tinggi ketimbang perempuan. Hal ini dipengaruhi oleh faktor mobilitas, perempuan dianggap oleh responden sebagai makhluk domestik yang kurang leluasa dalam bergerak, berbeda dengan laki-laki yang secara sosial dikonstruksi sebagai penghuni sah ruang publik. Ketika perempuan masuk ke wilayah publik secara otomatis mereka menyanggah peran ganda, tidak saja sebagai pekerja/jurnalis perempuan namun juga pekerja domestik.

Tidak jauh berbeda dengan dimensi akses, pada aspek kesadaran terhadap aktifitas jurnalistik, perempuan masih kalah di banding laki-laki. Kesadaran bermakna bahwa jurnalis memahami perlunya suatu kegiatan di lakukan. Komitmen dan kesadaran terhadap pekerjaan yang digelar merupakan elemen fundamental bagi perkembangan karir seseorang. Artinya, jika komitmen dan kesadaran terhadap pekerjaan tinggi akan maka berkorelasi positif terhadap pengembangan karir. Berkait dengan permasalahan tersebut, beberapa riset terdahulu berhasil mendokumentasikan temuan bahwa perempuan cenderung memiliki kesadaran dan komitmen karir yang lebih rendah di banding laki-laki (Ul-Islam, 1997).

Faktor ini menjadi salah satu penyebab kemajuan karir jurnalis perempuan belum semampai jurnalis laki-laki. Ini tampak dari representasi perempuan dalam jajaran top manajemen di dunia media masih relatif kecil. Masih berlangsungnya praktek-praktek manajemen yang mendiskriminasi perempuan menjadi muara dari problem tersebut. Diskriminasi pekerja perempuan tersebut termanifestasikan dalam sistem pengupahan, batasan

kesempatan untuk meningkatkan karir serta minimnya pelibatan sebagai penentu kebijakan pada level makro perusahaan.

Dalam hal partisipasi pada kegiatan jurnalistik, kesenjangan antara jurnalis laki-laki dan perempuan juga masih tampak nyata. Partisipasi diartikan sebagai keikutsertaan atau keterlibatan dalam suatu kegiatan. Dunia kewartawanan dikenal memiliki ritme kerja yang sangat tinggi dan cenderung tidak teratur. Dalam konteks inilah seringkali jurnalis perempuan utamanya yang sudah berkeluarga menghadapi keterbatasan jika misalnya secara mendadak ada panggilan peliputan berita di luar jam kerja (tengah malam). Hal ini terkait dengan beban ganda perempuan yang tidak saja berperan dalam wilayah publik namun juga penanggungjawab utama persoalan kerumahtanggaan (domestik).

Peran ganda inilah yang menyebabkan mobilitas perempuan menjadi demikian terbatas. Bahkan kalangan pemerhati perempuan menyebutkan bahwa perempuan yang bekerja di luar rumah tidak hanya menyandang peran ganda melainkan multi peran yang dikenal dengan *triple burden of women* yaitu ketika perempuan dalam satu waktu dituntut untuk berperan dalam tiga hal sekaligus yaitu kegiatan produktif, reproduktif dan sosial.

Komplikasi peran yang diemban perempuan berimplikasi terhadap panjangnya jam kerja perempuan baik untuk pekerjaan berbayar maupun tidak. Tidak mengherankan apabila studi yang dilakukan oleh ILO menemukan fakta bahwa rata-rata perempuan terutama di negara-negara berkembang memiliki jam kerja 20-50% lebih panjang di banding laki-laki. Inilah yang menyebabkan partisipasi dalam berbagai kegiatan publik, khususnya dalam dunia jurnalistik antara laki-laki dan perempuan belum setara.

Kontrol perempuan terhadap kegiatan jurnalistik juga lebih rendah ketimbang jurnalis laki-laki. Kontrol berarti keputusan untuk melakukan suatu kegiatan ada ditangan diri sendiri tanpa melibatkan orang lain. Rendahnya penguasaan perempuan terhadap keputusan untuk melakukan kegiatan jurnalistik, sekali lagi berkait erat dengan peran ganda perempuan. Kerap kali mereka terhambat untuk melakukan aktifitas jurnalistik di luar jam kerja karena harus melakukan pekerjaan reproduktif seperti merawat anak, menyelesaikan pekerjaan domestik atau bahkan tidak mendapatkan ijin dari pasangan (suami) untuk melakukan liputan di malam hari.

2. Peran di Bidang Domestik

Profil peran di wilayah domestik berdasarkan perspektif gender adalah sebagai berikut : Angka kesejahteraan perempuan adalah 2,43 dan laki-laki 2,531; akses perempuan 2,584 dan laki-laki 2,580; kesadaran perempuan 2,571 dan laki-laki 2,545; partisipasi perempuan 2,519 dan laki-laki 2,51 sedangkan kontrol perempuan adalah 2,558 lebih rendah dari laki-laki sebesar 2,629 (Tabel 5.5).

Tabel 5.7: Profil Peran Jurnalis pada Bidang Domestik (B)

Indikator	Perempuan	Laki-laki	Total	Profil
Kesejahteraan	2,543	2,531	2,535	Laki-laki < Perempuan
Akses	2,584	2,580	2,582	Laki-laki < Perempuan
Kesadaran	2,571	2,545	2,555	Laki-laki < Perempuan
Partisipasi	2,519	2,51	2,514	Laki-laki < Perempuan
Kontrol	2,558	2,629	2,605	Laki-laki > Perempuan

Sumber : Data primer diolah kembali, 2010

Berbanding terbalik dengan peran jurnalis perempuan di ranah publik, maka di dalam ranah domestik perempuan cenderung lebih unggul di banding laki-laki di hampir semua aspek kecuali pada kontrol terhadap permasalahan domestik. Kecenderungan ini semakin meneguhkan stereotipe perempuan sebagai pekerja domestik semakin kuat.

Domain rumah tangga ternyata memberikan tingkat kesejahteraan yang lebih tinggi bagi jurnalis perempuan dibandingkan jurnalis laki-laki. Dalam hal ini, oleh perempuan, pekerjaan domestik dipandang lebih mampu menyokong kebutuhan dasar seperti pangan, papan, sandang, dan kesehatan dibandingkan jurnalis laki-laki. Hal ini dilatarbelakangi kenyataan bahwa jurnalis perempuan secara ekonomi memiliki penghasilan sehingga tidak sepenuhnya bergantung pada pasangan. Sehingga, meskipun mereka adalah pelaku utama pekerjaan reproduktif dalam rumah tangga tetapi berkemampuan untuk memenuhi kebutuhan esensial mereka sendiri.

Secara tradisional peran perempuan adalah di wilayah domestik, tidak mengherankan jika akses atau perolehan informasi jurnalis perempuan terhadap persoalan rumah tangga lebih besar di banding jurnalis laki-laki. Permasalahan rumah tangga dianggap sebagai masalah keperempuanan sehingga dalam skala tertentu keterlibatan laki-laki masih terbilang minim.

Sementara itu kesadaran mengenai masalah rumah tangga, perempuan juga memperlihatkan kepedulian yang lebih tinggi. Kesadaran berarti memahami pentingnya suatu kegiatan dilakukan. Kepekaan perempuan yang lebih besar di banding laki-laki tentu tidak bisa dilepaskan dari konstruksi budaya dalam masyarakat yang mengidentikan perempuan

dengan dunia domestik sedangkan laki-laki dengan dunia publik.

Partisipasi atau keterlibatan jurnalis perempuan dalam urusan rumah tangga lebih besar dibanding laki-laki. Temuan ini tidak menjadi sesuatu yang mengejutkan sebab dalam kultur patriarki yang masih kuat mengakar dalam masyarakat, pekerjaan domestik secara turun temurun diwariskan pada perempuan. Kodrat kultural ini diwariskan dari generasi ke generasi dan telah berlangsung sedemikian lama dan berjalan tanpa protes. Tingginya jenjang pendidikan yang berhasil diraih perempuan tidak melunturkan label mereka sebagai pemegang kendali ruang privat. Riset ini membuktikan kendali laki-laki terhadap persoalan rumah tangga ternyata lebih besar. Situasi ini dapat diterjemahkan bahwa independensi perempuan dalam membuat keputusan-keputusan domestik masih dibawah laki-laki meskipun mereka berposisi sebagai aktor utama dalam lingkup rumah tangga.

V.a.3 Pembahasan

Profil peran jurnalis dilihat dari perspektif gender menghasilkan temuan bahwa terdapat perbedaan peran antara jurnalis laki-laki dan perempuan. Laki-laki terlihat begitu dominan dalam memainkan peran pada aktifitas produktif atau yang berkaitan dengan aktifitas jurnalistik, sebaliknya perempuan dominan pada bidang domestik (Tabel 5.6).

**Tabel 5.8: Analisis Keseluruhan Profil Peran Jurnalis
Perspektif Gender**

Bidang	Kode	Indikator	Kesimpulan	Keterangan
Publik/ jurnalistik	A1	Kesejahteraan	Perempuan>Laki- laki	Positif
	A2	Akses	Perempuan<Laki- laki	Negatif
	A3	Partisipasi	Perempuan<Laki- laki	Negatif
	A4	Kesadaran	Perempuan<Laki- laki	Negatif
	A5	Kontrol	Perempuan<Laki- laki	Negatif
Domestik	B1	Kesejahteraan	Perempuan>Laki- laki	Positif
	B2	Akses	Perempuan>Laki- laki	Negatif ¹⁾
	B3	Partisipasi	Perempuan>Laki- laki	Negatif ²⁾
	B4	Kesadaran	Perempuan>Laki- laki	Negatif ³⁾
	B5	Kontrol	Perempuan<Laki- laki	Negatif
Kesimpulan secara umum :			2 positif, 8 negatif	

Sumber : Data Primer diolah kembali, 2010

Keterangan :

- 1) Negatif, karena informasi yang timpang antara laki-laki dan perempuan
- 2) Negatif, Partisipasi yang besar mendukung stereotipe
- 3) Negatif, Kesadaran yang dimiliki mendukung stereotipe
- 4) Negatif, Kendali terhadap keputusan rumah tangga dikuasai laki-laki.

Secara keseluruhan profil peran laki-laki dan perempuan yang berkerja sebagai jurnalis pada media cetak lokal di Yogyakarta cenderung timpang dalam aktualisasinya. Tabel 5.6 menunjukkan bahwa hampir di semua item peran jurnalis perempuan menunjukkan peran yang negatif kaitanya dengan tuntutan peran ideal seorang jurnalis. Dari 10 item

yang digunakan sebagai indikator, delapan diantaranya menunjukkan peran negatif perempuan dan hanya tiga (3) item yang positif. Artinya, berdasar perspektif gender masih terdapat kesenjangan peran antara jurnalis laki-laki dan perempuan antara domestik dan publik.

Peran laki-laki dalam aktifitas jurnalistik lebih tinggi di banding perempuan terutama pada aspek akses, kesadaran, partisipasi dan kontrol. Perempuan unggul pada aspek kesejahteraan. Tingginya dominasi laki-laki dalam aktifitas jurnalistik dibanding perempuan tersebut semakin mempertegas dua hal yakni *pertama* persepsi bahwa dunia jurnalistik adalah wilayah kerja yang sangat "laki-laki" dan kurang ramah terhadap perempuan. *Kedua*, hegemoni laki-laki dalam dunia kerja.

Adalah realitas yang tidak bisa dipungkiri bahwasanya sampai dengan detik ini laki-laki masih mendominasi pasar tenaga kerja termasuk dalam dunia kewartawanan. Mayoritas pekerja laki-laki memang lebih disukai dibandingkan perempuan, hal ini berkait erat dengan berlakunya semacam "anggapan" bahwa perempuan adalah tipikal pekerja jangka pendek yang kurang produktif sehubungan dengan hak-hak kodrati yang melekat dalam dirinya, seperti terpotongnya waktu bekerja untuk melahirkan, cuti haid dan mengurus anak, sehingga hal ini dipandang tidak menguntungkan dalam jangka panjang. Seringkali faktor ini menjadi alasan perusahaan enggan memberi fasilitas jurnalis perempuan untuk mengembangkan karir, karna khawatir hal ini akan mengurangi tingkat profitabilitas perusahaan.

Di bidang domestik peran perempuan lebih tinggi di hampir semua aspek kecuali pada aspek kontrol. Tingginya peran dan aktifitas reproduktif perempuan dalam ranah privat sudah pasti membatasi aktifitasnya sebagai jurnalis yang cenderung tinggi dan fluktuatif. Keterlibatan

perempuan dalam dunia jurnalistik tidak serta merta mengikis peran domestik yang melekat dalam diri mereka. Hal ini dilatari oleh kenyataan masyarakat masih dipengaruhi ideologi bias gender yang tidak menguntungkan posisi perempuan. Ideologi ini membedakan secara tegas identitas laki-laki dan perempuan ke dalam maskulin vs feminim, rasional vs. emosional, agresif vs pasif yang secara tradisional diyakini *inherent* dalam identitas jenis kelamin yang karenanya dianggap sebagai kodrat.

Perspektif gender memilah laki-laki dan perempuan tidak hanya berdasar jenis kelamin, tetapi juga berdasarkan peran dari masing-masing jenis kelamin. Hampir dalam segala hal perempuan selalu ditempatkan sebagai subordinat, sedangkan laki-laki adalah sebagai superordinat. Pembagian peran berbasis gender ini kemudian banyak merugikan perempuan, karena sebagai konsekuensi dari ketentuan peran seksual tersebut menempatkan peran gender perempuan di ranah domestik dan peran gender laki-laki di ranah publik. Peran gender ini kemudian melahirkan stigma bahwa perempuan hanya pantas berkarir di dunia domestik. Sehingga, sejauh apapun situs pergerakan seorang perempuan di luar rumah, dia akan kembali pada habitat asli yang secara sosial telah dikonstruksi untuknya, yaitu di "dunia domestik".

Sebaliknya berlaku kepercayaan bahwa laki-laki adalah kelompok yang paling berhak mengisi ruang publik. Dan ketika kondisi ini kemudian secara konsisten dipertajam oleh legitimasi dari sistem budaya yang bercorak patriarkhal yaitu sistem budaya yang menempatkan laki-laki pada posisi-posisi kunci dan bertindak sebagai aktor penentu kebijakan, maka konsekuensi logis yang kemudian timbul adalah produk-produk kebijakan yang dihasilkan mengandung bias terhadap laki-laki (*the masculine bias*) dan memarjinalkan perempuan.

Marginalisasi perempuan yang muncul kemudian menunjukkan bahwa perempuan menjadi *"the second sex"* atau kerap disebut sebagai warga kelas dua dengan status sebagai pelengkap keberadaan laki-laki. Namun demikian, harus diakui, tidak semua perempuan memiliki sensitivitas terhadap isu ketidakadilan gender. Mereka menerima tindak diskriminasi sebagai hal yang wajar sepanjang tidak berbenturan dengan ajaran agama dan norma-norma sosial yang bekerja di masyarakat, sehingga monopoli laki-laki atas perempuan yang tercermin dalam berbagai dimensi kehidupan diterima secara meluas sebagai suatu hal yang biasa dan tidak perlu diperdebatkan (*taken for granted*). Dengan memandang tidak diskriminasi sebagai suatu kewajaran memberikan indikasi bahwa etos pengorbanan perempuan masih sedemikian kuat, hal ini menjadi penyebab rendahnya keinginan perempuan untuk berusaha mengembangkan kemampuan yang mereka miliki secara maksimal. Akibatnya, meskipun mereka terlibat pada berbagai kegiatan di luar rumah belum mampu memberikan kualitas kontribusi yang optimal, disebabkan oleh bias "ruang" publik dan domestik yang masih begitu terasa.

V.b. Sajian Data Kualitatif

V.b.1 Profil kesetaraan gender dalam aspek kebijakan dan produk

Berikut ini akan diuraikan temuan data kualitatif yang bersumber dari wawancara mendalam terhimpun dalam sub bab kebijakan korporasi media lokal. Mereka adalah pimpinan penting pemegang kendali kebijakan redaksional media cetak, termasuk dua orang adalah ketua asosiasi jurnalis di Yogyakarta (Octo Lampito/PWI) dan Pito Agustin (AJI).

Secara organisasi/institusi, kebijakan yang berkaitan prinsip-prinsip kesetaraan gender, keadilan struktural dan fungsional diantara pekerja laki-laki dan perempuan (baca: jurnalis) tercermin secara normatif dalam kebijakan perusahaan yang secara verbal disampaikan responden. Hanya saja, kebijakan itu bersifat norma tak tertulis yang disepakati bersama sebagai nilai dan budaya organisasi, belum secara formal tertulis dan mencerminkan suatu kesepakatan bersama antara pimpinan dan bawahan. Dalam konteks ini, pada kelima organisasi media yang diteliti: Harian Kedaulatan Rakyat, Harian Yogya, Harian Bernas, Harian Radar Yogya dan Koran Tempo biro Yogyakarta belum terdapat ketentuan tertulis yang mengikat secara etis dan spesifik dalam konteks kebijakan kesetaraan gender.

Informan dari pimpinan media setempat hanya menegaskan adanya norma sosial untuk saling menghormati dan mendudukan posisi masing-masing pekerja sesuai bidang keahlian dan jabatannya. Etika korporasi yang bersifat tertulis juga belum dianggap perlu, khususnya yang secara khusus mengatur dinamika relasi antara jurnalis perempuan dan laki-laki dalam ruang pemberitaan ketika waktu bekerja dan pasca waktu kerja. Ketentuan ketenagakerjaan yang mengikat karyawan dan perusahaan seperti PKB (perjanjian kerja bersama) antara jurnalis dengan pemilik media, hanya merujuk pada hak dan kewajiban normative yang secara statistik berlaku mengacu UU Ketenagakerjaan, belum sensitif gender.

Di harian Radar Yogya misalnya, telah ada kode etik umum, pedoman khusus Jawa Pos grup terkait kekaryawanan dan tugas jurnalistik, tetapi aturan khusus gender equality tidak ada, semuanya berdasarkan pada aplikasi naluri kemanusiaan dan HAM yang dimiliki masing-masing individu. Hal serupa juga berlaku di harian Yogya. Kedua media itu

merupakan media bisnis jaringan di berbagai kota di Indonesia. Jika dihitung secara statistik, maka jumlah jurnalis perempuan dan laki-laki pada kelima media yang diteliti tidak berimbang. Adapun tabel yang datanya diambil dari box susunan pengelola lima redaksi media yang diteliti ditambah dua media yang tidak diteliti dapat dilihat sebagai berikut:

Tabel 5.9: Data Perbandingan Jenis Kelamin Jurnalis

Media	Jurnalis Laki-Laki	Jurnalis Perempuan
Kedaulatan Rakyat	41	6
Bernas	21	8
Radar Yogya	25	5
Koran Tempo	1	3
Harian Yogya	44	15
Seputar Indonesia	11	1
Kompas	3	0
TOTAL	146	38

Catatan: data dalam tabel mencerminkan total jumlah jurnalis yang bekerja hanya untuk kantor perwakilan Yogya (bagi media cetak jaringan nasional).

Ketiadaan kebijakan yang bersifat tertulis berisiran dan berkonsekuensi dengan tiadanya kebijakan afirmasi atau penjabatan secara khusus untuk posisi tertentu kepada kaum jurnalis perempuan dalam ruang redaksi dan isi pemberitaan. Secara normatif dan diplomatis, kelima pimpinan media menyatakan bahwa perusahaan mereka menerapkan asas kompetensi dan kompetisi terbuka pada rekrutmen dan pengembangan kapasitas, karir jurnalis. YB. Margantoro dari harian Bernas menegaskan, ada khusus dorongan untuk jurnalis perempuan tetapi tidak wajib. Di Bernas sudah ada yang menjadi pimpinan/redaktur senior seperti ibu Arie Giyanto. Meskipun keberadaan perempuan dalam pucuk

pimpinan redaksi strategis, tetapi keputusan tetap diambil secara kolektif. Octo Lampito, Pemimpin Redaksi KR menyatakan, tidak sulit bagi perempuan jurnalis untuk berkarir hingga posisi puncak sebagai pemimpin redaksi. Tidak ada pembedaan, tidak ada kebijakan khusus perempuan di posisi tertentu. Di KR, bahkan jurnalis perempuan ada yang di top manajemen dan menjadi aktifis gender. Mereka meraih posisi itu bukan karena status sebagai perempuan, tetapi kompetensi dan loyalitasnya. Faktanya, meskipun didorong, jurnalis perempuan kerap kali justru tidak berminat di struktural.

Hal serupa juga berlaku pada pola rekrutmen jurnalis. Hampir semua pimpinan media yang ditemui menyatakan tidak ada diskriminasi, kecuali adanya ketentuan untuk tidak boleh menikah atau dalam status belum menikah ketika calon jurnalis mengikuti seleksi bahkan hingga dua tahun masa percobaan sebelum diangkat menjadi jurnalis tetap. Seleksi tidak dibedakan, tidak ada prioritas khusus agar perempuan ada yang mendaftar dan diluluskan. Diakui oleh pemimpin redaksi Harian Radar Yogya, surat kabar adalah dunia laki-laki, sehingga kerap kali seleksinya menunggu pendaftar perempuan agar lebih memberi warna dalam ruang pemberitaan. Namun ketiadaan pendaftar perempuan tidak menghambat proses seleksi. Terkait syarat prioritas belum menikah, ini dilatarbelakangi alasan potensi kerepotan terutama saat tahap magang. Khusus pada harian Kedaulatan Rakyat, status menikah atau tidak saat mendaftar tidak terlalu dipertimbangkan. Menurut Octo Lampito, tidak ada pembedaan, semua sama. Lebih melihat pada kompetensi yang terbaik, single atau berkeluarga tidak penting.

Dalam konteks pemberian reward rutin, khususnya gaji bulanan dan berbagai tunjangan, tidak terdapat perbedaan yang signifikan antara jurnalis perempuan dan

laki-laki. Posisi perempuan jurnalis yang bekerja sebagai individu dan sudah berkeluarga sama statusnya dengan laki-laki dalam hak untuk memperoleh tunjangan keluarga. Perempuan jurnalis yang telah berkeluarga tidak dianggap sebagai pekerja *single*. Para impin media yang diteliti menegaskan pernyataan diatas dapat di cross cek ke jurnalis yang bersangkutan. Pemberian gaji dan tunjangan ini merujuk kepada kompetensi dan beban kerja yang memang setara antara jurnalis perempuan dan laki-laki, bukan pada perbedaan peran dalam keluarga masing-masing.

Dalam kaitannya dengan lingkungan kerja yang ramah gender, semua institusi media yang diteliti tidak memiliki ruang atau tempat khusus untuk perempuan jurnalis yang membawa anak, menyusui atau sedang hamil agar dapat melakukan aktifitas privat. Alasan dikemukakan dua. Tiadanya ruang yang tersisa akibat penggunaan secara maksimal untuk keperluan redaksi. Kedua, tiadanya kebutuhan dari jurnalis perempuan sendiri, tiadanya kasus permintaan untuk hal tersebut karena biasanya sudah dilakukan di rumah sebelum bekerja. Di KR, Radar Yogya, Harian Yogya dan Bernas, ruang khusus menyusui diakui tidak ada. Kalaupun disediakan, sifatnya insidental, bahkan bisa dilakkan di ruang direksi. Namun diakui belum pernah ada jurnalis perempuan yang meminta ruangan dimaksud.

Jika diamati langsung di ruang redaksi kelima media, penempatan ruang kerja dan meja kerja dilakukan secara bergabung, tidak diberi jarak yang cukup memadai antara meja kerja jurnalis perempuan dan laki-laki untuk mengantisipasi terjadinya pelecehan seksual. Alasannya ada dua. Pertama, norma sosial yang sudah melekat kuat dan kontrol yang intensif dari pimpinan lebih menjamin tiadanya tindak pecehan. Kedua, tiadanya sekat yang permanen dan jarak yang lebih dekat justru disukai sehingga terjalin

keakraban, kerjasama dengan tetap saling menghormati. Jika diamati, para jurnalis perempuan dan laki-laki bekerja dengan intens pada komputer/alat kerja masing-masing saat menulis berita, meskipun mereka juga tampak akrab berbincang. Menurut pimpinan kelima media, budaya guyon yang sekali waktu 'nyerempet' dapat saja muncul, tetapi dalam kemasan yang tidak menyinggung, tidak bermaksud melecehkan.

Berkenaan dengan adanya tugas menyusui, hamil atau sakit yang mengharuskan jurnalis perempuan istirahat atau bekerja di rumah, maka empat redaksi media memberi toleransi bahwa berita bisa dikerjakan di rumah, hasilnya dapat kirim via imel ke redaksi. Kecuali harian Yogya yang melarang dan justru memberikan kesempatan istirahat total bagi jurnalis perempuan yang menghadapi kendala. Di Harian Kedaulatan Rakyat, toleransi mengerjakan berita di rumah diberikan sepanjang tidak permanen dan pada kondisi yang memaksa. Berkenaan dengan hak cuti, seperti cuti haid, semua media memberlakukan dan pasca pelaksanaan cuti haid tidak berpengaruh terhadap hitungan masa kerja, karir struktural dan pemberian reward prestasi bulanan/tahunan kepada yang bersangkutan.

Dalam pengembangan profesi, pelatihan yang khusus tentang kesadaran gender di ruang redaksi dan pemberitaan tidak pernah dilakukan oleh institusi kelima media secara khusus. Penambahan pengetahuan dan wawasan gender biasanya didapat jurnalis dari liputan seminar, mengikuti workshop gender diluar berdasarkan undangan dan atau minat pribadi jurnalis perempuan, seperti yang ditempuh jurnalis senior Esti Susilarti dan Fadmi Sustiwi dari harian Kedaulatan Rakyat. Yang menarik dicermati, jika ada undangan pelatihan atau seminar gender dan kesehatan reproduksi, justru jurnalis perempuan yang biasanya diutamakan dikirim. Terkait pelatihan profesional secara

umum, semua media yang diteliti mengaku memberi kesempatan sama antara jurnalis laki-laki dan perempuan, sepanjang masa kerja jurnalis yang bersangkutan telah terpenuhi batas minimalnya, misalnya sudah dua tahun.

Untuk kebijakan peliputan lapangan dan perbidangan isu liputan, secara normatif tidak ada perbedaan yang mengacu kepada bias gender sebagaimana diasosiasikan oleh banyak teoritis kritis. Penentuan lokasi liputan dan pengembangan kompetensi keilmuan lebih ditentukan minat, kemampuan dan prinsip rotasi yang berbasis tujuan penguatan pengalaman lapangan jurnalis. Tidak ada kebijakan pembeda liputan, tergantung minat dan permintaan juga giliran. Apabila tugas liputan menuntut hingga malam hari, bagi jurnalis perempuan disediakan transportasi penjemputan. Meskipun demikian fasilitas ini jarang dimanfaatkan karena biasanya jurnalis perempuan dijemput oleh kerabat atau pacar yang bersangkutan.

Jika jurnalis perempuan ikut hadir rapat redaksi hingga malam hari, mereka dapat meminta diantar pulang petugas. Prinsipnya redaksi kelima media memberikan tawaran jaminan keamanan semua jurnalis yang bertugas malam hari atau pada lokasi yang krusial/berbahaya dengan berdiskusi terkait berbagai resiko sebelum diberikan penugasan. Menurut Octo Lampito dan Amien Surachmad, pengalaman KR dan Radar, justru jurnalis perempuan menyukai bekerja hingga larut malam di redaksi atau berbincang santai hingga larut malam.

Berkenaan dengan panduan penulisan berita dan penempatan berita yang terkait isu-isu perempuan, kelima media mengakui tidak memiliki panduan baku yang secara jelas/tertulis diberlakukan kepada jurnalis. Secara fundamental, penulisan berita dan pemuatannya mengacu Kode Etik Jurnalistik yang berlaku nasional. Misalnya untuk

menyamarkan korban bagi perempuan yang diperkosa, menyamarkan gambar korban yang dimuat serta mengganti nama korban dengan nama samaran. Kode etik internal tidak ada yang tertulis, semua mengacu kode etik umum. Pada harian Kedaulatan Rakyat, prinsipnya yang penting menggunakan bahasa yang santun, tidak menyinggung para pihak. Di harian BERNAS dan harian Yogya, ditekankan untuk lebih menonjolkan fakta terjadinya perbuatan melawan hukum dari kasus perkosaan atau tindak kriminal lain terhadap perempuan, ketimbang kronologi peristiwa yang lebih bertendensi mengajarkan kriminalitas.

Di Harian Yogya dan KR, perempuan jurnalis yang berminat pada liputan kriminal didukung, karena fakta menunjukkan, mereka lebih handal mendekati sumber berita dan memudahkan kerja pengumpulan fakta empiris. Isu-isu terkait gender bagi kelima media dinilai sangat penting. Sehingga kelima media telah pernah menempatkan kasus-kasus aktual terkait isu perempuan misalnya trafficking pada halaman depan surat kabar. Di Radar Yogya, publikasi isu gender diwujudkan dengan rubrik khusus perempuan, halaman khusus remaja putri pada setiap minggunya dan menjalin kerjasama dengan LSM misalnya Rifka Annisa dalam mengulas isu gender. Diakui, di redaksi Radar Yogya dan Grup Jawa Pos pada umumnya, foto perempuan lebih menarik ditempatkan di halaman depan, meskipun topik yang dikupas hanya remeh temeh. Tindakan ini dimotivasi oleh tujuan marketing.

Dalam konteks berbeda terjadi pada harian KR, Harjo dan Bernas. Penonjolan isu-isu perempuan dan gender tidak hanya dilakukan melalui berita yang mengacu peristiwa, tetapi dengan membuat rubrik khusus konsultasi bekerjasama dengan LSM perempuan di Yogyakarta. Rubrik-rubrik dikemas lebih *fashionable*, menonjolkan isu-isu urban

dan konsultasi masalah seksual, karir termasuk profil perempuan sukses. Harian Yogya memiliki rubrik Edukasi bekerjasama dengan LSM Rifka Annisa. Sebelumnya, Rifka Annisa, LSM perempuan terkemuka Yogyakarta pernah bekerjasama dengan harian Radar Yogya dan Kedaulatan Rakyat. Pola kerjasama ini bersifat temporer 1 hingga 2 tahun dengan materi dari pihak LSM.

Secara ringkas, tabulasi hasil wawancara mendalam diuraikan sebagai berikut:

Tabel 5.10: Kompilasi Wawancara Mendalam Pimpinan Media Lokal

Aspek	Radar Yogya	Harlan Bernas	Kedaulatan Rakyat	Harlan Yogya	Koran Tempo
Kebijakan Gender	Ada kode etik umum, pedoman khusus Jawa Pos Grup Aturan khusus liputan gender equality tidak ada, hanya mengacu naluri	Tidak ada kode etik khusus tertulis soal gender. Intinya tidak mencari sensasi, ekspl. birahi, tapi konteks hukum	Tidak ada yang tertulis, hanya <i>Dianjurkan jangan pacaran dengan wartawan perempuan</i>	Tidak ada yang spesifik, hanya PKB dan ada serikat pekerja	Tidak ada kode etik khusus tertulis soal gender.
Pemetaan Jenis Kelamin	25 laki-laki, 5 perempuan	21 laki-laki, 8 perempuan	41 laki-laki, 6 perempuan	44 laki-laki, 15 perempuan	1 laki-laki, 3 perempuan
Affirmative Action	Tidak ada, semua berkompetisi sesuai kemampuan. Pemred perempuan akan berpengaruh, terutama lay out dan tulisan lebih sensitive	Tidak ada dorongan khusus untuk jurnalis perempuan. Tapi sudah ada yang jadi pimpinan, redaktur senior	Tidak ada perbedaan, tidak ada kebijakan khusus jurnalis perempuan di posisi tertentu. Di KR perempatan ada yang di top manajemen Tidak sulit.	Semua berhak dan sesuai kompetensi. Presdir grup Bisnis Indonesia ada perempuan. Keputusan tetap kolektif	Tidak ada, semua berkorn petisi sesuai kemam puan.
Rekrutmen Setara	Seleksi tidak dibedakan, tidak ada prioritas khusus. Koran dunia laki-laki, menunggu pendaftar	Tidak ada pertimbangan gender, semua berdasarkan kompetensi. Ada aturan masuk awal	Tidak ada perbedaan, semua sama. Mana yang terbaik, single atau berkeluarga tidak penting. Gaji dan	Ada aturan tidak boleh menikah selama masih magang. Prestasi dan minat lebih diutamakan	Sama

<p>Pengembangan Diri dan Lingkungan</p>	<p>perempuan. Prioritas belum menikah, biar tidak ribet. Gaji/tunjangan sama</p>	<p>tidak menikah, agar tidak ribet</p>	<p>tunjangan sama laki-laki dan perempuan</p>	<p>Sama dengan ketiga media sebelumnya</p>	<p>Tidak ada pembagian kerja yang khas, semua berda sarkan minat. Pelecehan seks tidak ada, cuma guyonan</p>
<p>Training Gender</p>	<p>Liputan politik dan kriminal laki-laki, liputan budaya perempuan. Tidak ada pembagian kerja yang khas, semua berdasarkan minat. Pelecehan seks tidak ada, cuma guyonan</p>	<p>Semua setara, cuma ada pemberian pemahaman perbedaan kondisi sehingga ada kemakluman. Pendidikan dan hiburan diminati perempuan. Olah raga cowok terus.</p>	<p>Kesempatan training/promosi sama. Tidak ada pembagian kerja khas, ruang kerja bergabung. Tidak ada pengamanan khusus reporter perempuan. Biasanya ada pacar. Ruang kerja digabung. Pernah digoda nara sumber, lalu diingatkan cara berbusana lebih sopan</p>	<p>Tidak ada training internal. Ada training diluar dan yang dikirim perempuan</p>	<p>Semua sama, tidak ada prio ritas.</p>
<p>Gender Area dan Aksesibilitas</p>	<p>Ruang khusus menyusui tidak ada. Insidental bisa di ruang direksi. Meja</p>	<p>Belum ada yang bawa anak, tidak ada ruang khusus tapi ada yang bisa dipakai. Ruang</p>	<p>Pelatihan gender tidak ada di internal, tapi aktifitas diluar banyak misalnya bu Fadmi Sustiwati</p>	<p>Tidak ada penitipan anak, menyusui. Ruang sempit. Ada etika tidak tertulis untuk tidak</p>	<p>Ruang khusus menyusui tidak ada. Insidental bisa di ruang direksi. Meja</p>

bi-litas	Insidental bisa di ruang direksi. Meja bisa dipakai. Ruang khusus	kerja digabung. Tidak ada aturan tertulis pelecehan, tapi bisa protes. Pekerjaan bisa dibawa pulang asal ada pemberitahuan	menyusui. Ada ruang tertutup silahkan tapi tidak ada yang pake. Bawa anak sudah umur 3 tahun. Pekerjaan sekali waktu bisa dibawa ke rumah, tapi tetap ke kantor koordinasi. Tidak pernah ada kasus pelecehan	melecehkan. Tidak masuk kerja boleh, kerjaan tidak perlu dibawa ke rumah	Insiden
Kebijakan Lokasi Liputan	<p>kerja bergabung. Belum pernah ada kasus menyusui di kantor. Berita bisa dirikan lewat imel hasilnya. Cuti haid ada, tidak berpengaruh masa kerja</p> <p>Bebas, bisa dijemput kalau kemalaman oleh rekan jurnalis, pacar, suami. Misalnya liputan musik sampai malam, justru jurnalis perempuan senang.</p>	<p>kerja digabung. Tidak ada aturan tertulis pelecehan, tapi bisa protes. Pekerjaan bisa dibawa pulang asal ada pemberitahuan</p>	<p>menyusui. Ada ruang tertutup silahkan tapi tidak ada yang pake. Bawa anak sudah umur 3 tahun. Pekerjaan sekali waktu bisa dibawa ke rumah, tapi tetap ke kantor koordinasi. Tidak pernah ada kasus pelecehan</p>	<p>melecehkan. Tidak masuk kerja boleh, kerjaan tidak perlu dibawa ke rumah</p>	<p>Insidental bisa di ruang direksi. Meja bisa dipakai. Ruang khusus</p>
Penggunaan Bahasa	<p>Yang utama kepekaan wajah di blur</p>	<p>Dorongan ada tapi tidak memaksa agar perempuan meliput wilayah keras. Ada yang diberi kesempatan malah tidak bersedia</p>	<p>Tidak ada kebijakan membedakan area liputan, tergantung minat, giliran dan permintaan Liputan malam dan kriminal lebih mampu perempuan mendekati sumber. Kalau kemalaman diantara pulang. Misalnya rapat sampai jam 7</p>	<p>Sama dengan empat media sebelumnya</p>	<p>Sama</p>
	<p>Yang utama kepekaan wajah di blur</p>	<p>Kode etik internal tidak ada tertulis, mengacu kode etik umum. Yang penting santun</p>	<p>Kode etik internal tidak ada tertulis, mengacu kode etik umum. Yang penting santun</p>	<p>Memberita kan fakta, bukan kronologi. Nama samaran. Foto korban dihindari</p>	<p>Sama</p>

<p>Pengemasan dan Rubrikasi</p>	<p>Isu gender penting: trafficking sering dimuat. Ada rubrik khusus perempuan mingguan.</p>	<p>Sering memuat isu gender, ada kepekaan. Ada rubrik khusus remaja perempuan dan keluarga</p>	<p>Isu gender kerap dimuat di halaman satu, ada rubrik kerjasama</p>	<p>Ada rubrik khusus perempuan dan keluarga, rubrik Edukasi Rifka Annisa.</p>	<p>Isu gender kerap dimuat di halaman satu</p>
---------------------------------	---	--	--	---	--

Sayangnya, jika di cross cek ke teks berita, beberapa pernyataan pimpinan media diatas bertolakbelakang khususnya terkait menerapkan prinsip isi berita yang ramah terhadap perempuan, sebagaimana bisa dicermati pada dua contoh berita berikut ini, tentang perkosaan di Yogyakarta:



Sumber: Jogja Express, suplemen kriminal Harian Yogya



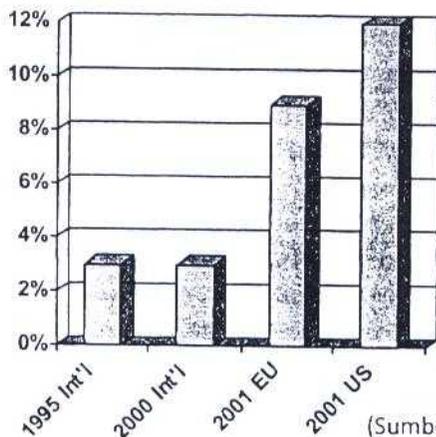
Sumber: harian Kedaulatan Rakyat

V. c. Refleksi: Media, Gender dan Demokrasi

Diskursus gender dan media berkorelasi kuat dengan isu makro demokratisasi dan kebebasan pers. Kesetaraan hak sipil (*equality of civil rights*) adalah instrumen penting demokrasi. Wacana *freedom for* atau kemerdekaan media untuk melakukan publikasi isu-isu krusial ke publik tanpa rasa takut, bersanding kuat dengan *freedom from*, atau rehabilitasi dan rekonstruksi manajemen internal media yang bermuara kepada kebebasan individu, kesetaraan dalam menjalankan fungsi redaksional. Bagi lembaga media yang tumbuh pada iklim demokratis di negara berkembang termasuk Indonesia, prinsip itu berarti kesatuan irama antara publikasi isu-isu sosial, advokasi persoalan bias gender di masyarakat dengan pembaharuan kebijakan redaksional dan korporasi yang pro-

sensitifitas gender. Temuan awal riset ini memberi isyarat adanya harapan bagi perubahan tersebut, setidaknya dari respon responden yang positif terhadap gagasan adopsi prinsip *gender balance* dalam *newsroom*.

Secara historis, konferensi PBB ketiga tentang perempuan tahun 1975 dan konferensi berikutnya yang digelar di Beijing, China tahun 1995 menetapkan *Platform for Action on Women in Media* dengan menempatkan media sebagai salah satu aktor kunci pemberdayaan. ICT menjadi wilayah pemberdayaan penting bagi perempuan untuk menjadi setara dengan laki-laki dalam sektor-sektor publik. Meskipun masih sulit menemukan data akurat, diprediksi ICT masih tertinggal dalam membuka diri bagi kiprah perempuan, dibanding sektor lain. Secara global jumlah profesional perempuan di media hanya sekitar 3 persen dan mayoritas mereka berada di kawasan Eropa dan Amerika Serikat. Pergerakan positif masih berjalan lambat dari tahun 1995 hingga 2001 sebagaimana tampak pada tabel dibawah ini:



(Sumber: Wilson, dkk. 2007)

Analog dengan ini, fenomena situasi jurnalis perempuan di media cetak lokal Yogyakarta juga tidak lebih baik. Sehingga menjadi pertanyaan besar: demokrasi yang berjalan di Indonesia ternyata tidak bergerak simultan dengan pemberdayaan perempuan. Demokrasi, dalam berbagai literatur selalu dipahami tidak hanya sebatas kesetaraan para pihak dalam proses pengambilan keputusan kolektif terkait isu-isu bersama, tetapi kepastian adanya jaminan untuk mempengaruhi, mengembangkan kapasitas personal dan mengimplementasikan segala keputusan tanpa rasa takut. Demokrasi dalam suatu institusi apapun yang melibatkan aktor lebih dari dua orang, harus bebas dari subordinasi dan hegemoni.

Relasi kekuasaan (*power relation*) antara pimpinan media dengan bawahan (jurnalis), antara produsen informasi dengan konsumen – meminjam istilah Michael Foucault--- harus setara dan membebaskan. Hegemoni positif bukan muncul dari satu kepemimpinan media yang otoriter, akan tetapi aktualitas dari sebuah sistem yang terbuka untuk dikoreksi terus-menerus, termasuk kebijakan newsroom.

Terkait hal diatas, Allen Donna dalam artikel bertajuk: "Six Point Communications Program for Restructuring the World's Communications System on the Basis of Democracy, 25 July 2006 menulis: *"The goal of democracy is to make reliable decisions-this is why society needs information about all segments of social life, social groups and individuals. If the range of social roles demonstrates a world full of opportunities for men and restrictions for women, or any on the basis of race, ethnicity or class then this society cannot be called democratic."*

Dalam seminar dan workshop media dan gender yang digelar Aliansi Jurnalis Independen Yogyakarta tahun 2009, peneliti mengidentifikasi masalah-masalah makro perburuhan

di media dalam lima besar berikut: (1) menurunnya kredibilitas profesi jurnalis akibat booming profesi ini dan terbukanya profesi ini bagi petualang nasib (*credibility crisis over jobs*), (2) Sistem relasi kerja yang tidak sehat, minim kontrak tertulis sehingga rawan PHK sepihak (*lost contracts*), (3) menurunnya kondisi lingkungan kerja, munculnya perusahaan media yang bermodal 'dengkul' menyebabkan infrastruktur dan standar operasi tidak menjadi perhatian sepanjang para jurnalis bersedia bekerja (*declining working conditions*), (4) Gaji dan penghargaan rendah, di Indonesia terendah dibanding di negara ASEAN lain (*low salary system*), (5) Hilangnya kenyamanan lingkungan peliputan lapangan sebagai konsekuensi dari krisis kredibilitas profesi ini (*lack of reporting hospitalities*), (6) Problem ketidaksetaraan gender, krisis identitas sebagai jurnalis perempuan di ruang kerja (*identity crisis on the workplace*).

Dalam situasi diatas, kebijakan pengarusutamaan gender masih buram. Ia bukan prioritas *newsroom management*, masih belum termasuk 'basic needs', dipandang kepentingan personal, minim dukungan institusional, masih sebagai wacana 'mewah', konsumsi diskusi, beberapa media baru sampai kepada 'etika tertulis', bukan etika empiris, gerakan advokasi perburuhan di media baru pada tahap *pressure* eksternal, bukan inisiatif internal.

Dilihat dari empat indikator berikut posisi perempuan masih lemah: (1) Akses (penguatan akses perempuan mengkonsumsi media): pembaca koran mayoritas laki-laki, (2) Partisipasi (penguatan jumlah dan peran perempuan dalam manajemen newsroom), (3) Kontrol (penguatan posisi struktural/kontrol perempuan dalam manajemen media/newsroom), (4) Manfaat (penguatan kesetaraan pelayanan kerja dan penghargaan kinerja: regulasi perburuhan).

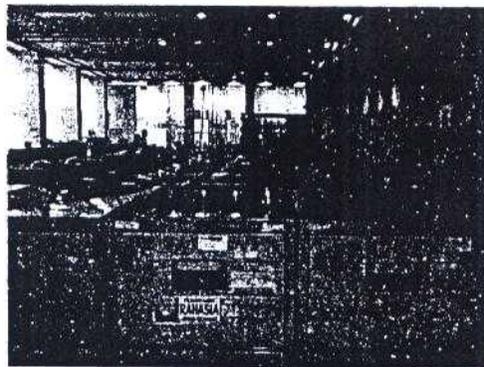
Secara makro, kondisi buram perempuan di sektor publik termasuk jurnalis perempuan adalah konsekuensi dari posisi kultural dan struktural mereka sebelum memasuki profesi itu yang tidak setara, secara absolut rendah, setidaknya lamban dalam mengakses pendidikan, pekerjaan dan mendapat stigma negatif di media (*women are disadvantaged absolutely and relative to men in terms of access to education, media exposure, and employment for cash*). Patut dicatat, norma-norma tradisional menjadi akar persoalan tersebut (*traditional gender norms, particularly those concerning wife beating, remain strongly entrenched*).

Dalam berbagai kasus di institusi publik termasuk media massa, demokrasi dan gagasan pemberdayaan hanya berada diatas kertas, atau berhenti pada pernyataan verbal pimpinan media. Faktanya, segala kebijakan institusi yang meliputi kebijakan perusahaan terhadap jurnalis dan kebijakan redaksional terkait isi berita tetap bias kelas sosial. Kelas sosial, meminjam adagium yang dikembangkan kelompok feminis Marxis tidak hanya berupa kelas kaya dan miskin, kuat dan lemah, tetapi laki-laki dan perempuan, dimana perempuan ditempatkan sebagai *the second sex*. Carole Pateman, penulis buku: *The Sexual Contract* (1988) menilai demokrasi tidak akan pernah ramah bagi kaum feminis karena: *women have neither now nor ever been accepted as full and equal members and citizens of any country known as a democracy*.

Mencermati temuan riset di surat kabar lokal tersebut diatas, setelah mengkomparasikan antara pernyataan pimpinan media, bukti dokumen pada berita yang disiarkan dan isian kuisioner oleh individu jurnalis, tampak terjadi kontradiksi pada berbagai skala: skala kecil, menengah dan besar antara pernyataan verbal dan fakta dokumen. Situasi ini merefleksikan transisi kebijakan yang belum selesai.

Kontradiksi terjadi karena berbagai faktor: Pertama, tiadanya kebijakan yang tegas, terumuskan dengan jelas, tertulis dan mencerminkan kehendak semua pihak menerapkan suatu keputusan strategis. Kedua, penempatan isu kesetaraan gender, bukan pada kebutuhan utama, terkait kebijakan untuk penguatan integritas media, akan tetapi sebagai *lip service* semata, sehingga kebijakan untuk mendukung isu gender lebih dianggap perlu untuk sebuah pernyataan formal, insidental bukan substansial dan fundamental.

Meminjam istilah Michael Foucault, kebijakan mendukung kebebasan berekspresi dan kesetaraan gender di media adalah 'sebuah permainan belaka', dalam situasi tiadanya kekuatan hukum tetap yang mengintervensi. Ketiga, ketiadaan resources pendukung yang kuat dari internal media dalam penerapan kebijakan anti diskriminasi gender. Antara lain tercermin dari ketidakmampuan menyediakan ruang khusus bagi jurnalis yang sedang menyusui, ruangan yang memadai dalam produksi berita bagi jurnalis perempuan. Ruang kerja merekapun disatukan dengan jurnalis laki-laki sebagaimana tampak pada gambar berikut ini:



(Sumber: Studio SCTV Jakarta, dipotret Masduki)

Statistik media di Indonesia menunjukkan, data PWI tahun 1998 ada 4.687 jurnalis laki-laki dan 'hanya' 461 jurnalis perempuan. Jumlah ini mengecil lagi jika membicarakan posisi struktural dalam media yang terkait pengambilan keputusan: perempuan hanya mengisi 18 persen dari seluruh sumber yang diliput media di dunia, mereka jarang ditempatkan sebagai nara sumber 'pemimpin', 'pahlawan' aktif-progresif, mereka individu, korban sosial, perempuan dikonstruksi bukan sumber 'pemikir' tetapi hanya figur 'sensual'.

Secara positif, patut dicatat Yogyakarta tidak menghadapi semua persoalan sebagaimana digambarkan berikut: *women seeking to enter the media face sexist attitudes, sexual harassment, pay inequalities, discrimination in assignments and promotions, inflexible work environments, and a lack of support mechanisms for working women.* Dalam sepuluh tahun terakhir, jumlah mahasiswa jurnalistik berjenis kelamin perempuan meningkat tajam, meskipun mereka yang akhirnya memilih profesi jurnalis jumlahnya masih minim. Tiga penyebabnya adalah: gaji yang rendah, promosi jabatan yang tidak pasti dan pilihan profesi lain dibidang Komunikasi yang lebih adaptif misalnya menjadi *public relations officer*.

Temuan riset ini mengkonfirmasi ada relasi yang kuat antara representasi isu-isu perempuan di media yang kurang sensitif gender, kondisi struktural redaksi di media dan kultur patriarkhi di masyarakat lokal. Meminjam kembali Foucault, sejauh ini, gagasan besar penerapan kebijakan redaksional dan perusahaan yang mengadopsi nilai-nilai kesetaraan gender hanyalah eufimisme dari kebutuhan rekonstruksi ulang budaya korporasi institusi komersial menuju *hegemonic relations of ideology and institutional power to the culturally valid gender regime.*

Sejumlah situasi lain sebagaimana digambarkan Marianne Barrett muncul pada media lokal di Yogyakarta. Dalam artikel tentang Glass Ceiling in Television, Barrett menggambarkan: laki-laki tetap saja akan memelihara dominasinya dalam ruang pekerjaan formal. Jikapun terjadi promosi jabatan bagi jurnalis perempuan, itu lebih dilihat sebagai penghargaan atas komitmen dan loyalitas pada kekuasaan laki-laki dan lip service perubahan anggapan akan hak-hak gender. Kondisi-kondisi yang tidak fleksibel bagi perempuan tetap berlangsung sedemikian rupa, dan itu mempengaruhi promosi pekerjaan mereka. Jenis pekerjaan jurnalis yang memerlukan waktu kerja lebih panjang dari pekerjaan kantoran pada umumnya dan budaya malam (begadang) menyebabkan perempuan lebih tertekan dan akhirnya memilih pekerjaan yang lebih 'tertib' tetapi statis atau menjadi ibu rumah tangga. Mayoritas perempuan pada kondisi tersebut akhirnya 'secara sukarela' meninggalkan jabatan pada saat tertentu dan memberi peluang laki-laki untuk tampil. Ketika meneliti karir jurnalis perempuan, Shoemaker and Reese (1996), menemukan kesenjangan, hanya 5 persen jurnalis perempuan yang berkarir hingga lebih dari 20 tahun, pada umumnya mereka hanya aktif sekitar 5 tahun di media.

Berbagai ketimpangan peran dalam institusi media, sebagaimana tampak pada temuan riset ini, kerap kali tidak dirasakan sebagai 'persoalan serius' bagi individu jurnalis. Indikasinya, mereka tidak terlampau mepedulikan persyaratan administratif dan lingkungan kondusif yang menunjang hal itu dalam proses rekrutmen dan saat menduduki jabatan strategis. Kondisi ini dapat dimaklumi karena media dan jurnalis lokal, terutama di Yogyakarta telah mengalami apa yang dilukiskan sebagai 'simplifikasi kognitif' atas isu-isu krusial atas nama kultur: *gender biased as thing*

that socially constructed. Dalam berbagai pelatihan jurnalis sensitif gender, kerap kali ditemukan jurnalis perempuan dan laki-laki baru menyadari diskriminasi kebijakan di media mereka dan bersikap defensif atas sejumlah kebijakan yang telah diterapkan, atas nama 'kepentingan perusahaan'. Perempuan tetap merasa 'nyaman' dalam situasi ketidaksadaran telah mengalami diskriminasi.

Media massa pada umumnya di masa depan akan menjadi area dominan bagi berlangsungnya eksploitasi pekerja, termasuk jurnalis perempuan apabila tidak dilakukan gerakan global pencerahan institusi. Beijing Platform for Action telah menempatkan media sebagai pilar gerakan kesetaraan gender. Persoalan berikutnya adalah adopsi dan adaptasi platform itu dalam kebijakan redaksional media yang sesuai kondisi lokal. Aliansi Jurnalis Internasional (IFJ) sudah pernah menggelar konferensi *Gender: Equality in the newsroom*, menghasilkan Brussels Declaration, 30-31 May, 2009. Sekitar 60 peserta dari 45 negara hadir dan berkomitmen secara global. Riset-riset dan workshop untuk mengkaji implementasinya di semua jenis media diperlukan segera. Riset yang dilakukan pada media cetak utama di Yogyakarta ini ibarat letupan kecil dari upaya besar meletupkan kesadaran untuk pengarusutamaan gender dan pluralisme redaksional.

Jalan keluar komprehensif yang dianjurkan oleh Colleen Lowe Morna dalam risetnya *Promoting Gender Equality In And Through The Media: A Southern African Case Study tahun 2002* barangkali menarik diikuti: (1) *Empowering women journalists*; (2) *Creating alternative media for women's voices to be heard*; (3) *Seeking to bring about gender balance in the institution of the media as well as in its editorial content.* Gagasan ini cenderung masih abstrak dan

makro, tetapi menarik didiskusikan. Jika ini sudah terjadi, maka pertanyaan soal *who makes news?* dimasa mendatang dapat dijawab dengan percaya diri: perempuan memiliki kontribusi signifikan. Tetapi kapan? *Walaahu'alam.*

BAB VI

KESIMPULAN DAN SARAN

VI.a. Kesimpulan

Dari temuan dan analisis data penelitian ini dapat diuraikan kesimpulan penelitian sebagai berikut:

Pada konteks subjektif individu jurnalis, ditemukan data yang bersifat selaras dan sekaligus data yang kontradiktif dengan pernyataan pimpinan media, khususnya empat media cetak lokal Yogyakarta yang menjadi obyek penelitian. Dalam level individu jurnalis ditemukan perbedaan peran jurnalis laki-laki dan perempuan dilihat dari perspektif gender. Laki-laki dominan dalam memainkan peran pada aktifitas produktif atau yang berkaitan dengan aktifitas jurnalistik di ruang pemberitaan, sebaliknya perempuan dominan pada bidang domestik.

Secara keseluruhan profil peran laki-laki dan perempuan yang berkerja sebagai jurnalis pada media cetak lokal di Yogyakarta cenderung timpang dalam aktualisasinya. Hampir di semua item peran jurnalis perempuan menunjukkan peran yang negatif kaitanya dengan tuntutan peran ideal seorang jurnalis. Dari 10 item yang digunakan sebagai indikator, 8 diantaranya menunjukkan peran negatif perempuan dan hanya 3 item yang positif. Artinya, masih terdapat kesenjangan peran antara jurnalis laki-laki dan perempuan berdasarkan jenis kelamin.

Peran laki-laki dalam aktifitas jurnalistik lebih tinggi di banding perempuan terutama pada aspek akses, kesadaran, partisipasi dan kontrol, sedangkan perempuan lebih ungu

pada aspek kesejahteraan saja. Tingginya dominasi laki-laki dalam aktifitas jurnalistik dibanding perempuan tersebut semakin mempertegas dua hal yakni *pertama* persepsi bahwa dunia jurnalistik adalah wilayah kerja yang sangat "laki-laki" dan kurang ramah terhadap perempuan. *Kedua*, hegemoni laki-laki dalam dunia kerja. Di bidang domestik peran perempuan lebih tinggi di hampir semua aspek kecuali pada aspek kontrol. Tingginya peran dan aktifitas reproduktif perempuan dalam ranah privat sudah pasti membatasi aktifitasnya sebagai jurnalis dengan ritme kerja yang tinggi. Keterlibatan perempuan dalam dunia jurnalistik tidak serta merta mengikis peran domestik yang melekat dalam diri mereka.

Pada konteks subjektif pimpinan media, telah diterapkan berbagai kebijakan struktural korporasi yang mengacu kepada prinsi-prinsip kesetaraan gender, meliputi kepastian hak atas perlakuan yang setara antara jurnalis laki-laki dan perempuan. Sejak proses rekrutmen, adaptasi, integrasi, pengembangan hingga reward dan punishment, jurnalis perempuan secara normatif memiliki hak yang sama dengan jurnalis laki-laki. Eksposure atas isu-isu gender telah mendapat tempat yang signifikan, menjadi isu penting dan dikemas dalam penulisan yang mengacu kepada kode etik jurnalistik, khususnya untuk isu-isu perempuan.

Diakui, kebijakan redaksional yang sensitif gender masih bersifat konvensi, belum tertulis dan dirumuskan secara baku. Demikian pula, kebijakan untuk proteksi jrnalis perempuan peliput peristiwa beresiko, dan pelayanan khusus bagi jurnalis perempuan menyusui bersifat pasif, menunggu permintaan dan tidak diberikan secara permanen dengan asumsi tidak ada kebutuhan rutin.

VI.b. Saran

Terkait dengan temuan penelitian diatas, rekomendasi yang dapat diajukan kepada para pihak terkait adalah sebagai berikut:

1. Kepada pengelola media cetak di Yogyakarta khususnya agar melakukan komunikasi intensif dua arah untuk menelusuri lebih jauh persoalan internal terkait kebijakan redaksional sehingga dapat dibuat kebijakan baru yang lebih adaptif dan responsive terhadap kebutuhan pengarusutamaan gender.
2. Diperlukan pelatihan/workshop untuk membangun kesadaran subyektif dan institusional terhadap diri jurnalis laki-laki dan perempuan yang melibatkan pimpinan media cetak setempat menuju proses internalisasi natural.
3. Kepada asosiasi media seperti Serikat Penerbit Surat Kabar dan Dewan Pers (media cetak) direkomendasikan untuk membuat panduan kebijakan sensitif gender, baik pada aras institusi korporasi yang mengatur relasi kerja maupun pada aras konten berita/informasi, berfokus kepada kode etik praktis yang dapat langsung diacu oleh jurnalis dalam melaksanakan tugas.
4. Kampanye yang simultan dan kajian yang mendalam masih terus diperlukan yang melibatkan stakeholders media massa di Indonesia, karena regenerasi SDM jurnalis yang relative cepat di media lokal dan bertambahnya jumlah institusi media lokal baik cetak maupun elektronik.
5. Khusus kepada jurnalis perempuan, direkomendasikan untuk membentuk forum/wadah yang sekaligus dapat menjadi media alternatif bagi sosialisasi kesetaraan gender dan advokasi kasus-kasus yang mungkin terjadi.

Divisi khusus perempuan yang ada pada asosiasi seperti PWI dan AJI dapat menjadi alternatif organisasi yang mendorong ke arah ini.

Daftar Pustaka

- Barrett, Marianne, *The Glass Ceiling in Television Management: A Comparison of Cable and Broadcasting*, Arizona State University, paper presented at the NCTA Academic Seminar, Atlanta: April 2006
- Donna, Allen, *Six Point Communications Program for Restructuring the World's Communications System on the Basis of Democracy*, Women's Institute for Freedom of the Press, 1974 dalam <http://www.wifp.org>, diakses tanggal 12 September 2010
- Effendi Siregar, Amir. 2008. *Peta Media Massa di Indonesia, Laporan Tahunan 2008* Jakarta: Serikat Penerbit Surat Kabar Pusat
- Handayani, 2006. *Teknik Analisis Gender*, Yogyakarta:
- Ispandriarno, Lukas, *Etika Pers: Problem Ekonomi, Politik, dan Budaya Media Cetak Yogyakarta*, paper disampaikan dalam Lokakarya Etika dan Perlindungan Pers oleh Dewan Pers di Yogyakarta, 28 Juni 2007
- Kementerian Negara Pemberdayaan Perempuan, 2007. *Posisi Perempuan Dalam Media Massa*, dalam www.menegpp.go.id, diakses 20 November 2009
- Lukmantoro, Triyono. 2004. *Menuju Media Massa yang Mencerahkan Perempuan*, www.kompas.com, diakses 20 November 2009
- Masduki, *Regulasi Penyiaran Dari Otoriter ke Liberal*. 2007. Yogyakarta: Penerbit LKiS Yogyakarta
- Masduki, *Gender Issues in The Newsroom*, paper disampaikan dalam Workshop AJI Yogyakarta, 26 November 2009
- Masduki, *Perkembangan Radio Komunitas di Indonesia, 1998-2004*, Laporan Penelitian, Yogyakarta: Combine Resource Institution
- McQuail, Denis. 1987. *Teori Komunikasi Massa, Edisi Kedua, Suatu Pengantar*, Jakarta : Penerbit Erlangga.

- Morna, Collen, 2002. *Promoting Gender Equality In And Through The Media. A Southern African Case Study*, New York: United Nation, Division for the Advancement of Women (DAW)
- Ul-Islam, Md. Mohsin, 1996. *Attitude and Consiousness of Japanese Men and Women Toward Career and Comitment and Continuity : The Role of Expeted Change in HRM Policies*, paper published at The International Journal of Human Resources Management, volume 8
- Masson, D. Robert dan Douglas, 1996, *Teknik Statistika untuk Bisnis dan Ekonomi*, Jakarta: Penerbit Erlangga
- Post, Lori, Wilson, Julia, and Butts, Diane, *Empowering Women through Traditional and Emerging Media*, Friday 8 June 2007
- Putra, Fadillah, 2003. *Partai Politik dan Kebijakan Publik*. Averroes Press Yogyakarta: Penerbit Pustaka Pelajar.
- Sadli, Saparinah, 2004. *Menghapus Diskriminasi Terhadap Perempuan*, Jakarta: Yayasan Obor
- Umar, Husein, 2001. *Riset Sumber Daya Manusia*, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama

Sumber Internet:

- www.wikipedia.com, diakses 12 Agustus 2010
- http://www.bi.go.id/web/id/DIBI/Info_Publik/Ekonomi_Regional/Pr ofil/Yogyakarta/Demografi.htm, diakses 12 Agustus 2010
- <http://www.klipberita.com/klip-news/11398-penduduk-indonesia-lebih-banyak-pria-ketimbang-wanita.html>, diakses 12 Agustus 2010

Bio Data Penulis

Masduki, M.Si, MA, lahir di Banjarmasin, Kalimantan Selatan, sekarang tinggal di Yogyakarta. Menempuh studi S-1 pada jurusan Pend. Agama Islam Fak. Tarbiyah IAIN Sunan Kalijaga selesai tahun 1999, studi S-2 konsentrasi Teori dan Penelitian, Program Pascasarjana Ilmu Komunikasi Universitas Sebelas Maret Surakarta, tamat 2004. Juga melanjutkan studi strata 2 kajian Jurnalistik Departemen Ilmu Komunikasi Universitas Ateneo Manila, Filipina (selesai tahun 2006).

Karir profesional dimulai sebagai reporter, pemandu talkshow dan kepala pemberitaan di Radio Prima Unisi FM Yogyakarta tahun 1996-2001, kemudian menjadi

koresponden Kantor Berita Radio 68H Jakarta (1998-2001), koresponden Radio Suara Jerman (1998) dan sejak tahun 2007 menjadi Direktur Riset dan SDM PT. Radio Prima Unisi FM Yogyakarta. Aktif menjadi trainer dalam pengembangan radio komunitas, radio dan isu gender-AIDS di Jawa Tengah, Jawa Barat, Aceh, NTT, Sulawesi, Kalimantan. Menjadi Ketua Aliansi Jurnalis Independen Yogyakarta periode 2002-2004 dan anggota Dewan Etik Nasional AJI Indonesia periode 2006-2012.

Karir akademik dimulai dari dosen luar biasa mata kuliah radio siaran di Jurusan Ilmu Komunikasi FISIPOL Universitas Atmajaya Yogya tahun 2001, FISIP Universitas Sebelas Maret Surakarta, Akademi Komunikasi Indonesia Yogyakarta dan Multi Media Taining Center (MMTC) Yogyakarta (2001-Sekarang). Juga pernah menjadi dosen dan Koordinator Keahlian Broadcasting Politeknik PPKP Yogyakarta (2002-2004). Anggota dewan penehat nasional

Asosiasi Televisi Komunitas Indonesia dan wakil ketua Pemantau Regulasi dan Regulator Media (PR2MEDIA). Sejak tahun 2004 dosen tetap dan Ketua Program Studi Ilmu Komunikasi Universitas Islam Indonesia Yogyakarta (2004-2010). Sejak Oktober 2010, terpilih sebagai Direktur Program dan Produksi LPP Radio Republik Indonesia (RRI), periode 2010-2015.

Beberapa buku yang ditulis antara lain berjudul "Jurnalistik Radio, Menata Profesionalisme Reporter dan Penyiar" (LKIS Yogyakarta, 2001), "Radio Siaran dan Demokratisasi" (Jendela Yogyakarta, 2003), "Kebebasan Pers dan Kode Etik Jurnalistik" (UII Press Yogyakarta, 2004), "Radioku, Radiomu, Radio Kita" (CRI, Yogyakarta, 2004), "Radio Komunitas, Belajar dari Lapangan" (The World Bank, Jakarta, 2007), "Sistem Penyiaran, Dari Otoriter ke Liberal" (LKIS Yogyakarta 2007). Aktif melakukan riset, workshop dan presentasi ilmiah di forum nasional dan internasional untuk isu kebebasan informasi, kebebasan pers dan demokratisasi.

Ninik Sri Rahayu, SE, MM, lahir di Boyolali Jawa Tengah, saat ini tinggal di Yogyakarta. Menempuh studi S-1 Ilmu Ekonomi dan S-2 Manajemen di Fak. Ekonomi, Universitas Islam Indonesia Yogyakarta. Sejak tahun 2004 menjadi dosen FE UII Diploma III dan aktif melakukan berbagai advokasi, publikasi dan riset bertema Gender dan Perempuan. Sejak tahun 2010 terpilih sebagai Ketua Pusat Studi Gender (PSG), Universitas Islam Indonesia. Aktif mengikuti workshop, seminar dan internasional forum for women di beberapa negara Asia

B.2



**PELAKSANAAN PENGARUSUTAMAAN GENDER
DI KABUPATEN BANTUL
TAHUN 2009**



KESETARAAN DAN KEADILAN GENDER

**Abdul Rahman
Mila Karmila Adi
Ninik Sri Rahayu**

**PEMERINTAH KABUPATEN BANTUL
BADAN KESEJAHTERAAN KELUARGA PEMBERDAYAAN PERUMPAHAAN
DAN KELUARGA BERENCANA
Jl. Dr. Wahidin Sudirohusodo 76 Bantul, Tlp. (0274) 367331 Fax (0274) 367332**

Perpustakaan Nasional: Katalog Dalam Terbitan (KDT)

@ Abdul Rahman, dkk 2010

Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender

Penulis:

Abdul Rahman, Mila Karmila Adi, Ninik Sri Rahayu

Editor :

Abdul Rahman

Tata Letak & Rancang Sampul:

SMARTANIA PUBLISHING

Penerbit:

Badan Kesejahteraan Keluarga Pemberdayaan Perempuan dan
Keluarga Berencana Kabupaten Bantul

Cetakan I, September 2010

viii + 98; 14,5 x 21 cm

ISBN: 978-602-96730-2-9

Pengantar

Puji Syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT, yang telah melimpahkan rahmat-Nya, sehingga buku "Pengarusutamaan Gender di Kabupaten Bantul tahun 2009" ini dapat diterbitkan. Hal ini atas hasil kerja sama Badan Kesejahteraan Keluarga Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana Kabupaten Bantul (BKKPP dan KB) Kabupaten Bantul dengan Pusat Studi Gender Universitas Islam Indonesia (PSG UII) Yogyakarta.

Buku Laporan ini berisi hasil evaluasi program kegiatan responsife Gender yang telah dilakukan oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) sebagai Komitmen sekaligus Implementasi Pengarusutamaan Gender di Kabupaten Bantul Tahun Anggaran 2009.

Sumber dana berasal dari Laporan masing-masing Dinas Instansi terkait yang tergabung dalam Tim Pemberdayaan Perempuan, Gender dan Anak dengan SK Bupati Nomor 193 Tahun 2009.

Kami Tim dari PSG UII Yogyakarta dan Tim PP Gender dan Anak Kabupaten Bantul, sangat menyadari bahwa dari segi kualitas, ragam data dan laporan yang disajikan masih banyak kekurangan. Untuk itu saran dan masukan yang membangun guna penyempurnaan laporan ini, sangat kami harapkan.

Demikian atas bantuan dan kerjasamanya dari berbagai pihak, kami ucapkan banyak terima kasih dan semoga bermanfaat.

Bantul, 25 Agustus 2010
Pemerintah Kabupaten Bantul
Kepala BKK, PP dan KB Kabupaten Bantul

ttd

Drs. Djoko Sulasno Nimpuno.
NIP. 19560910 198103 1006

DAFTAR ISI

Pengantar	iii
Daftar Isi	iv
Daftar Tabel	vi
Daftar Lampiran	vii
BAB I Pendahuluan	1
1. Latar Belakang	1
2. Konsep dan Pengertian Gender	2
3. Pengarusutamaan Gender (PUG)	3
4. Anggaran Responsil-Gender (ARG)	4
5. Program Responsif Gender	5
BAB II Metode Evaluasi	7
1. Decision making (Pengambilan keputusan)	7
2. Rights (hak-hak)	8
3. Development Resources and Benefits (Pengembangan sumber daya dan manfaat)	8
BAB III Evaluasi Program Responsif Gender pada Tiap SKPD	15
1. SKPD Dinas Pendidikan Dasar (Dikdas)	15
1.1 Hasil Evaluasi	16
1.2 Rekomendasi	17
2. SKPD Kantor Pemberdayaan Masyarakat Desa (KPMDD)	18
2.1 Hasil Evaluasi	18
2.2 Rekomendasi	19
3. SKPD Kantor Perpustakaan Umum (KPU)	20
3.1 Hasil Evaluasi	20
3.2 Rekomendasi	21
4. SKPD Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP)	22
4.1 Hasil Evaluasi	22
4.2 Rekomendasi	24
5. SKPD Badan Koordinasi Kesejahteraan Keluarga Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana (BKK.PPKB)	25
5.1 Hasil Evaluasi	26
5.2 Rekomendasi	28

6.	SKPD kelautan dan Perikanan	28
6.1	Hasil Evaluasi	29
6.2	Rekomendasi	31
7.	SKPD Pertanian dan Kehutanan	32
7.1	Hasil Evaluasi	32
7.2	Rekomendasi	34
8.	SKPD Kesatuan Bangsa, Politik, dan Perlindungan Masyarakat (Kesbangpollinmas)	36
8.1	Hasil Evaluasi	36
8.2	Rekomendasi	37
9.	SKPD Badan Kepegawaian Daerah (BKD)	38
9.1	Hasil Evaluasi	38
9.2	Rekomendasi	39
10.	SKPD Dinas Sosial (Dinsos)	40
10.1	Hasil Evaluasi	40
10.2	Rekomendasi	41
11.	SKPD Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi (Disperindagkop)	42
11.1	Hasil Evaluasi	43
11.2	Rekomendasi	43
12.	SKPD Dinas Pekerjaan Umum (DPU)	44
12.1	Hasil Evaluasi	44
12.2	Rekomendasi	44
13.	SKPD Tenaga Kerja dan Transmigrasi	45
13.1	Hasil Evaluasi	45
13.2	Rekomendasi	46
BAB IV Penutup		49
1	Kesimpulan	49
2	Rekomendasi Umum	49
3	Keterbatasan Evaluasi	53
Daftar Pustaka		55
Lampiran		
	Hasil Evaluasi Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Kabupaten Bantul Tahun 2009	56

Daftar Tabel

- Tabel 2.1 Skema Evaluasi
- Tabel 2.2 Skala Penilaian Signifikansi Hasil Program Responsif Gender

Daftar Lampiran

- Lampiran 1 Skema Evaluasi SKPD Dinas Pendidikan Dasar (Dikdas)
- Lampiran 2 Skema Evaluasi SKPD Kantor Pemberdayaan Masyarakat Desa (KPMD)
- Lampiran 3 Skema Evaluasi SKPD Kantor Perpustakaan Umum (KPU)
- Lampiran 4 Skema Evaluasi SKPD Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP)
- Lampiran 5 Skema Evaluasi SKPD Badan Koordinasi Kesejahteraan Keluarga Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana (BKKPPKB)
- Lampiran 6 Skema Evaluasi SKPD Kelautan dan Perikanan
- Lampiran 7 Skema Evaluasi SKPD Pertanian dan Kehutanan
- Lampiran 8 Skema Evaluasi SKPD Kesatuan Bangsa, Politik, dan Perlindungan Masyarakat (Kesbangpollinmas)
- Lampiran 9 Skema Evaluasi SKPD Badan Kepegawaian Daerah (BKD)
- Lampiran 10 Skema Evaluasi SKPD Dinas Sosial (Dinsos)
- Lampiran 11 Skema Evaluasi SKPD Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi (Disperindagkop)
- Lampiran 12 Skema Evaluasi SKPD Dinas Pekerjaan Umum (DPU)
- Lampiran 13 Skema Evaluasi SKPD Tenaga Kerja dan Transmigrasi

asar

yaan

num

Praja

nasi

ouan

dan

erah

rian,

PU)

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50

BAB I PENDAHULUAN

1. Latar Belakang

Pada prinsipnya pembangunan harus memberikan keadilan dan kemakmuran bagi semua lapisan masyarakat, baik itu laki-laki maupun perempuan, kaya maupun miskin. Namun, tidak dapat dipungkiri bahwa dalam realitasnya pembangunan belum sepenuhnya mampu menghadirkan keadilan dan kemakmuran tersebut. Indikatornya jelas, yakni masih adanya kesenjangan sosial yang tajam antara masyarakat miskin dan masyarakat kaya, antara perempuan dan laki-laki, antara kelompok berkuasa dan kelompok masyarakat biasa. Lebih lanjut, tingginya angka kemiskinan di Indonesia juga menjadi bukti kuat bahwa hasil pembangunan belum terdistribusi secara adil dan memarjinalkan kepentingan perempuan. Perempuan adalah kelompok yang paling dekat dengan kemiskinan, sehingga membicarakan kemiskinan sesungguhnya membicarakan perempuan. Minimnya akses, kontrol dan partisipasi perempuan pada kegiatan-kegiatan produktif berimplikasi terhadap rendahnya manfaat dan dampak pembangunan yang bisa mereka nikmati.

Idealnya, proses pelaksanaan pembangunan seharusnya merangkul partisipasi seluruh masyarakat baik laki-laki maupun perempuan untuk terlibat dan memberikan kontribusi secara maksimal. Namun, kebutuhan-kebutuhan spesifik perempuan kerap kali tidak masuk dalam perencanaan dan pengambilan keputusan dikarenakan minimnya keikutsertaan perempuan yang masih dianggap sebagai objek pembangunan bukan pelaku pembangunan.

Masyarakat dan pemerintah belum sepenuhnya menyadari bahwa ketimpangan relasi gender berbasis kekuasaan masih berlangsung. Hal ini berdampak pada semakin kecilnya peran dan fungsi perempuan dalam pelaksanaan pembangunan sehingga kualitas hidup perempuan tidak menjadi lebih baik.

Ketimpangan relasi gender ini menjadi salah satu alasan kuat pemerintah untuk mendorong pengarusutamaan gender

dalam berbagai program pembangunan sebagai strategi mencapai kesetaraan dan keadilan gender.

Komitmen pemerintah untuk melaksanakan pengarusutamaan gender tertuang dalam Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender dan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 132 Tahun 2003 tentang Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan Daerah. Kedua peraturan tersebut menegaskan pentingnya integrasi pengalaman, aspirasi, kebutuhan, dan permasalahan perempuan dan laki-laki ke dalam perencanaan dan penganggaran pembangunan.

2. Konsep dan Pengertian Gender

Istilah gender sering diartikan sebagai jenis kelamin (*sex*). Kedua istilah ini memang mengacu pada perbedaan jenis kelamin, tetapi istilah *sex* terkait pada komponen biologis. Artinya, masing-masing jenis kelamin (laki-laki dan perempuan) secara biologis berbeda. Perempuan dan laki-laki mempunyai kelebihan dan keterbatasan tertentu berdasarkan fakta biologis yang ada pada diri masing-masing.

Perbedaan biologis merupakan kodrat yang tidak bisa dipertukarkan. Sebaliknya, gender merupakan hasil konstruksi secara sosial budaya yang terdiri dari sifat, sikap, dan perilaku seseorang yang dia pelajari, sehingga gender kerap disebut sebagai kodrat budaya. Sifat-sifat feminin bagi perempuan dan maskulin bagi laki-laki ditentukan oleh lingkungan budayanya, melalui apa yang diajarkan orang tua, guru ataupun tokoh masyarakat dimana seseorang tersebut tinggal. Artinya, gender seseorang diperoleh melalui suatu proses panjang sebagai hasil belajar seseorang sejak masih anak-anak. Akibatnya, gender juga merupakan hasil interaksi faktor internal dan eksternal (apa yang dia pelajari dari lingkungan termasuk harapan-harapan lingkungan karena dia berjenis kelamin laki-laki atau perempuan). Gender seseorang yang berupa sifat dan perilaku khususnya sebagai perempuan dan laki-laki masih diperkuat dengan mitos, stereotip, dan pembagian kerja secara seksual yang berlaku bagi masing-masing jenis kelamin.

3. Pengarusutamaan Gender (PUG)

Istilah Pengarusutamaan Gender (*gender mainstreaming*) berdasarkan Inpres RI No. 9 Tahun 2000 adalah strategi yang dibangun untuk mengintegrasikan gender menjadi satu dimensi integral dari perencanaan, penyusunan, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi atas kebijakan dan program pembangunan nasional. PUG ditujukan untuk mencapai kesetaraan dan keadilan gender yang merupakan upaya untuk menegakkan hak-hak perempuan dan laki-laki atas kesempatan, pengakuan, dan penghargaan yang sama di masyarakat.

Kesetaraan dan keadilan gender perlu ditegakkan, sebab perempuan lebih banyak dirugikan dengan adanya perbedaan dan pembakuan peran gender dalam masyarakat. Sesungguhnya perbedaan gender tidak menjadi masalah apabila tidak melahirkan ketidakadilan. Namun, dalam praktiknya, ketimpangan gender mengakibatkan salah satu jenis gender lebih buruk keadaan dan kedudukannya dari jenis gender yang lain.

Ketimpangan gender yang merugikan perempuan, baik langsung atau pun tidak langsung, adalah kerugian bagi masyarakat secara keseluruhan. Ketertinggalan perempuan mengakibatkan mereka tidak dapat berperan dan menjadi mitra sejajar laki-laki sehingga hubungan kedua pihak menjadi timpang. Strategi pembangunan yang dinamakan strategi pengarusutamaan gender ditujukan untuk mengatasi persoalan ini. Dengan melakukan strategi pengarusutamaan gender diharapkan kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan akan responsif gender, karena telah mengakomodasi pemenuhan kebutuhan yang berbeda antarkelompok masyarakat dan antara laki-laki dan perempuan. Secara yuridis, pelaksanaan pengarusutamaan gender berdasarkan pada ketentuan perundangan sebagai berikut:

1. UU Nomor 7 Tahun 1984 tentang Ratifikasi CEDAW.
2. UU Nomor 39 Tahun 1999 tentang HAM.
3. UU Nomor 23 Tahun 2004 tentang PKDRT.
4. UU Nomor 11 Tahun 2005 tentang Ratifikasi Kovenan Internasional mengenai Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya.

5. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2005 tentang RPJMN 2004-2009.
6. Inpres Nomor 9 Tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan Nasional.
7. Kepmendagri Nomor 132/2003 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan PUG dalam Pembangunan Daerah.

4. Anggaran Responsif Gender (ARG)

Kebijakan yang telah memiliki sensitifitas gender harus diimbangi dengan anggaran yang memenuhi kebutuhan laki-laki dan perempuan. Dari anggaranlah akan dapat diketahui secara detail pengalokasian dana tertentu bagi kelompok-kelompok terpinggirkan, minoritas, dan kelompok yang selama ini tidak diperhatikan dalam proses pembangunan. Hal-hal yang perlu diperhatikan dalam penyusunan ARG adalah:

1. ARG merupakan penyusunan anggaran guna menjawab secara adil kebutuhan setiap warga negara dari berbagai kelompok yang berbeda, baik laki-laki maupun perempuan (keadilan dan kesetaraan gender);
2. Bukan fokus pada penyediaan anggaran dengan jumlah tertentu untuk pengarusutamaan gender, tapi lebih luas lagi, bagaimana anggaran keseluruhan dapat memberikan manfaat yang adil untuk laki-laki dan perempuan. Prinsip tersebut mempunyai arti:
 - a. ARG bukanlah anggaran yang terpisah untuk laki-laki dan perempuan;
 - b. ARG sebagai pola anggaran yang akan menjembatani kesenjangan status, peran dan tanggungjawab laki-laki, perempuan serta kelompok lain;
 - c. ARG bukanlah dasar yang "valid" untuk meminta tambahan alokasi anggaran;
 - d. Adanya ARG tidak berarti adanya penambahan dana yang dikhususkan untuk program perempuan;
 - e. Bukan berarti bahwa alokasi ARG berada dalam program khusus pemberdayaan perempuan;
 - f. ARG bukan berarti ada alokasi dana 50% laki-laki - 50% perempuan untuk setiap kegiatan;

- g. Tidak harus semua program dan kegiatan perlu mendapat koreksi agar menjadi responsif gender.

5. Program Responsif Gender

Program responsif gender adalah program yang bertujuan untuk memenuhi kebutuhan praktis dan strategis gender. Kebutuhan praktis gender merujuk khusus pada kebutuhan dasar, misalnya penyediaan air, perawatan kesehatan, penyediaan pendapatan keluarga, perumahan dan pelayanan dasar, dan penyediaan makanan untuk keluarga. Kebutuhan dasar sesungguhnya diperlukan oleh perempuan dan laki-laki, akan tetapi, karena perempuan sering ditempatkan pada posisi untuk merawat keluarga, mereka akan lebih diuntungkan ketika kebutuhan dasarnya terpenuhi. Oleh karena itu, kebutuhan dasar tersebut adalah kebutuhan praktis perempuan.

Kebutuhan strategis gender adalah merujuk pada kebutuhan-kebutuhan yang apabila terpenuhi, berpotensi untuk mengubah relasi gender. Pemenuhan kebutuhan jenis ini amat penting bagi suatu perubahan yang berarti menuju kesetaraan gender. Yang termasuk dalam kebutuhan strategis gender adalah pengurangan beban pekerjaan rumah tangga dan perawatan anak, penghapusan bentuk-bentuk diskriminasi seperti hak untuk memiliki tanah atau harta benda lainnya, akses terhadap kredit dan sumber-sumber daya lainnya, kebebasan memilih untuk pengasuhan anak dan kebijakan khusus untuk melawan kekerasan dan kontrol terhadap perempuan.

BAB II METODE EVALUASI

Metode evaluasi yang dilakukan dalam penelitian ini didasarkan pada dokumen-dokumen program/kegiatan Satuan Kerja Pemerintah Daerah (SKPD) Kabupaten Bantul (*document based analysis*)^{1,2,3}. Sedangkan, pendekatan yang digunakan adalah dengan mengadopsi kerangka analisis yang dikembangkan oleh *Canadian International Development Agency* (CIDA), yakni "CIDA's Policy on Gender Equality"⁴ yang menggunakan tiga indikator utama untuk mengukur program responsif gender, yaitu: a) *Decision making* (pengambilan keputusan); b) *Rights* (hak-hak); c) *Development resources and benefits* (pengembangan sumber daya dan manfaat).

1. Decision making (pengambilan keputusan)

Tercapainya kesetaraan antara laki-laki dan perempuan dalam proses pengambilan keputusan pembangunan yang berkelanjutan dalam masyarakat. Indikator yang digunakan adalah :

- a. Kapasitas untuk partisipasi publik. Peningkatan kapasitas perempuan dan organisasi perempuan untuk melakukan advokasi dan untuk terlibat dalam kehidupan publik dan pengambilan keputusan.

¹ Patton, Michael Quinn. *Metode Evaluasi Kualitatif*. Penerjemah: Budi Puspo Priyadi. Cetakan 2. Pustaka Pelajar. Yogyakarta. 2009,

² Tashakkori, Abbas & Teddlie, Charles. *Mixed Methodology. Mengombinasikan Pendekatan Kualitatif dan Kuantitatif*.

Penerjemah: Budi Puspo Priadi. Cetakan 1. Pustaka Pelajar. Yogyakarta. 2010

³ Creswell, John W. & Clark, Vicky L. Plano. *Designing and Conducting Mixed Methods Research*. Sage Publications. US. 2007

⁴ *CIDA's Framework for Assessing Gender Equity Results*. Canadian International Development Agency. Canada. 2005

- b. Representasi dalam pengambil keputusan. Peningkatan representasi perempuan dalam proses demokrasi dan dalam pengambilan keputusan organisasi, sektor sasaran, dan mitra komunitas.
- c. Pengambilan keputusan rumah tangga dan individual. Lebih setaranya hubungan laki-laki dan perempuan dalam level rumah tangga, peningkatan kapasitas perempuan dalam pengambilan keputusan individual.

2. Rights (hak-hak)

Meningkatnya hak-hak yang dinikmati oleh perempuan dan anak perempuan serta tidak adanya diskriminasi. Ukurannya adalah sebagai berikut:

- a. Sistem hukum. Penguatan promosi dan proteksi hak asasi perempuan dan anak perempuan dalam sistem hukum.
- b. Kesadaran publik. Peningkatan pengetahuan dan penerimaan masyarakat mengenai hak asasi perempuan dan anak perempuan.
- c. Respon terhadap pelanggaran hak khusus gender. Peningkatan layanan dan mekanisme yang merespon isu gender seperti pelanggaran hak laki-laki dan perempuan, perdagangan manusia, dan kekerasan seksual.

3. Development resources and benefits (pengembangan sumber daya dan manfaat)

Laki-laki dan perempuan mendapatkan akses dan kontrol yang setara terhadap sumber daya dan manfaat pembangunan. Hal ini diukur dari beberapa hal yakni:

- a. Aset produksi dan kehidupan. Peningkatan kontrol perempuan terhadap aset produktif (lahan, modal/kredit, teknologi, keahlian) dan peningkatan akses terhadap pekerjaan
- b. Kapasitas institusional. Peningkatan kapasitas organisasi mitra untuk merencanakan dan mengimplementasikan kebijakan, program, dan proyek

- yang mencerminkan prioritas dan kepentingan perempuan dan laki-laki.
- c. Perubahan kebijakan. Adopsi kebijakan-kebijakan yang mendukung kesetaraan gender oleh institusi yang mengelola sumber dan manfaat.
 - d. Kelayakan dan kebutuhan dasar. Akses perempuan terhadap layanan dasar dan layak yang mendukung kebaikan dan kualitas hidup.

Secara lebih detail, skema evaluasi program responsif gender di gambarkan dalam tabel 2.1 berikut ini:

Tabel 2.1
Skema Evaluasi

Hasil kesetaraan gender	Pertanyaan			
Indikator	Elemen hasil	Hasil dalam area yang ditentukan? Jika ada, apa hasil yang dicapai?	Bukti dari hasil capaian? (Kualitatif dan/atau kuantitatif)	Signifika hasil
PEMBUATAN KEPUTUSAN. <i>Lebih setaranya partisipasi perempuan dengan laki-laki sebagai pengambil keputusan dalam pembentukan pembangunan berkelanjutan dalam masyarakatnya</i>	Kapasitas untuk partisipasi publik. <i>Peningkatan kapasitas perempuan dan organisasi perempuan untuk advokasi dan untuk keterlibatan dalam kehidupan publik dan pengambilan keputusan</i>			
	Representasi dalam pengambil			

	<p>keputusan. Peningkatan representasi perempuan dalam proses demokrasi dan dalam pengambilan keputusan organisasi, sektor sasaran, dan mitra komunitas.</p>			
	<p>Pengambilan keputusan rumah tangga dan individual. Lebih setaranya hubungan laki-laki dan perempuan dalam level rumah tangga, peningkatan kapasitas perempuan dalam pengambilan keputusan individual</p>			
<p>HAK-HAK. Perempuan dan anak perempuan lebih mampu untuk menyatakan hak asasinya.</p>	<p>Sistem hukum. Penguatan promosi dan proteksi hak asasi perempuan dan anak perempuan dalam hukum dan tindakan polisi, pendakwa, hakim, dan pengadilan.</p>			
	<p>Kesadaran publik. Peningkatan pengetahuan dan penerimaan publik umum (laki-laki dan perempuan) dan pengambil keputusan tentang hak asasi perempuan dan anak</p>			

	<p>perempuan.</p> <p>Respon terhadap pelanggaran hak khusus gender. <i>Peningkatan layanan dan mekanisme yang merespon hambatan spesifik isu gender seperti pelanggaran hak laki-laki dan perempuan, perdagangan manusia, kekerasan seksual.</i></p>			
<p>PENGEMBANGAN SUMBER DAYA DAN MANFAAT. <i>Pengurangan ketidaksetaraan laki-laki dan perempuan dalam akses dan kontrol terhadap sumber daya dan manfaat pembangunan</i></p>	<p>Aset produksi dan kehidupan. <i>Peningkatan kontrol perempuan terhadap aset produksi (lahan, modal/kredit, teknologi, keahlian) dan peningkatan akses terhadap tingkat pekerja.</i></p>			
	<p>Kapasitas institusional. <i>Peningkatan kapasitas pada organisasi mitra untuk merencanakan dan mengimplementasikan kebijakan, program, dan proyek yang mencerminkan prioritas dan kepentingan perempuan dan laki-laki.</i></p>			

	Perubahan kebijakan. <i>Adopsi kebijakan-kebijakan yang mendukung kesetaraan gender oleh institusi yang mengelola sumber dan manfaat.</i>			
	Kelayakan dan kebutuhan dasar. <i>Akses perempuan terhadap layanan dasar dan layak yang mendukung kebaikan dan kualitas hidup.</i>			

Teknik evaluasi program responsif gender dilakukan dengan cara menilai program atau kegiatan yang dilakukan oleh SKPD selanjutnya dimasukkan ke dalam kolom-kolom yang sesuai dengan kategori masing-masing indikator. Selanjutnya, berdasarkan isian dalam kolom-kolom akan dievaluasi "apakah program responsif gender yang telah dilakukan masuk dalam kriteria signifikan, menjanjikan, rata-rata, atau lemah" seperti terangkum dalam tabel 2.2 berikut ini :

Tabel 2.2
Skala Penilaian Signifikansi Hasil Program Responsif Gender

Skala Penilaian Signifikansi Hasil Kesetaraan Gender	Penjelasan
SIGNIFIKAN	Memenuhi SEMUA kriteria berikut: <ul style="list-style-type: none"> • Hasil kesetaraan gender relevan dengan target utama pembangunan;

	<ul style="list-style-type: none"> • Terdapat bukti yang cukup untuk semua hasil tersebut (kualitatif dan/atau kuantitatif, indikator yang menunjukkan adanya perubahan); • Pencapaian/target kesetaraan gender signifikan.
MENJANJIKAN	<p>Memenuhi kriteria berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Hasil kesetaraan gender relevan dengan target utama pembangunan; <p>dan memenuhi SATU kriteria lain dalam skala SIGNIFIKAN</p> <ol style="list-style-type: none"> b. Terdapat bukti yang cukup untuk semua hasil tersebut (kualitatif dan/atau kuantitatif, indikator yang menunjukkan adanya perubahan); c. Pencapaian/target kesetaraan gender signifikan (terdapat pencapaian kesetaraan gender yang relevan tetapi lemah pembuktian).
RATA-RATA	<p>Memenuhi kriteria berikut:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Hasil kesetaraan gender relevan dengan target utama pembangunan; <p>TETAPI TIDAK memenuhi kriteria lain dalam skala SIGNIFIKAN, sehingga:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Hanya terdapat sebagian bukti yang sepenuhnya mendukung hasil tersebut (kualitatif dan/atau kuantitatif, indikator yang menunjukkan adanya perubahan); • Pencapaian/target terbatas (terdapat pencapaian kesetaraan gender yang relevan tapi tidak terdapat pembuktian yang signifikan);
LEMAH	<p>ATAU:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Hasil kesetaraan gender dapat diidentifikasi tetapi bukti hasil pencapaian tidak ada, mengada-ada, atau lemah. • Hasil kesetaraan gender dapat diidentifikasi tetapi tidak sesuai dengan tujuan utama pembangunan; • Pencapaian/jangkauan sangat terbatas.

ua
cau
kan
der

gan
ala

ua
cau
kan
der
ian
api

gan
am

ng
out
tor
);
bat
ng
an

bat
sil
da,

bat
an

.

BAB III

EVALUASI PROGRAM RESPONSIF GENDER PADA SATUAN KERJA PEMERINTAH DAERAH (SKPD) PEMERINTAH KABUPATEN BANTUL

Bagian ini akan memaparkan hasil analisis, interpretasi, dan rekomendasi terhadap setiap SKPD yang telah mengirimkan lembar evaluasi program kegiatan SKPD responsif gender dan pemberdayaan perempuan tahun 2009 (*Lih. Lampiran*).

Dari 16 SKPD yang mengirimkan lembar tersebut, 13 SKPD menyebutkan sejumlah program/kegiatan responsif gender dan 3 SKPD tidak mengisi. Bagian ini juga memberikan gambaran singkat tentang profil setiap SKPD merujuk pada website formal yang dapat diakses oleh evaluator.

1. SKPD Dinas Pendidikan Dasar (Dikdas)

SKPD Dinas Dikdas didirikan berdasarkan peraturan No. 16 Tahun 2007 tentang Pembentukan dan Organisasi Dinas Pendidikan Dasar Kabupaten Bantul. SKPD ini merupakan unsur pelaksana Pemerintah Daerah di bidang Pendidikan yang dipimpin oleh Kepala Dinas dan berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah. Tugas pokok dari SKPD ini adalah melaksanakan urusan rumah tangga Pemerintah daerah dan tugas pembantuan di bidang pendidikan.



1.1. Hasil Evaluasi

SKPD dinas Dikdas telah melakukan dua hal yang dilaporkan sebagai kegiatan responsif gender, yaitu seleksi guru, kepala sekolah, dan pengawas sekolah, tetapi kegiatan ini pun tidak dilengkapi dengan bukti pencapaian keberhasilan baik secara kuantitatif maupun kualitatif. Berdasarkan data yang dimiliki oleh Dinas Pendidikan Provinsi DIY 2008 diketahui bahwa perbandingan guru laki-laki dan perempuan untuk jenjang SD adalah 1828:3311 atau nyaris 1:2 dan SMP adalah 1488:1669 atau pada kisaran 1:1. Sementara itu, perbandingan kepala sekolah laki-laki dan perempuan jenjang SD adalah 212:135 atau mendekati 2:1 dan SMP adalah 63:22 atau 3:1. Berdasarkan angka tersebut, SKPD Dinas Dikdas perlu memperhatikan kecenderungan bahwa partisipasi laki-laki di sektor pendidikan sebagai pendidik lebih besar dibandingkan perempuan.

Pendidikan dasar merupakan isu krusial dalam pencapaian tujuan pembangunan milenium. Data Pokok Pendidikan Tahun Ajaran 2009/2010 menyebutkan bahwa anak yang mengikuti pendidikan SD/ sederajat mencapai 73382 dan SLTP/ sederajat adalah 35021. Perbandingan laki-laki dan perempuan untuk SD/ sederajat adalah 38228:35154 atau mendekati 1:1 dan untuk SLTP/ sederajat adalah 17670:17351 atau juga mendekati 1:1. Secara singkat dapat dikatakan bahwa partisipasi anak laki-laki dan perempuan di pendidikan dasar adalah relatif sama. Meski demikian, diketahui bahwa jumlah angka anak yang tidak melanjutkan ke SMP/ sederajat mencapai 38.361 atau hampir separuh jumlah anak yang duduk di bangku SD. Sementara itu, angka putus sekolah adalah 88 untuk SMP/ sederajat dan 36 untuk SD/ sederajat. Terkait dengan angka ini, belum ada data terpilah yang dimiliki oleh SKPD Dikdas tetapi merujuk data yang dimiliki UNICEF untuk angka putus sekolah pada tahun 2007 di Indonesia mencapai 1138000 untuk perempuan dan 363000 untuk laki-laki dengan rentang usia sekolah 7-12 tahun.

Kegiatan lain yang dilakukan oleh Dinas Dikdas adalah pendampingan sekolah dalam penerapan kurikulum pembelajaran berbasis hak-hak anak dan kearifan lokal.

Sayangnya, kegiatan ini pun tidak dilengkapi bukti dari capaian keberhasilannya. Meski demikian, ini adalah langkah positif yang perlu dilanjutkan sebagai salah satu cara pengarusutamaan hak-hak anak. Sekolah dengan kurikulum berbasis hak-hak anak dan kearifan lokal menjadi krusial di saat ada kecenderungan feminisasi pendidikan di Indonesia yang memberikan *stereotype* bahwa jurusan atau bidang ilmu tertentu hanya cocok untuk salah satu jenis kelamin tertentu.

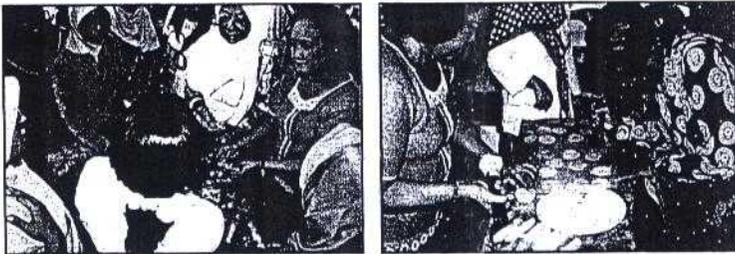
1.2. Rekomendasi

Berdasarkan hasil evaluasi, rekomendasi khusus yang dapat diberikan adalah:

- a) Untuk rekrutmen tenaga pendidikan berikutnya, Dinas Dikdas perlu memperhatikan kesetaraan rasio antara laki-laki dan perempuan. Ini perlu dilakukan dengan memperhatikan kecenderungan tren dalam ketersediaan sumber daya manusia dalam pendidikan yang telah dimiliki menunjukkan rasio laki-laki lebih besar dibandingkan perempuan.
- b) Dinas Dikdas perlu memperhatikan secara khusus jumlah angka anak yang tidak melanjutkan ke SMP dan melengkapinya dengan data terpilah guna mendapatkan strategi penanganan yang tepat. Selain itu, masalah pendidikan di Indonesia bukan hanya angka partisipasi tetapi juga angka putus sekolah yang perlu diwaspadai terutama pada kelompok sekolah menengah pertama.
- c) Pendampingan penerapan kurikulum berbasis hak-hak anak dan kearifan lokal perlu dilanjutkan dengan monitoring implementasi bukan hanya di lingkungan sekolah tetapi perubahan apa yang berpotensi muncul di lingkungan tempat tinggal peserta didik.

2. Pemberdayaan Masyarakat Desa (KPMD)

KPMD dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 110 Tahun 2001 SKPD ini memiliki kedudukan sebagai unsur penunjang Pemerintah Daerah di bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa. Kantor Pemberdayaan Masyarakat Desa dipimpin oleh seorang Kepala Kantor yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah. Tugas Pokok KPMD adalah melaksanakan kewenangan Pemerintah Daerah di bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa.



2.1. Hasil Evaluasi

SKPD KPMD telah melakukan kegiatan peningkatan kesejahteraan masyarakat yang ditujukan untuk keluarga miskin/ Peningkatan Peranan Wanita Menuju Keluarga Sehat Sejahtera (P2WKSS). Hasil yang disebutkan dalam kegiatan ini adalah berkurangnya jumlah keluarga miskin di Bantul dan tidak ada bukti kualitatif maupun kuantitatif yang terukur untuk membuktikan keberhasilan tersebut.

Kemiskinan seringkali dianggap sebagai *entry point* dari masalah sosial yang ada dan angkanya dari tahun ke tahun diusahakan untuk menurun. Jumlah penduduk miskin pada Maret 2009 sebanyak 32,53 juta orang (14,15%). Dibanding dengan penduduk miskin pada Maret 2008 yang berjumlah 34,96 juta (15,42%), berarti jumlah penduduk miskin turun sebanyak 2,43 juta. Jumlah penduduk miskin di daerah perdesaan turun lebih tajam dari pada daerah perkotaan. Selama

periode Maret 2008-Maret 2009, penduduk miskin di daerah pedesaan berkurang 1,57 juta, sementara di daerah perkotaan berkurang 0,86 juta orang.⁵ Berdasarkan indeks kemiskinan 2009 untuk provinsi Yogyakarta, sebanyak 14.25% penduduk kota dan 22.60% penduduk desa adalah miskin. Angka ini di atas indeks kemiskinan Indonesia di tahun yang sama dimana 10.72% penduduk kota dan 17.35% penduduk desa adalah miskin. Meski demikian, dibandingkan dengan angka kemiskinan pada tahun 2008 jumlah penduduk miskin kota tahun 2009 turun sebanyak 0.74% dan penduduk miskin desa pada tahun yang sama menurun sebesar 1.68%. Kesimpulannya, meski terjadi penurunan, kantong kemiskinan berada di wilayah pedesaan masih perlu mendapatkan perhatian ekstra.

2.2. Rekomendasi

Berdasarkan hasil evaluasi rekomendasi khusus yang dapat diberikan adalah:

- a) KPMD telah memiliki kegiatan yang menysasar khusus untuk perempuan dan kegiatan ini perlu dievaluasi sejauh apakah berdampak pada akses perempuan terhadap kelayakan hidup dengan indikator yang terukur.
- b) KPMD berpotensi untuk menyelenggarakan program/kegiatan yang berdampak mengurangi angka kemiskinan dengan mengutamakan kesetaraan perempuan dan laki-laki. Artinya, bukan hanya kegiatan yang dikhususkan untuk perempuan sebagaimana yang telah dilakukan tetapi juga terdapat kegiatan lain yang memiliki dampak pada keberlangsungan kesetaraan perempuan dan laki-laki dalam kelayakan hak hidup dasar. Misalnya, KPMD telah memberikan sosialisasi tentang air bersih. Kegiatan ini akan disebut responsif gender jika sosialisasi ini bukan hanya secara kuantitatif melibatkan semua peran gender tetapi juga menyusun

⁵ Data Susesnas BPS Juni 2010.

rencana kegiatan/program yang mengarah keberlanjutan pada kesetaraan dalam akses dan kontrol atas air baik untuk perempuan atau pun laki-laki.

- c) Mempertimbangkan kemiskinan sebagai pintu masuk masalah sosial lainnya, KPMD dalam penyusunan program,/kegiatan dapat berkolaborasi dengan pemangku kepentingan lain dan meningkatkan monitoring dan evaluasi berperspektif gender untuk menuju pembangunan berkelanjutan.

3. SKPD Kantor Perpustakaan Umum (KPU)

KPU dibentuk berdasarkan Perda Kab Bantul No. 35 tahun 2000 tentang Pembentukan dan Organisasi Kantor Perpustakaan Umum Kabupaten Bantul, Keputusan Bupati Bantul Nomor 143 Tahun 2001 Tanggal 8 Mei 2001 tentang Penjabaran Tugas Pokok dan Fungsi Kantor Perpustakaan Umum Kabupaten Bantul, dan Keputusan Bupati Bantul Nomor 418 Tahun 2002 tentang Uraian Tugas pada Unit Kerja di Lingkungan Kantor Perpustakaan Umum Kabupaten Bantul. Kantor Perpustakaan Umum merupakan unsur pelaksana Pemerintah Daerah di bidang pelayanan dan pemasyarakatan perpustakaan. KPU bertugas melayani masyarakat umum di bidang perpustakaan dan informasi serta memasyarakatkan perpustakaan.

3.1. Hasil Evaluasi

SKPD KPU melakukan kegiatan kapasitas institusional bagian pengelola perpustakaan sekolah, dusun, dan tempat ibadah. Kegiatan ini berhasil melibatkan 100 orang dengan komposisi 80% di antaranya adalah perempuan. Dengan demikian, SKPD KPU secara kuantitatif telah mengalokasikan kegiatannya dengan menggunakan perspektif gender. Meski demikian, keterlibatan laki-laki dan perempuan dalam pelatihan tersebut juga perlu memperhatikan kualitas keberhasilan dan keberlanjutan setelah pelatihan dilakukan. Perpustakaan merupakan sarana penting untuk meningkatkan angka melek huruf di masyarakat. Secara umum, angka buta huruf di DIY menurun. Ini dapat dilihat pada data yang dilansir UNICEF pada

tahun 2009 dimana angka buta huruf pada usia 15+ menurun dari 12.22% pada tahun 2007 menjadi 10.54% pada tahun 2008. Pada rentang tahun yang sama, angka buta huruf usia 15-44 tahun menurun dari 1.53% menjadi 0.72%. Hal yang sama juga terjadi pada rentang usia 45+ dimana penurunan terjadi sebesar 4.09% dari 28.76% pada tahun 2007. Untuk angka buta huruf usia 15+ dan 15-44 tahun, DIY berada lebih rendah dari angka total buta huruf di Indonesia pada tahun 2007 dan 2008, yaitu 7.81% dan 8.13%, dan 2,96% dan 1.94%. Meski demikian, angka buta huruf DIY untuk usia 45+ lebih tinggi 9.82% pada tahun 2007 dan 5.05% pada tahun 2008. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa kantong buta huruf di DIY berada pada usia 45+.

Selain angka buta huruf, perpustakaan juga terkait dengan budaya membaca masyarakat. Data BPS tahun 2003 menyebutkan bahwa umur di atas 15 tahun memiliki kecenderungan membaca koran 55.11 %, majalah/tabloid 16.72%, buku cerita 16.72%, buku pelajaran 44.28%, dan ilmu pengetahuan lainnya sebanyak 21.07%. Dengan kata lain, penduduk pada usia tersebut motivasi membaca didominasi karena berkaitan dengan pendidikan bukan untuk mendapatkan informasi lain. Terkait dengan hal tersebut, data BPS tahun 2006 menyebutkan bahwa masyarakat Indonesia membaca untuk mendapatkan informasi menduduki persentase sebanyak 23.5% sedangkan 85.9% dan 40.3% adalah menonton televisi dan mendengarkan radio. Secara singkat dapat dikatakan bahwa budaya membaca lebih rendah dibandingkan dengan budaya menonton dan mendengar.

3.2.Rekomendasi

Berdasarkan hasil evaluasi rekomendasi khusus yang dapat diberikan adalah :

- a) Kegiatan ini telah mengindikasikan adanya keberpihakan terhadap perempuan tetapi keberlanjutan dari kegiatan dan kualitas proses yang dihasilkan perlu dicermati kembali sehingga dapat disusun kesimpulan bahwa 80% perempuan yang terlibat dalam kegiatan mampu menjadi motivator atau *focal point* bagi

perempuan lainnya untuk meningkatkan akses mereka terhadap informasi

- b) Upaya peningkatan minat baca dengan perspektif gender perlu terus ditingkatkan dibarengi dengan upaya meleak informasi dan komunikasi. Ini perlu dilakukan karena kecenderungan budaya menonton yang masih tinggi dan budaya membaca yang lebih rendah. Dengan demikian, masyarakat diajak untuk memberdayakannya dirinya untuk berpikir kritis dengan berkeinginan mencari pendapat lain selain tontonan yang dikonsumsi.

4. SKPD Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP)

Dasar Pembentukan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Bantul adalah Perda Kabupaten Bantul Nomor 18 Tahun 2009 tentang Pembentukan Organisasi Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Bantul. Satuan Polisi Pamong Praja dipimpin oleh seorang Kepala Satuan dan berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah. Satuan Polisi Pamong Praja mempunyai tugas memelihara dan menyelenggarakan ketentraman dan ketertiban umum, menegakkan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati.

4.1. Hasil Evaluasi

SKPD Satpol PP telah melakukan satu kegiatan operasi penertiban Pekerja Seks Komersial (PSK) ditujukan kepada kelompok masyarakat, Badan Hukum, dan perorangan yang diindikasikan melakukan tindak pelanggaran Peraturan Daerah (Perda) dengan hasil dikeluarkannya teguran bagi pelanggar dan pengajuan ke pengadilan. Meski demikian, secara spesifik kegiatan ini tidak memiliki bukti yang mengindikasikan responsif terhadap gender. Bukti-bukti tersebut dapat berupa data terpilah kelompok sasaran, tingkat partisipasi, dan dampak dari kegiatan tersebut untuk kesetaraan perempuan dan laki-laki. Isu pekerja seks ini menjadi sangat krusial jika dikaitkan dengan penyebaran HIV/AIDS di Indonesia.

Praktik seksual tidak aman antara pekerja seks dan penggunaannya telah lama menjadi isu utama kedua penyebaran

HIV di Indonesia. Diperkirakan jumlah pekerja seksual perempuan yang terjun langsung ke jalan atau pun rumah bordil berkisar 95000 - 157000 orang dan yang bekerja secara tidak langsung seperti di tempat karaoke, panti pijat, dan lain-lain mencapai 85000-107000 orang. Prevalensi HIV/AIDS masing-masing adalah 6 - 16% dan 2 - 9%.⁶ Mencermati angka tersebut, salah satu upaya yang dapat dilakukan adalah dengan melakukan penegakan peraturan yang ada. Meski demikian, penegakan ini pun perlu memperhatikan sejumlah pranata hak asasi manusia dan peraturan internasional yang melindungi kepentingan perempuan sehingga tidak berakibat pada terjadinya kekerasan terhadap perempuan yang meningkat 263% dari 54425 kasus pada tahun 2008 menjadi 143586 kasus pada 2009. Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan mencatat bahwa kekerasan terhadap perempuan dilakukan aparat negara dan hukum, tokoh publik, tokoh spiritual, serta tokoh akademisi masih terjadi pola pengingkaran, pengabaian, dan pembungkaman terhadap korban.⁷

Bukan hanya itu, pekerja seks pun juga perlu diidentifikasi latar belakang dan motivasinya sehingga menjadi pekerja seks. Sejumlah literatur menunjukkan bahwa alasan menjadi pekerja seks identik dengan alasan ekonomi dan tingkat pendidikan sebagaimana pernah dilakukan oleh survei program Program Pencegahan HIV/AIDS melalui Transmisi Seksual (PMTS) medio 2009-2010. Hal lain yang perlu diperhatikan adalah kajian yang dilakukan ILO-IPEC (Internasional Penghapusan Pekerja Untuk Anak) pada tahun 2003 memperkirakan jumlah pekerja seks komersial di Indonesia

⁶ Republic of Indonesia Country Report on the follow up to the Declaration of Commitment on HIV/AIDS (UNGASS). Reporting period 2008 -2009. Hlm. 17-18.

⁷ Kasus Kekerasan terhadap Perempuan Meningkat 263% dalam <http://bataviase.co.id/node/121551>, akses 3 Juli 2010, 7.27 WIB.

yang melibatkan anak usia sekitar 18 tahun. Data itu menyebutkan 1244 anak di Jakarta, Bandung 2511, Yogyakarta 520, Surabaya 4990, dan Semarang 1623. Namun, jumlah ini dapat menjadi beberapa kali lipat lebih besar mengingat banyaknya pekerja seks komersial bekerja di tempat-tempat tersembunyi, ilegal dan tidak terdata. Lebih lanjut, data yang ada memperlihatkan daerah-daerah pemasok anak-anak untuk kegiatan pelacuran meliputi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat, Lampung, Sumatera Barat, Sumatera Utara, Kalimantan Barat, Sulawesi Utara dan Sulawesi Tenggara. Sementara daerah-daerah penerimanya terutama Jakarta, Bandung, Surabaya, Denpasar, Medan, Riau, Batam, Ambon, Manado, Makasar, dan Jayapura. Beberapa di antaranya bahkan diperdagangkan di luar negeri seperti Singapura, Malaysia, Taiwan, dan Jepang.⁸

4.2.Rekomendasi

Berdasarkan hasil evaluasi rekomendasi khusus yang dapat diberikan adalah :

- a) Satpol PP perlu meningkatkan kualitas dan kuantitas program/kegiatan responsif gender baik yang dilakukan secara mandiri maupun berkolaborasi dengan institusi lain. Peningkatan ini dapat dilakukan dengan bukan hanya berkontribusi pada penindakan dan operasi keamanan dan ketertiban, tetapi juga terlibat dalam penyediaan data terpilah pekerja seksual.
- b) Pekerja seksual bukan hanya perempuan, tetapi juga anak-anak, laki-laki, dan kelompok transgender. Ini perlu mendapat perhatian khusus agar dalam pelaksanaan kegiatan Satpol PP tidak memberikan stigma negatif khusus kepada jenis kelamin dan peran gender tertentu.

⁸ Ribuan Anak Jadi Pekerja Seks Per Tahun dalam <http://medanpunya.com/luar-negeri/3232-ribuan-anak-jadi-pekerja-seks-per-tahun>, akses 3 Juli 2010, 7.50 WIB.

- c) Satpol PP juga perlu melakukan peningkatan kapasitas internal baik pada level pengambil keputusan maupun sumber daya eksekutor lapangan perihal hak asasi manusia, hak sipil, penertiban tanpa kekerasan, komunikasi, psikologi massa dan personal untuk menghindari munculnya kekerasan oleh aparat penegak hukum terhadap warga sipil.

5. SKPD Badan Koordinasi Kesejahteraan Keluarga Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana (BKKPPKB)

SKPD ini dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 83 Tahun 2007. SKPD ini mempunyai kedudukan sebagai unsur pelaksana Pemerintah Daerah di bidang Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana. Badan Kesejahteraan Keluarga, Pemberdayaan perempuan dan Keluarga Berencana dipimpin oleh seorang Kepala Badan yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah. Tugas pokoknya adalah melaksanakan kewenangan kabupaten di bidang Kesejahteraan Keluarga, Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana.



5.1. Hasil evaluasi

SKPD BKK.PPKB sudah relatif banyak dalam melaporkan kegiatan responsif gender, mayoritas dari program-program tersebut telah menysasar pada kelompok gender tertentu seperti perempuan, laki-laki, remaja dan anak. Secara umum, indikator-indikator kesetaraan gender berupa pengambilan keputusan, hak serta pengembangan sumber daya dan manfaat telah tecermin dalam kegiatan yang diagendakan. Tetapi, ada beberapa catatan khususnya pada aktifitas-aktifas yang bertalian dengan peningkatan kapasitas institusional, terdapat beberapa program seperti pelayanan administrasi perkantoran tidak jelas siapa yang menjadi kelompok target/sasaran, tidak ada informasi pemilahan data berbasis jenis kelamin. Kondisi ini menyebabkan sulitnya mengevaluasi manfaat dan dampak bagi perempuan dan laki-laki.

Program-program pemberdayaan dan perlindungan perempuan serta kesejahteraan keluarga telah menunjukkan capaian hasil yang cukup signifikan. Partisipasi dan keterlibatan perempuan dalam beberapa program cukup tinggi, ini dilengkapi oleh data kualitatif, misalnya penyuluhan bagi ibu rumah tangga dalam membangun keluarga sejahtera dan pendampingan manajemen usaha bagi perempuan yang mengelola usaha menghasilkan data ekonomis produktif bagi ibu rumah tangga dan peningkatan hasil usaha kelompok perempuan. Yang menjadi catatan adalah tentang data keluarga miskin (gakin). Di sini belum menampilkan data terpilah berdasar jenis kelamin, padahal jumlah perempuan kepala keluarga di Kabupaten Bantul cukup banyak. Kelompok ini rentan terhadap kemiskinan karena terbatasnya akses dan kontrol terhadap sumber daya. Apabila perempuan miskin luput dari pendataan, peluang mereka untuk mendapatkan program-program penguatan seperti bantuan modal kerja dan ternak kambing, jamkemas, jamkesos dan jamkesda menjadi lebih kecil.

Berikutnya, untuk bidang Keluarga Berencana ada beberapa catatan terkait program tersebut. Program Keluarga Berencana, sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya, adalah mengendalikan jumlah penduduk sehingga dengan laju pertumbuhan yang terkendali kesejahteraan dapat ditingkatkan.

Data statistik gender DIY menyebutkan bahwa sebagian besar alat KB khusus diperuntukkan bagi perempuan seperti MOW, AKDR/IUD, suntik, susuk dan pil. Jumlah perempuan di Kabupaten Bantul yang menjadi akseptor KB pada tahun 2007 111.637 akseptor, pada tahun 2008 naik menjadi 113.543 akseptor. Sayangnya, hampir seluruh alat/cara KB yang ada, digunakan oleh perempuan, sedangkan laki-laki hanya menggunakan dua jenis cara/alat KB yaitu berupa vasektomi dan kondom, itupun jumlahnya masih jauh lebih kecil dibanding akseptor perempuan.

Catatan statistik DIY mengenai akseptor MOP dan Kondom di Kabupaten Bantul, yaitu masing-masing 973 akseptor pada tahun 2006 kemudian tahun 2007 turun menjadi 797 akseptor, tahun 2008 turun lagi menjadi 789 akseptor. Kemudian, untuk pengguna kondom 5.245 akseptor pada tahun 2006, 5.137 tahun 2007 dan 5.229 pada tahun 2008. Rendahnya partisipasi laki-laki atau suami dalam mengikuti program KB dipengaruhi oleh beberapa faktor antara lain rendahnya pengetahuan pria tentang KB karena rendahnya kepedulian pria terhadap KB, terbatasnya informasi KB bagi pria, adanya anggapan di masyarakat bahwa KB bukan urusan pria/suami, Terbatasnya jenis kontrasepsi pria (hanya ada dua pilihan yaitu, kondom dan vasektomi), terbatasnya tempat pelayanan KB pria, tidak semua puskesmas dapat melayani Medis Operasi Pria (MOP).

Selanjutnya, perlu diagendakan program perlindungan perempuan dari tindak kekerasan, khususnya untuk kelompok remaja. Selain itu, perlu ada pula pemilahan korban kekerasan terhadap remaja putri dan perempuan dewasa sebagai korban mengingat dalam banyak kasus data penanganan remaja putri sebagai korban kekerasan masih dikelompokkan dalam kelompok anak. Hal ini dikarenakan masih mengacu pada ketentuan UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, yaitu Pasal 1 ayat (1) yang menyebutkan bahwa anak adalah seseorang yang belum genap berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk yang masih dalam kandungan.

5.2.Rekomendasi

Berdasarkan hasil evaluasi, rekomendasi khusus yang dapat diberikan adalah:

- a) Setiap program yang diselenggarakan oleh SKPD hendaknya menyajikan data terpilah (laki-laki dan perempuan).
- b) Untuk program KB, perlu diselenggarakan program yang khusus menyasar pada laki-laki untuk mendorong keterlibatan laki-laki dalam program KB.
- c) Untuk program perlindungan perempuan, penting untuk dilakukan pemilahan korban kekerasan terhadap remaja putri dan perempuan dewasa sebagai korban.
- d) Untuk program-program pengentasan kemiskinan, perempuan kepala keluarga semestinya mendapat prioritas sebagai penerima program bantuan.

6. SKPD Kelautan dan Perikanan

Dinas Kelautan dan Pertanian merupakan unsur pelaksana Pemerintah Daerah di bidang kelautan dan perikanan yang dipimpin oleh Kepala Dinas dan berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah. Dinas ini bertugas melaksanakan urusan rumah tangga Pemerintah Daerah dan tugas pembantuan di bidang kelautan dan perikanan.



6.1. Hasil evaluasi

Kegiatan responsif gender yang dilakukan oleh SKPD bidang kelautan dan perikanan adalah pelatihan pengolahan hasil perikanan dan Penyuluhan peningkatan konsumsi hasil perikanan. Hasil yang dilaporkan dari kegiatan ini berupa peningkatan pengetahuan kelompok pengolah hasil perikanan tentang diversifikasi pangan dari ikan dan meningkatnya pengetahuan kelompok perikanan mengenai manfaat konsumsi ikan. Namun, aktivitas-aktivitas tersebut belum secara spesifik menunjukkan target sasaran berbasis gender dan belum ada data terpilah mengenai siapa saja yang mengikuti pelatihan. Ketiadaan informasi ini menyebabkan sulitnya mengukur partisipasi perempuan dan seberapa besar program itu berdampak nyata bagi kehidupan perempuan atau paling tidak berperan dalam mengurangi ketidaksetaraan laki-laki dan perempuan dalam akses dan kontrol terhadap sumber daya perikanan dan kelautan. Mengingat Bantul termasuk dalam kawasan pesisir, maka masyarakat nelayan yang bermukim di wilayah ini sangat potensial untuk dikembangkan dalam upaya meningkatkan produksi ikan hasil tangkapan.

Pada umumnya, di dalam struktur masyarakat nelayan terdapat pembagian kerja berbasis gender dimana laki-laki lebih banyak berperan dalam proses pencarian ikan ke tengah laut (*hunting activity*) sedangkan perempuan lebih banyak terlibat dalam kegiatan setelah panen (*post harvest activity*). *Post harvest activity* ini meliputi proses pengeringan, pengolahan, penyimpanan, pengemasan dan pemasaran hasil produksi. Selain itu, perempuan nelayan juga banyak terlibat pada aktifitas perawatan dan pembuatan alat tangkap. Meskipun pada umumnya perempuan pesisir menghabiskan banyak waktunya pada aktifitas-aktifitas tersebut, seringkali mereka tidak masuk dalam kategori nelayan. Definisi nelayan yang dirumuskan oleh pemerintah adalah aktifitas mencari ikan di laut. Sehingga, secara sistematis definisi ini meminggirkan perempuan yang hidup di lingkungan keluarga nelayan baik dalam kapasitas sebagai istri maupun sebagai anak perempuan. Hal ini berimplikasi terhadap akses dan kontrol terhadap sumber daya produktif maupun sosial.

Berdasarkan pola demikian, hendaknya program SKPD perikanan dan kelautan mengembangkan program-program bagi kelompok nelayan maupun kelompok budidaya perikanan yang lebih sensitif gender dengan mempertimbangkan sistem pembagian kerja berbasis gender (*division of labor*) yang berlaku dalam komunitas tersebut sehingga program-program yang diagendakan tepat sasaran sekaligus responsif gender. Artinya, kegiatan yang dilakukan akan meningkatkan peluang perempuan untuk bekerja dan terlibat dalam usaha perikanan dan kelautan, meningkatkan keadaan perempuan dari segi jumlah dan kualitasnya baik di bidang sosial, ekonomi dan politik, meningkatkan akses perempuan terhadap sumber daya perikanan dan kelautan, serta meningkatnya manfaat yang dapat dinikmati oleh perempuan dan laki-laki dalam program-program tersebut.

Selain itu, perlu diagendakan program-program pemberdayaan, pendampingan, penyuluhan, peningkatan pengetahuan dan ketrampilan serta penguatan bagi komunitas nelayan perempuan sehingga terbentuk kelompok atau organisasi yang beranggotakan perempuan. Untuk memberdayakan perempuan tidak bisa dilakukan secara individual tetapi perlu melalui jejaring atau kelompok supaya perempuan terlatih dan berani untuk mengungkapkan ide dan persoalannya. Hal ini juga akan mendorong kepercayaan diri dan keberanian komunitas. Seringkali, meskipun perempuan memiliki kemampuan dan ketrampilan yang sama dengan laki-laki pada tingkatan tertentu mereka terkadang masih merasa kurang percaya diri. Indikator ketercapaian dari program pemberdayaan ini nantinya adalah terbangunnya organisasi nelayan perempuan yang mandiri dan kritis. Mandiri artinya organisasi tersebut dikelola dan dijalankan oleh perempuan dengan tingkat swadaya yang tinggi. Kritis artinya kelompok ini mampu melihat persoalan secara objektif serta mampu mencari solusi atas persoalan yang mereka hadapi.

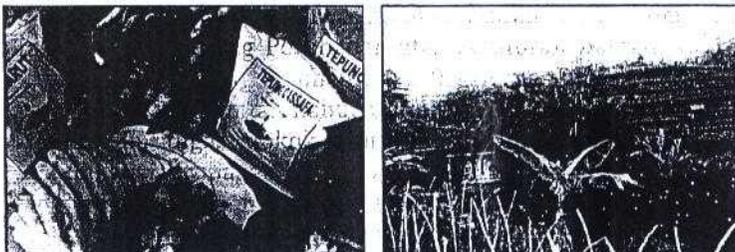
6.2. Rekomendasi

Berdasarkan hasil evaluasi rekomendasi khusus yang dapat diberikan adalah:

- a) Setiap program yang diselenggarakan oleh SKPD hendaknya menyajikan data terpilah yang antara lain memuat :
 - Daftar data tentang aktivitas baik ekonomi, sosial dan politik berdasarkan jenis kelamin.
 - Daftar tentang masalah dan kebutuhan berdasarkan jenis kelamin.
 - Daftar prioritas kebutuhan termasuk upaya-upaya peningkatan kapasitas berdasarkan jenis kelamin.
 - Peraturan khusus yang disediakan untuk mendorong partisipasi perempuan dan laki-laki secara adil berdasarkan jenis kelamin.
- b) Setiap program kerja perlu mempertimbangkan bagaimana peluang yang dimiliki perempuan untuk bekerja dan terlibat dalam usaha perikanan dan kelautan meningkat, ukurannya adalah:
 - Adanya sejumlah perempuan yang ikut menjadi penanggung jawab atau pelaksana dalam program.
 - Sejumlah aktivitas usaha perempuan sudah tercatat dalam data profil komunitas nelayan dan perikanan sebagai bagian dari potensi atau SDM di lingkungan tersebut
- c) Setiap program perlu memastikan bahwa akses perempuan terhadap sumber daya (informasi, pasar, kredit, modal kerja, dan lain-lain) meningkat, ukurannya adalah:
 - Adanya sejumlah wadah informasi yang mudah dan dapat diakses oleh perempuan dan laki-laki secara adil.
 - Adanya perubahan kebijakan atau peraturan yang memudahkan perempuan untuk memperoleh modal.
 - Adanya peluang yang sama bagi perempuan untuk meningkatkan atau menguasai teknologi secara maksimal.

7. SKPD Pertanian dan Kehutanan

SKPD ini dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2009 Tentang Perubahan atas Peraturan Daerah No 16 Tahun 2007 Tentang Pembentukan Organisasi Dinas Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bantul, di dalamnya termuat kedudukan, tugas pokok dan fungsi. Dinas Pertanian dan Kehutanan merupakan unsur pelaksana Pemerintah Daerah di bidang pertanian tanaman pangan, kehutanan dan perkebunan. Dinas Pertanian dan Kehutanan dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah. Tugas Pokoknya adalah melaksanakan sebagian kewenangan Kabupaten di bidang pertanian yang meliputi pertanian tanaman pangan, perkebunan dan hortikultura, kehutanan, ketahanan pangan.



7.1. Hasil evaluasi

Sektor pertanian tidak bisa dilepaskan begitu saja dari isu gender. Isu gender di sektor pertanian bukan sekedar isu perempuan petani, tetapi merupakan isu ekonomi. Hal ini berkaitan dengan peran perempuan secara nasional di bidang pertanian yang cukup besar, lebih dari 60% kegiatan ini ditekuni oleh perempuan. Di samping itu, perempuan petani juga menghasilkan tambahan penghasilan di atas 30% dari total penghasilan keluarga. Migrasi laki-laki ke luar desa menjadikan makin bertambahnya jumlah perempuan sebagai kepala keluarga yang mengambil alih kendali tanggung jawab keluarga serta proses pengambilan keputusan produksi pertanian.

Meskipun demikian, manfaat pembangunan pertanian belum secara adil dan merata dinikmati oleh perempuan.

Data statistik DIY 2009 menyebutkan bahwa di Kabupaten Bantul, pada umumnya penduduk miskin menggantungkan hidupnya dari sektor pertanian. Rumah tangga miskin dengan pekerjaan utama kepala rumah tangga di bidang pertanian adalah sejumlah 13.790 atau sebesar 32,15%. Namun demikian, belum ditemukan statistik tentang jumlah perempuan yang menggeluti bidang ini. Akan tetapi, yang menarik adalah, dalam laporannya, SKPD telah banyak melakukan kegiatan yang berorientasi pada program responsif gender sehingga dapat dikategorikan dalam skala penilaian "menjanjikan".

Kategori ini dilatarbelakangi oleh banyaknya program-program yang digulirkan telah berorientasi pada usaha untuk meningkatkan akses dan kontrol perempuan terhadap sumber daya pertanian dan kehutanan serta memberi peluang perempuan untuk bekerja dan terlibat dalam usaha pertanian dan kehutanan, misalnya:

- Budidaya tanaman bawah tegakan dengan kelompok sasarannya adalah KT (kelompok tani laki-laki) dan KTW (Kelompok Tani Wanita).
- Bantuan bibit penghijauan lingkungan dengan sasaran PKK, organisasi wanita, kelompok masyarakat, sekolah dan instansi.
- Pembuatan persemaian bibit tanaman hutan telah menargetkan KT dan KTW.
- Penguatan modal (penerapan GOP/SOP bawang merah) melibatkan perempuan sebesar 20% dari 50 peserta.
- Penguatan modal (pengembangan kawasan bawang merah) dimana terdapat data persentase keterlibatan perempuan sebesar 20% dari 50 peserta yang terdaftar.
- Penguatan modal (Sekolah lapang Pengendali hama terpadu) terdapat data persentase keterlibatan perempuan sebesar 20% dari 50 peserta yang terdaftar.
- Penguatan modal (penyediaan benih bawang merah) terdapat data persentase keterlibatan perempuan sebesar 20% dari 100 peserta yang terdaftar.

- Penguatan modal (Pengembangan jamur) terdapat data persentase keterlibatan perempuan sebesar 20% dari 80 peserta yang terdaftar.
- Sekolah lapang iklim menunjukkan data kuantitatif persentase keterlibatan perempuan, signifikansi dari kegiatan ini adalah perempuan bisa menentukan keputusan dalam usaha tani.
- Aplikasi pupuk organik pada usaha tani tingkat kelompok tani menunjukkan data kuantitatif keterlibatan perempuan yaitu 34 pos daya di 17 kecamatan yang seluruhnya beranggotakan perempuan.
- Pengolahan dan pelatihan dengan hasil peserta telah dapat memproduksi emping jagung yang telah dipasarkan. Sasaran adalah KWT seluruh Bantul.
- Penguatan modal untuk pengolahan dan pemasaran hortikultura. Sasaran adalah KWT seluruh Bantul.

Data-data tersebut telah menunjukkan bahwa program-program yang dijalankan selain telah berorientasi pada peningkatan akses dan kontrol perempuan terhadap sumber daya pertanian dan kehutanan juga telah berorientasi pada usaha pemenuhan kebutuhan praktis atau kebutuhan dasar (penyediaan air, perawatan kesehatan, penyediaan pendapatan keluarga, perumahan dan pelayanan dasar, dan penyediaan makanan untuk keluarga dan strategis perempuan (kebutuhan yang merujuk pada kebutuhan-kebutuhan yang apabila terpenuhi, berpotensi untuk mengubah relasi gender, misalnya akses dan kontrol terhadap sumber daya).

7.2.Rekomendasi

Dari hasil evaluasi, rekomendasi yang bersifat khusus pada SKPD ini adalah:

- a) Meskipun SKPD pertanian dan kehutanan telah banyak memiliki program yang responsif gender, adalah penting untuk mengukur tingkat keberhasilannya terutama terkait bagaimana keadaan perempuan pascaprogram berlangsung baik dari segi jumlah dan kualitasnya di bidang sosial, ekonomi dan politik. Ini dapat diukur dari:

- Adanya perubahan pandangan yang positif dari masyarakat terhadap potensi perempuan.
 - Tercatat sejumlah perempuan yang menduduki posisi strategis di bidang sosial, ekonomi dan politik.
 - Ada perubahan terhadap proses pengambilan keputusan penting yang mengharuskan melibatkan perempuan.
 - Meningkatnya jumlah usaha-usaha ekonomi yang dikelola dan dimiliki oleh kaum perempuan.
 - Ada perubahan pandangan bahwa perempuan tidak lagi dianggap pencari nafkah tambahan.
- b) Setiap program yang diselenggarakan oleh SKPD hendaknya menyajikan data terpilah yang antara lain memuat :
- Daftar data tentang aktivitas baik ekonomi, sosial dan politik berdasarkan jenis kelamin.
 - Daftar tentang masalah dan kebutuhan berdasarkan jenis kelamin.
 - Daftar prioritas kebutuhan termasuk upaya-upaya peningkatan kapasitas berdasarkan jenis kelamin.
 - Peraturan khusus yang disediakan untuk mendorong partisipasi perempuan dan laki-laki secara adil berdasarkan jenis kelamin
- c) Sudah banyak program SKPD yang mempertimbangkan peningkatan peluang perempuan untuk bekerja dan terlibat dalam usaha pertanian dan kehutanan, namun akan lebih baik jika diukur tingkat keberhasilannya melalui indikator-indikator seperti :
- Adanya sejumlah perempuan yang ikut menjadi penanggung jawab atau pelaksana dalam program.
 - Sejumlah aktivitas usaha perempuan sudah tercatat dalam data profil komunitas sebagai bagian dari potensi atau SDM di lingkungan tersebut.

8. SKPD Kesatuan Bangsa, Politik, dan Perlindungan Masyarakat (Kesbangpollinmas)

Tidak tersedia profil karena website tidak dapat diakses

8.1. Hasil Evaluasi

SKPD Kesbangpollinmas melakukan dua kegiatan. Pertama, sarasehan kerukunan umat beragama yang dilakukan melalui ceramah dengan melibatkan kelompok muda dan perempuan dari lima agama. Kedua, ceramah pendidikan pendahuluan bela negara yang ditujukan untuk karang taruna. Dengan demikian, kedua kegiatan tersebut difokuskan pada tumbuhnya rasa kerukunan antarumat beragama dan cinta tanah air pada kelompok muda.

Kedua kegiatan tersebut dilakukan dalam rentang waktu Oktober - November 2009 dan tidak tersedia bukti pencapaian baik secara kuantitatif maupun kualitatif terhadap kesetaraan peran perempuan dan laki-laki. Sehingga, meskipun memiliki ide yang bagus, kegiatan ini dikategorisasikan dalam kelompok lemah.

Isu tentang keragaman beragama memang identik dengan rasa cinta tanah air yang berdampak pada rasa integratif sebagai bangsa Indonesia. Konflik horizontal acap kali terjadi akibat perbedaan sudut pandang dalam beragama. Menurut *United Nations Support Facility for Indonesian Recovery (Unsfir)*, dalam satu dasawarsa terakhir data konflik antaragama yang dihimpun menunjukkan sejak 1998 sampai dengan 2003, sedikitnya telah terjadi 428 kasus konflik agama. Frekuensi konflik paling banyak terjadi pada tiga tahun pertama reformasi, yakni 1998 - 2000, sebanyak 297 kasus. Sementara itu, menurut SETARA Institute pada bulan Januari 2009 terjadi 367 tindakan pelanggaran kebebasan beragama/berkeyakinan dalam 265 peristiwa⁹. Di tahun 2009, sejumlah isu tentang intoleransi dalam kehidupan beragama meliputi (1) penghentian dan

⁹http://www.moderatemuslim.net/mms/index.php?option=com_content&task=view&id=41&Itemid=1&lang=in, 4/08/2010, 08.39 WIB

penghalangan kegiatan ibadah, (2) penyegelan dan penutupan rumah ibadah (3) pencabutan izin pembangunan rumah ibadah (4) penolakan masyarakat terhadap pembangunan rumah ibadah (5) perusakan rumah ibadah (6) kriminalisasi paham keagamaan (7) ancaman, tuntutan dan intimidasi terhadap kelompok lain; (8) tindakan penyerangan/penggerebekan (9) penyesatan/pengharaman terhadap paham keagamaan tertentu (10) diskriminasi terhadap kelompok lain (11) pengeboman dan (12) pengusiran¹⁰. Di dalam isu tersebut acapkali perempuan dan anak-anak menjadi korban. Bahkan, agama juga menjadi alat tersendiri untuk melegitimasi ketidaksetaraan gender.

8.2.Rekomendasi

Dari hasil evaluasi, rekomendasi yang bersifat khusus pada SKPD ini adalah :

- a) Dalam melaksanakan kegiatannya, Kesbangpollinmas perlu mengedepankan semangat pluralitas dan multikultural dalam interaksi beragama. Keterlibatan semua elemen penting untuk mencapai kehidupan yang penuh toleransi di tengah sentimen keagamaan yang dicatat meningkat setiap tahunnya.
- b) Pelibatan kaum laki-laki dalam pengarusutamaan gender dalam aktivitas keagamaan juga dapat dipilih sebagai salah satu topik kegiatan. Agama menjadi kendala tersendiri ketika digunakan oleh sekelompok tertentu untuk melegitimasi kepentingannya dan berdampak negatif terhadap kesetaraan gender.

¹⁰ Toleransi dan Intoleransi di Indonesia. Laporan Akhir Tahun 2009. Moderate Muslim Society dalam <http://www.moderatemuslim.net/mms/images/stories/pdf/laporan%20akhir%20tahun%202009.pdf> akses 4/08/10, 08/51 WIB

9. SKPD Badan Kepegawaian Daerah (BKD)

Bidang Kepegawaian di Pemerintah Kabupaten Bantul dilaksanakan oleh Badan Kepegawaian yang diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Bantul No. 30 Tahun 2000 tentang Pembentukan dan Struktur Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Bantul dan Keputusan Bupati. Tugas pokok BKD adalah melaksanakan pengelolaan administrasi kepegawaian, penyusunan program pengembangan pegawai daerah serta melaksanakan mutasi pegawai negeri sipil daerah dan menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan pegawai.

9.1. Hasil Evaluasi

Kegiatan yang erat berkaitan dengan kapasitas untuk partisipasi publik baik untuk PNS maupun CPNS ini sangat penting untuk dilakukan sebagai kegiatan penunjang bagi kualitas baik pegawai maupun calon pegawai perempuan maupun laki-laki. Akan tetapi kegiatan tersebut ternyata tidak memunculkan pertimbangan berdasarkan data terpilah yang ada sehingga hasil kegiatan yang dilakukan juga tidak dapat diketahui dampaknya bagi kebutuhan dan kesetaraan gender. Data pilah yang tersedia pada BKD menunjukkan bahwa masih ada ketidakseimbangan gender terutama dari segi mutu (kualitas) CPNS maupun PNS di Kabupaten Bantul. Secara keseluruhan jumlah PNS dan CPNS berdasarkan jenis kelamin menunjukkan 49,7% (6284 orang) laki-laki, sedangkan 50,3% (6360 orang) perempuan. Dari segi eselonisasi, pada eselon IV terdapat kesenjangan yang cukup tinggi antara PNS laki-laki sebanyak 290 orang dan PNS perempuan sebanyak 134 orang, bahkan secara umum jumlah PNS laki-laki lebih besar dari PNS perempuan pada setiap eselon, sehingga dibutuhkan program-program kegiatan yang diarahkan pada peningkatan kapasitas PNS perempuan untuk mencapai kesetaraan kualitas, terutama meyangkut eselonisasi di lingkungan Kabupaten Bantul.

PNS perempuan lebih banyak jumlahnya pada jabatan fungsional dibandingkan dengan PNS laki-laki terutama pada jabatan-jabatan yang dianggap berkaitan dengan sifat 'feminin atau domestik', seperti jabatan fungsional di BKKPP dan KB (27 orang) dibandingkan PNS laki-laki sebanyak 26 orang, Dinas

Kesehatan (407 orang) dibandingkan PNS laki-laki sebanyak 124 orang, Dinas Pendidikan Dasar (2933 orang) dibandingkan PNS laki-laki sebanyak 2039 orang, Dinas Pendidikan Menengah dan Non-Formal (1247 orang) dibandingkan PNS laki-laki sebanyak 811 orang, dan RSUD (127 orang) dibandingkan PNS laki-laki sebanyak 76 orang. Sedangkan untuk PNS laki-laki lebih banyak jumlahnya pada SKPD-SKPD yang dianggap 'maskulin atau publik', antara lain pada Bagian Umum (61 orang) dibandingkan PNS perempuan sebanyak 15 orang, Kantor Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat (27 orang) dibandingkan PNS perempuan sebanyak 5 orang, Kantor Satuan Polisi Pamong Praja (62 orang) dibandingkan PNS perempuan 8 orang, Dinas Sumber Daya Air (145 orang).

Data terpilah tersebut dapat digunakan juga untuk melakukan kegiatan-kegiatan peningkatan kuantitas maupun kualitas PNS maupun CPNS dari tiga indikator kesetaraan gender, yaitu pengambilan keputusan, hak, serta pengembangan sumber daya dan manfaat terutama bagi PNS dan CPNS perempuan yang terbukti masih belum setara dengan PNS dan CPNS laki-laki.

9.2.Rekomendasi

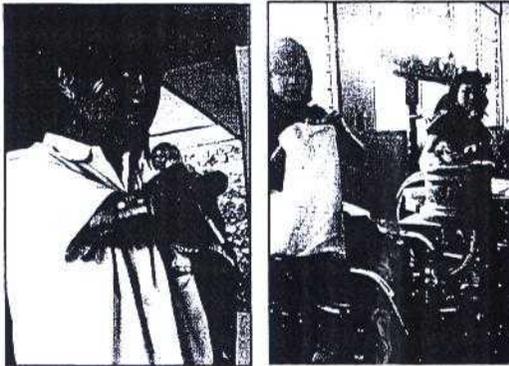
Dari hasil evaluasi, rekomendasi yang bersifat khusus pada SKPD ini adalah :

- a) Untuk rekrutmen berikutnya, BKD perlu memperhatikan kesetaraan rasio antara laki-laki dan perempuan di semua SKPD dan membuka peluang seluas-luasnya bagi laki-laki maupun perempuan dengan menghapuskan kecenderungan-kecenderungan yang membedakan antara sifat pekerjaan yang 'maskulin' atau 'feminin', sehingga baik laki-laki maupun perempuan dapat membuktikan kualitas masing-masing secara setara di semua bidang.
- b) Untuk program kegiatan berikutnya, BKD perlu memperhatikan kesetaraan rasio antara laki-laki dan perempuan. Ini perlu dilakukan dengan memperhatikan kecenderungan tren dalam kualitas sumber daya

manusia pada eselon yang lebih tinggi maupun jabatan tertentu menunjukkan rasio laki-laki lebih besar dibandingkan perempuan.

10. SKPD Dinas Sosial (Dinsos)

Dibentuk berdasarkan Perda Nomor 16 Tahun 2007 tentang Pembentukan Organisasi Dinas Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bantul dan Peraturan Bupati Bantul Nomor 81 Tahun 2007 tentang Rincian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Sosial Kabupaten Bantul. Dinas Sosial Kabupaten Bantul mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas umum Pemerintahan dan Pembangunan di Bidang Kesejahteraan Sosial dan Keagamaan



10.1. Hasil Evaluasi

Masalah sosial yang dihadapi oleh Pemerintah Kabupaten Bantul tidak hanya menyangkut penyandang cacat, anak terlantar, lansia, tuna sosial dan Napza. Masalah kemiskinan merupakan masalah utama yang erat kaitannya dengan masalah sosial dan keagamaan, sehingga masalah kemiskinan menjadi masalah utama yang harus segera ditangani. Berdasarkan hasil Susenas 2004, jumlah penduduk miskin mencapai 616200 jiwa atau sekitar 19,14% dari total penduduk di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Dari populasi

penduduk miskin tersebut, sekitar 42,44% diantaranya tergolong sebagai penduduk fakir miskin. Angka tersebut menunjukkan bahwa secara rata-rata dari 100 orang penduduk miskin, ditemukan 42 orang diantaranya yang termasuk dalam kategori fakir miskin. Pada tahun yang sama, persentase penduduk miskin di Bantul (24.57%) menduduki peringkat kedua tertinggi setelah Gunung Kidul (28.12%). Sementara itu, pada tahun 2006 diketahui bahwa di Bantul terdapat 28463 kepala keluarga miskin atau 66.35% adalah laki-laki dan 33.65% sisanya adalah perempuan. Tingkat pendidikan yang dimiliki adalah 92.31% SD, 5.48% SLTP, dan 2.20% SLTA ke atas.¹¹

Kebutuhan masyarakat dalam bidang sosial (dan keagamaan) dalam kenyataannya berbeda karena terkait erat dengan perbedaan jenis kelamin, bagi laki-laki dan perempuan, dan anak-anak. Untuk itu dibutuhkan data terpilah yang menunjukkan kebutuhan dan kepentingan yang berbeda antara laki-laki dan perempuan, serta anak-anak, sehingga program dan kegiatan yang dilaksanakan dapat mencapai sasarannya. Contoh yang menyangkut bantuan Pelayanan Kesehatan dan bantuan sosial kemasyarakatan dibutuhkan data terpilah tentang keadaan kesehatan yang dihadapi oleh laki-laki dan perempuan, maupun anak-anak dalam masyarakat miskin tersebut. Demikian juga beasiswa pendidikan untuk masyarakat miskin juga harus didasarkan pada data terpilah yang akan memberikan bantuan beasiswa untuk mendukung kesetaraan partisipasi perempuan dan laki-laki.

10.2.Rekomendasi

Dari hasil evaluasi, rekomendasi yang bersifat khusus pada SKPD ini adalah:

- a) Masalah yang dihadapi oleh Dinas Sosial bukan hanya menyangkut masalah ekonomi, akan tetapi terkait erat dengan budaya, kesehatan, pendidikan, dan sebagainya,

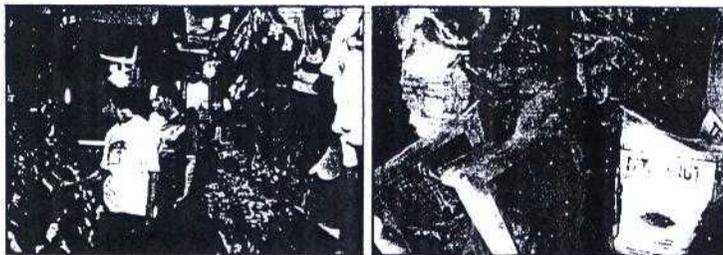
¹¹ Profil Rumah Tangga Fakir Miskin-Miskin Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Pendataan Fakir Miskin 2009

sehingga bias gender yang muncul dimungkinkan cukup tinggi karena kenyataan yang ada dalam masyarakat mengalami perkembangan maupun perubahan. Contohnya perubahan pandangan bahwa laki-laki adalah kepala keluarga yang wajib memberi nafkah, sehingga dalam kenyataan di masyarakat perempuan pun saat ini banyak menjadi kepala keluarga atau pencari nafkah utama. Dengan demikian program-program maupun kegiatan yang dilakukan juga harus didasarkan pada data terpilah yang nyata dalam masyarakat untuk menghindari kesalahan sasaran kegiatan.

- b) Kemiskinan sebagai masalah utama yang dihadapi oleh Dinas Sosial Kabupaten Bantul harus segera ditangani melalui pemberdayaan perempuan dan anak karena kemiskinan akan sangat dirasakan terutama oleh perempuan sebagai pendidik utama anak-anak menjadi generasi penerus bangsa.

11. SKPD Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi (Disperindagkop)

Dinas Perindustrian Perdagangan dan Koperasi (Disperindagkop) Kab.Bantul merupakan salah satu unsur pelaksana Pemerintah Daerah di bidang Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Penanaman Modal. Hal ini tertuang dalam Pedoman Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Bantul Nomor. 49 tahun 2000 dan SK Bupati No. 155 tahun 2000 tentang Penjabaran Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Perindagkop.



11.1. Hasil Evaluasi

Data perkembangan yang menyangkut perindustrian, perdagangan dan perkoperasian menunjukkan bahwa di Kabupaten Bantul sebagian besar aktivitas dilakukan oleh industri kecil dan menengah yang lokasinya tersebar dan jenis industri yang cukup bervariasi. Akan tetapi tidak ada data terpilah yang ditunjukkan sebagai dasar pembentukan program dan pelaksanaan kegiatan untuk mendukung kearah kesetaraan dan keadilan gender, sedangkan sektor-sektor industri kecil dan menengah terkait erat dengan industri rumah tangga yang melibatkan tidak hanya laki-laki bahkan kebanyakan perempuan. Perempuan dalam aspek perekonomian dalam skala industri kecil seringkali terpinggirkan karena keterbatasan modal, produk sampai pemasaran. Perempuan dalam industri kecil seringkali tidak dihargai hasil kerjanya, bahkan dianggap sebagai bagian dari kewajiban dan tugas perempuan, padahal dalam skala industri kecil banyak menyerap perempuan sebagai tenaga kerja seperti industri keramik, bambu, dan emping melinjo. Data Disperindagkop tahun 2009 menyebutkan bahwa perkembangan industri kecil menengah pada tahun 2009 dibandingkan tahun 2009 mengalami peningkatan unit usaha sebesar 0.43% dari 17937, tenaga kerja 0.62% dari 80468, dan nilai produksi meningkat 8.62% dari 721321.

11.2. Rekomendasi

Dari hasil evaluasi rekomendasi yang bersifat khusus pada SKPD ini adalah:

- a) Untuk pembuatan program peningkatan kuantitas dan kualitas UKM perlu dilakukan yang didasarkan pada data terpilah yang terkait dengan aspek manajemen, produk, sampai pemasaran.
- b) Untuk meningkatkan peranan perempuan dalam sektor perindustrian, perdagangan dan perkoperasian, perlu dilaksanakan kegiatan yang lebih memberikan kesempatan dan partisipasi perempuan pada tingkat pengambilan keputusan dan hak perempuan dalam aspek permodalan.

12. SKPD Dinas Pekerjaan Umum (DPU)

Tidaktersedia profil karena website tidak adapat diakses



12.1. Hasil Evaluasi

Pembangunan sarana dan prasarana merupakan tugas utama dari Dinas PU Kabupaten Bantul untuk mendukung kegiatan fisik dan non-fisik lainnya, antara lain rehabilitasi/pemeliharaan sarana dan prasarana air minum yang secara sosial budaya dianggap merupakan bagian tugas perempuan secara domestik dan didukung oleh adanya data terpilah. Sebagaimana juga rehabilitasi/pemeliharaan sarana dan prasarana kesehatan yang lebih banyak dibutuhkan oleh perempuan dan anak-anak terkait kebutuhan akan kesehatan dasar. Untuk itu dibutuhkan data terpilah yang mendukung pada kegiatan-kegiatan terkait dengan pemenuhan hak-hak dasar perempuan dan anak, sehingga tercapai kesetaraan gender dalam bidang PU.

12.2. Rekomendasi

Dari hasil evaluasi rekomendasi yang bersifat khusus pada SKPD ini adalah:

- a) Sarana dan prasarana merupakan bagian penting untuk mendukung pemenuhan kebutuhan dan hak-hak masyarakat di berbagai bidang sehingga dalam

pembuatan program-program pengadaan, pemeliharaan, maupun perbaikan sarana prasarana tersebut disesuaikan dengan kebutuhan yang nyata di masyarakat, untuk itu diperlukan data terpilah yang akan mengarahkan pada pencapaian kesetaraan gender.

- b) Untuk pelaksanaan kegiatan yang menyangkut sifat 'feminitas' dan 'maskulinitas' pekerjaan secara sosial budaya diharapkan masih dilakukan secara khusus sesuai kenyataan dalam masyarakat, antara lain menyangkut sarana prasarana sumber daya air, kesehatan, dan pendidikan, untuk mendukung adanya affirmative action bagi kaum perempuan guna pemenuhan hak dasar perempuan.

13. SKPD Tenaga Kerja dan Transmigrasi

Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Bantul merupakan salah satu perangkat daerah Pemerintah Kabupaten Bantul. Hal ini tertuang dalam Peraturan Daerah Nomor 46 tahun 2000 tentang Pembentukan Dan Organisasi Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Bantul (Lembaran Daerah Seri D Nomor 33 Kabupaten Bantul Tahun 2000). Kedudukannya berada di bawah Sekretariat Daerah Kabupaten Bantul dan bertanggung jawab kepada Bupati Bantul, dipimpin oleh seorang Kepala Dinas. Sedangkan tugas pokoknya diatur dengan Keputusan Bupati Nomor 153 tahun 2001 tanggal 8 Mei 2001 tentang Penjabaran Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Bantul.

13.1. Hasil Evaluasi

SKPD Tenaga kerja dan transmigrasi melaporkan dua kegiatan responsif gender berupa pelatihan ketrampilan prosesing dan batik. Hasil dari kegiatan tersebut adalah terciptanya wirausaha. Akan tetapi, program tersebut tidak secara eksplisit menyebutkan target sasaran peserta pelatihan sehingga tampilan data terpilah belum kelihatan. Hal ini menyebabkan sulitnya mengukur seberapa banyak partisipasi perempuan dalam proyek-proyek tersebut. Lebih lanjut, manfaat dan dampak baik secara sosial dan ekonomi yang diterima oleh

perempuan dan laki-laki juga tidak mudah untuk di evaluasi sehingga gap atau kesenjangan dalam kegiatan ini belum teridentifikasi secara pasti.

Selama satu tahun terakhir, data statistik gender DIY menyebutkan bahwa jumlah pencari kerja di Kabupaten Bantul berdasar jenis kelamin mayoritas adalah lulusan SMA/SMK dengan rasio laki-laki dan perempuan 2.882:1.907. Sedangkan jika diamati dari jumlah penempatan kerja menurut Antar Kerja Lokal (AKL), Antar Kerja Antar Daerah (AKAD), dan Antar Kerja Antar Negara (AKAN), jumlah tenaga kerja yang ditempatkan lebih banyak perempuan dibandingkan laki-laki terutama untuk kategori AKL, di mana proporsi laki-laki dan perempuan adalah 26:648. Demikian halnya dengan data Tenaga Kerja Indonesia, perempuan lebih tinggi dibanding laki-laki dengan perbandingan 126 - 276. Ini mengindikasikan adanya fenomena feminisasi migrasi dimana perempuan lebih banyak mencari penghidupan di luar negeri karena sempitnya lapangan pekerjaan di dalam negeri. Di lain sisi, angka pengangguran terbuka juga lebih banyak di huni oleh wajah perempuan dengan proporsi laki-laki (16.673):perempuan (18.682). Jumlah Perempuan Kepala Keluarga (PEKKA) juga relatif banyak yakni 13.938 orang.

Memperhatikan data-data tersebut, tampak bahwa sesungguhnya tenaga kerja perempuan lebih disukai oleh pasar, sehingga ke depan perlu dipersiapkan kebijakan peningkatan kualitas tenaga kerja dan perlindungan perempuan secara sistematis dalam suatu produk hukum. Di sisi lain, perlu juga dipersiapkan program-program pemberdayaan baik berupa pelatihan maupun pendidikan bagi perempuan terutama yang berstatus sebagai perempuan kepala rumah tangga untuk menghindarkan kelompok ini dari kemiskinan.

13.2.Rekomendasi

- a) Setiap program yang diselenggarakan oleh SKPD hendaknya menyajikan data terpilah yang memuat hal-hal sebagai berikut:
 - Daftar tentang masalah dan kebutuhan berdasarkan jenis kelamin.
 - Daftar prioritas kebutuhan termasuk upaya-upaya peningkatan kapasitas berdasarkan jenis kelamin.

- Peraturan khusus yang disediakan untuk mendorong partisipasi perempuan dan laki-laki secara adil berdasarkan jenis kelamin.
- b) Banyaknya tenaga kerja perempuan yang terserap di pasar adalah tamatan SMU, sehingga kemungkinan mereka bekerja di sektor informal. Sektor ini rentan dengan eksploitasi dan kekerasan serta berupah minim sehingga perlu dipersiapkan kebijakan peningkatan kualitas tenaga kerja dan perlindungan perempuan secara sistematis dalam suatu produk hukum.
- c) Dinas perlu secara khusus mengagendakan program pelatihan dan pemberdayaan bagi perempuan berstatus kepala rumah tangga (*breadwiner*), karena pada umumnya akses dan kontrol kelompok ini terhadap sumber daya ekonomi, sosial dan politik sangat terbatas. Hal ini berimplikasi terhadap sempitnya alternatif dan peluang pekerjaan bagi mereka.

BAB IV PENUTUP

Bagian ini terdiri atas kesimpulan dari evaluasi semua SKPD, rekomendasi umum, dan keterbatasan evaluasi. Kesimpulan evaluasi tidak dimaksudkan untuk megeneralisasi hasil dan rekomendasi umum diberikan agar dapat diimplementasikan oleh semua SKPD. Sementara itu, keterbatasan evaluasi disebutkan untuk menunjukkan hal-hal yang tidak dibahas dan kendala yang muncul selama evaluasi dilakukan.

1. Kesimpulan

Dari 16 SKPD yang dievaluasi terdapat 13 SKPD yang melakukan program/kegiatan responsif gender dan 3 sisanya tidak melakukan. Hasil evaluasi menunjukkan bahwa 2 SKPD, yakni BKKPP & KB berada pada skala signifikan, dan SKPD Pertanian dan Kehutanan berada pada skala menjanjikan. Sementara itu, 11 sisanya berada pada skala lemah. Kondisi ini terjadi karena program/kegiatan tersebut tidak memiliki indikator pencapaian dan bukti yang menunjang.

Dengan demikian, 1 SKPD dapat melanjutkan program/kegiatan yang telah dilakukan dan 1 SKPD perlu meningkatkan program/kegiatan yang ada dilengkapi dengan alat bukti yang mendukung verifikasi pencapaian. Sebelas SKPD lainnya perlu melakukan pembenahan perencanaan program kegiatan responsif gender lebih sistematis dan kegiatan yang dilakukan perlu mendapatkan pertimbangan seksama untuk dilanjutkan pada masa yang akan datang. Untuk memudahkan hal tersebut akan diberikan rekomendasi yang sifatnya umum pada bagian ini.

2. Rekomendasi Umum

Pada masa yang akan datang, sebelum menyusun program responsif gender setiap SKPD perlu melakukan analisis gender sebagai langkah awal dalam rangka penyusunan kebijakan, program dan kegiatan

yang responsif gender sehingga program-program yang dihasilkan tidak bias gender. Untuk analisis gender diperlukan data gender, yaitu data kuantitatif maupun kualitatif yang sudah terpilah antara laki-laki dan perempuan. Selain itu, dalam mengukur juga harus mengandung tiga hal yaitu kuantitas, kualitas dan batas waktu.

Kuantitas adalah setiap kegiatan yang direncanakan dapat diukur hasilnya secara jelas dengan menggunakan angka-angka, persentase dan lain-lain. Kualitas adalah setiap kegiatan yang direncanakan dapat terlihat hasilnya dalam bentuk analisis yang diperoleh dari laporan-laporan kegiatan. Batas waktu adalah setiap kegiatan yang direncanakan biasanya dibuat batas waktu pencapaiannya sehingga apabila ingin dilihat hasilnya perlu memperkirakan apakah tepat waktunya atau apakah hasil tersebut dicapai tetapi melewati batas waktu yang telah direncanakan semula. Adapun kerangka analisis gender yang bisa digunakan ini adalah dengan :

a. Profil kegiatan:

Mengidentifikasi pembagian kerja, alokasi waktu, dan pendapatan antara perempuan dan laki-laki dalam konteks yang spesifik. Dalam hal ini dapat dilihat bagaimana pembagian kerja baik produktif, reproduktif serta politik, sosial kemasyarakatan yang diatur dalam sebuah keluarga maupun masyarakat. Untuk menilai keadilan gender telah terlaksana dalam profil kegiatan ada beberapa hal yang menjadi perhatian:

- a) Apakah pembagian peran-peran ini cukup adil bagi perempuan dan laki-laki.
- b) Adakah perbedaan waktu yang sangat menyolok antara laki-laki dan perempuan, apakah didominasi oleh laki-laki atau perempuan.
- c) Adakah perbedaan pendapatan yang diterima oleh laki-laki dan perempuan sehubungan

dengan kegiatan-kegiatan produktif yang dilakukan.

- b. Profil akses dan kontrol yang mengukur akses dan penguasaan (kontrol) perempuan dan laki-laki terhadap sumber-sumber daya.
 - a) Apakah ada perbedaan akses dan kontrol yang di akibatkan oleh kelas-kelas tertentu misalnya kaya atau miskin secara marginal
 - b) Profil partisipasi yang memfokuskan pada partisipasi kuantitatif dan kualitatif dalam berbagai kegiatan yang dibedakan menurut jenis kelamin.

Selanjutnya, program-program tersebut perlu diukur tingkat keberhasilannya melalui indikator keberhasilan. Untuk membuat indikator perlu melibatkan *stakeholders* terkait sehingga ketika mengukur hasil jelas dapat diketahui sejauhmana capaiannya. Proses ini juga salah satu cara meningkatkan transparansi dan partisipasi.

Berikut hal-hal yang dapat diukur untuk melihat keberhasilan program responsif gender:

1. Meningkatnya peluang yang dimiliki perempuan untuk bekerja dan terlibat dalam usaha. Ukurannya adalah :
 - a. Adanya sejumlah perempuan yang ikut menjadi penanggung jawab atau pelaksana dalam program pembangunan
 - b. Sejumlah aktivitas usaha perempuan sudah tercatat dalam data profile suatu komunitas (desa) sebagai bagian dari potensi atau SDM di lingkungan tersebut
2. Adanya peningkatan keadaan perempuan dari segi jumlah dan kualitasnya dibidang sosial, ekonomi dan politik. Ukurannya:
 - a. Adanya perubahan pandangan yang positif dari masyarakat terhadap potensi perempuan

- b. Tercatat sejumlah perempuan yang menduduki posisi strategis dibidang sosial, ekonomi dan politik
 - c. Ada perubahan terhadap proses pengambilan keputusan penting yang mengharuskan melibatkan perempuan
 - d. Meningkatnya jumlah usaha-usaha ekonomi yang dikelola dan dimiliki oleh kaum perempuan
 - e. Ada perubahan pandangan bahwa perempuan tidak lagi dianggap pencari nafkah tambahan.
3. Tingginya akses perempuan terhadap sumber daya (teknologi, informasi, pasar, kredit, modal kerja, dan lain-lain). Ukurannya:
- a. Adanya sejumlah wadah informasi yang mudah dan dapat diakses oleh perempuan dan laki-laki secara adil
 - b. Adanya perubahan kebijakan atau peraturan yang memudahkan perempuan untuk memperoleh modal
 - c. Adanya peluang yang sama bagi perempuan untuk meningkatkan atau menguasai teknologi secara maksimal
4. Besarnya manfaat yang dinikmati oleh perempuan dan laki-laki dalam pembangunan/program. Ukurannya:
- a. Adanya perubahan kondisi dari sejumlah perempuan dan laki-laki bukan saja dari sektor ekonomi tetapi juga peningkatan kapasitas.
 - b. Adanya perubahan status perempuan dan laki-laki dari kondisi marginal menjadi kelompok yang diperhitungkan.
 - c. Meningkatnya partisipasi perempuan diberbagai bidang dalam pembangunan. Terpenuhinya kebutuhan strategis gender (perubahan pembagian peran, pembagian kerja, kekuasaan dan kontrol terhadap sumber daya

baik dalam lingkup keluarga, komunitas, dan masyarakat.

5. Tidak adanya kebijakan yang diskriminatif. Ukurannya:
 - a. Perempuan dan laki-laki mendapatkan hak-haknya secara adil
 - b. Berkurangnya pertengkaran atau perselisihan di masyarakat khususnya laki-laki dan perempuan yang diakibatkan oleh ketidakadilan
 - c. Adanya kebijakan yang adil yang mengakomodasi kebutuhan sesuai jenis kelamin (tentang upah, bantuan modal kerja, peningkatan kapasitas, pengambilan keputusan dan lain-lain)
 - d. Berkurangnya *gap* yang terjadi antara perempuan dan laki-laki, antara kaya dan miskin atau kelas-kelas lainnya di masyarakat
 - e. Terbukanya peluang kesempatan dan penguasaan terhadap sumber daya secara adil untuk perempuan dan laki-laki
 6. Ada data terpilah (data gender). Ukurannya:
 - a. Ada daftar data tentang aktivitas baik ekonomi, social dan politik berdasarkan jenis kelamin
 - b. Ada daftar tentang masalah dan kebutuhan berdasarkan jenis kelamin
 - c. Ada daftar prioritas kebutuhan termasuk upaya-upaya peningkatan kapasitas berdasarkan jenis kelamin
 - d. Ada peraturan khusus yang disediakan untuk mendorong partisipasi perempuan dan laki-laki secara adil berdasarkan jenis kelamin
3. **Keterbatasan Evaluasi**
- a. Evaluasi ini hanya menganalisis SKPD-SKPD yang mengirimkan dokumen dan menyatakan telah melakukan kegiatan/program responsif gender selama tahun 2009. Dengan demikian, SKPD-SKPD

lain dalam wilayah kerja yang sama tetapi tidak mengirimkan dokumen dan data kegiatan/program responsif gender tidak menjadi objek dalam evaluasi ini.

- b. Karena didasarkan pada dokumen dan data yang ada, evaluasi ini tidak membahas secara mendalam tentang proses kegiatan yang dilakukan oleh setiap SKPD objek evaluasi. Konsekuensinya, interpretasi dan analisis evaluasi yang dilakukan diperkuat (dijustificasi) dengan data sekunder otoritatif yang diperoleh dari sumber lain yang mayoritas bersifat makro dan perlu diverifikasi kembali ke lapangan.
- c. Pendeknya waktu yang tersedia untuk mengumpulkan dokumen dari SKPD-SKPD dan ketersediaan data pendukung yang terbatas menjadikan evaluasi ini perlu mendapatkan kajian lebih mendalam di masa yang akan datang.

Daftar Pustaka

- Creswell, John W. & Clark, Vicky L. Plano. Designing and Conducting Mixed Methods Research. Sage Publications. US. 2007
- CIDA's Framework for Assessing Gender Equity Results. Canadian International Development Agency. Canada. 2005
- Data Susesnas BPS Juni 2010
- Kualitatif dan Kuantitatif. Penerjemah: Budi Puspo Priadi. Cetakan 1. Pustaka Pelajar. Yogyakarta. 2010
- Kasus Kekerasan terhadap Perempuan Meningkat 263% dalam <http://bataviase.co.id/node/121551>, akses 3 Juli 2010, 7.27 WIB.
- Patton, Michael Quinn. Metode Evaluasi Kualitatif. Penerjemah: Budi Puspo Priyadi. Cetakan 2. Pustaka Pelajar. Yogyakarta. 2009.
- Profil Rumah Tangga Fakir Miskin-Miskin Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Pendataan Fakir Miskin 2009
- Republic of Indonesia Country Report on the follow up to the Declaration of Commitment on HIV/AIDS (UNGASS). Reporting period 2008 -2009. Him. 17-18.
- Ribuan Anak Jadi Pekerja Seks Per Tahun dalam <http://medanpunya.com/luarnegeri/3232-ribuan-anak-jadi-pekerja-seks-per-tahun>, akses 3 Juli 2010, 7.50 WIB
- Toleransi dan Intoleransi di Indonesia. Laporan Akhir Tahun 2009. Moderate Muslim Society dalam <http://www.moderatemuslimsociety.net/mms/images/stories/pdf/laporan%20akhir%20tahun%202009.pdf> akses 4/08/10, 08/51 WIB
- Tashakkori, Abbas & Teddlie, Charles. Mixed Methodology. Mengombinasikan Pendekatan Kualitatif dan Kuantitatif. Penerjemah: Budi Puspo Priadi. Cetakan 1. Pustaka Pelajar. Yogyakarta. 2010

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100



Lampiran

**HASIL EVALUASI
KEGIATAN PENGARUSUTAMAAN GENDER
KEBUPATEN BANTUL
TAHUN 2009**

LAMPIRAN : Evaluasi Kegiatan Responsif Gender

1. Dinas Pendidikan Dasar (Dikdas)

Lembar Evaluasi Kegiatan Responsif Gender Pertanyaan					
Hasil kesetaraan gender	Indikator	Elemen hasil	Hasil dalam area yang ditentukan? Jika ada, apa hasil yang dicapai?	Bukti dari hasil capaian? (Kualitatif dan/atau kuantitatif)	Signifikansi hasil
	PEMBUATAN KEPUTUSAN. Lebih setaranya partisipasi perempuan dengan laki-laki sebagai pengambil keputusan dalam pembentukan pembangunan berkelanjutan dalam masyarakatnya	Kapasitas untuk partisipasi publik. Peningkatan kapasitas perempuan dan organisasi perempuan untuk advokasi dan untuk keterlibatan dalam kehidupan publik dan pengambilan keputusan Representasi dalam pengambil keputusan. Peningkatan representasi perempuan dalam proses demokrasi	Seleksi guru, kepala sekolah, dan pengawas berprestasi. Tidak tertera hasil yang dicapai	Tidak ada bukti kuantitatif maupun kualitatif yang tercantum dalam dokumen yang tersedia perihal ukuran keberhasilan kegiatan	Lemah

<p>PENGEMBANGAN SUMBER DAYA DAN MANFAAT. Pengurangan ketidaksetaraan laki-laki dan perempuan dalam akses dan kontrol terhadap sumber daya dan manfaat pembangunan</p>	<p>pengambil keputusan tentang hak asasi perempuan dan anak perempuan. Respon terhadap pelanggaran hak khusus gender. Peningkatan layanan dan mekanisme yang merespon hambatan spesifik isu gender seperti pelanggaran hak laki-laki dan perempuan, <i>trafficking</i>, kekerasan seksual.</p>			
<p>PENGEMBANGAN SUMBER DAYA DAN MANFAAT. Pengurangan ketidaksetaraan laki-laki dan perempuan dalam akses dan kontrol terhadap sumber daya dan manfaat pembangunan</p>	<p>Aset produkst dan kehidupan. Peningkatan kontrol perempuan terhadap aset produksi (lahan, modal/kredit, tehnologi, keahlian) dan peningkatan akses terhadap tingkat pekerja Kapasitas institusional. Peningkatan kapasitas pada organisasi mitra untuk merencanakan</p>	<p>Pendampingan sekolah penerapan kurikulum berbasis hak-hak anak dan kearifan lokal Tidak tertera hasil</p>	<p>Tidak ada bukti kuantitatif maupun kualitatif yang tercantum dalam dokumen yang tersedia perihal ukuran keberhasilan kegiatan</p>	<p>Lemah</p>

	<p>dan mengimplementasikan kebijakan, program, dan proyek yang mencerminkan prioritas dan kepentingan perempuan dan laki-laki.</p> <p>Perubahan kebijakan. Adopsi kebijakan-kebijakan yang mendukung kesetaraan gender oleh institusi yang mengelola sumber dan manfaat.</p> <p>Kelayakan dan kebutuhan dasar. Akses perempuan terhadap layanan dasar dan layak yang mendukung keabakan dan kualitas hidup.</p>	yang dicapai		
--	---	--------------	--	--

2. Kantor Pemberdayaan Masyarakat Desa (KPMDD)

Lembar Evaluasi Kegiatan Responsif Gender				
Hasil kesetaraan gender		Pertanyaan		
Indikator	Elemen hasil	Hasil dalam area yang ditentukan? Jika ada, apa hasil yang dicapai?	Bukti dari hasil capaian? (Kualitatif dan/atau kuantitatif)	Signifikansi hasil
PEMBUATAN KEPUTUSAN Lebih setaranya partisipasi perempuan dengan laki-laki sebagai pengambil keputusan dalam pembentukan pembangunan berkelanjutan dalam masyarakatnya	Kapasitas untuk partisipasi publik. Peningkatan kapasitas perempuan dan organisasi perempuan untuk advokasi dan untuk keterlibatan dalam kehidupan publik dan pengambilan keputusan			
	Representasi dalam pengambil keputusan. Peningkatan representasi perempuan dalam proses demokrasi dan dalam pengambilan keputusan organisasi, sektor sasaran, dan mitra komunitas.			

	<p>Pengambilan keputusan rumah tangga dan individual. <i>Lebih setaranya hubungan laki-laki dan perempuan dalam level rumah tangga, peningkatan kapasitas perempuan dalam pengambilan keputusan individual</i></p>			
<p>Hak, Perempuan dan anak perempuan lebih mampu untuk menyatakan hak asasinya.</p>	<p>Sistem hukum. Penguatan promosi dan proteksi hak asasi perempuan dan anak hokum dan tindakan polisi, pendakwa, hakim, dan pengadilan.</p> <p>Kesadaran publik. Peningkatan pengetahuan dan penerimaan publik umum (laki-laki dan perempuan) dan pengambil keputusan tentang hak asasi perempuan dan anak perempuan.</p>			

	<p>Respon terhadap pelanggaran hak khusus gender. Peningkatan layanan dan mekanisme yang merespon hambatan spesifik isu gender seperti pelanggaran hak laki-laki dan perempuan, <i>trafficking</i>, kekerasan seksual.</p>			
<p>PENGEMBANGAN SUMBER DAYA DAN MANFAAT. Pengurangan ketidaksetaraan laki-laki dan perempuan dalam akses dan kontrol terhadap sumber daya dan manfaat pembangunan</p>	<p>Aset produksi dan kehidupan. Peningkatan kontrol perempuan terhadap aset produksi (lahan, modal/kredit, teknologi, keahlian) dan peningkatan akses terhadap tingkat pekerja</p> <p>Kapasitas institusional. Peningkatan kapasitas pada organisasi mitra untuk merencanakan dan mengimplementasikan kebijakan, program, dan proyek yang</p>			

	<p>mencerminkan prioritas dan kepentingan perempuan dan laki-laki.</p>			
	<p>Perubahan Kebijakan. Adopsi kebijakan-kebijakan yang mendukung kesetaraan gender oleh institusi yang mengelola sumber dan manfaat.</p>		<p>Kegiatan yang dilakukan oleh KPMD berupa peningkatan kesejahteraan masyarakat yang ditujukan untuk keluarga miskin atau Peningkatan Peranan Wanita Menuju Keluarga Sehat Sejahtera (P2WKSS). Hasil yang disebutkan dalam kegiatan ini adalah berkurangnya jumlah keluarga miskin di Bantul</p>	<p>Lemah</p>
	<p>Kelayakan dan kebutuhan dasar. Akses perempuan terhadap layanan dasar dan layak yang mendukung kebaikan dan kualitas hidup.</p>			<p>Tidak ada bukti kuantitatif maupun kualitatif yang tercantum dalam dokumen yang tersedia perihal ukuran keberhasilan kegiatan</p>

3. SKPD Kantor Perpustakaan Umum

Lembar Evaluasi Kegiatan Responsif Gender Pertanyaan					
Hasil kesetaraan gender	Indikator	Elemen hasil	Hasil dalam area yang ditentukan? Jika ada, apa hasil yang dicapai?	Bukti dari hasil capaian? (Kualitatif dan/atau kuantitatif)	Signifikansi hasil
PEMBUATAN KEPUTUSAN. Lebih setaranya partisipasi perempuan dengan laki-laki sebagai pengambil keputusan dalam pembentukan pembangunan berkelanjutan dalam masyarakatnya		Kapasitas untuk partisipasi publik. Peningkatan kapasitas perempuan dan organisasi perempuan untuk advokasi dan untuk keterlibatan dalam kehidupan publik dan pengambilan keputusan			
		Representasi dalam pengambil keputusan. Peningkatan representasi perempuan dalam proses demokrasi dan dalam pengambilan keputusan organisasi, sektor sasaran, dan mitra komunitas.			
		Pengambilan keputusan rumah tangga dan individual. Lebih setaranya			

			<p><i>hubungan laki-laki dan perempuan dalam level rumah tangga, peningkatan kapasitas perempuan dalam pengambilan keputusan individual</i></p>
			<p>Sistem hukum. Penguatan promosi dan proteksi hak asasi perempuan dan anak perempuan dalam hukum dan tindakan polisi, pendakwa, hakim, dan pengadilan.</p>
			<p>Kesadaran publik. Peningkatan pengetahuan dan penerimaan publik umum (laki-laki dan perempuan) dan pengambilan keputusan tentang hak asasi perempuan dan anak perempuan</p>
			<p>Respon terhadap pelanggaran hak khusus gender. Peningkatan layanan dan mekanisme yang merespon hambatan spesifik isu gender seperti pelanggaran hak laki-laki dan perempuan, <i>trafficking</i>, kekerasan seksual.</p>
<p>Hak, Perempuan dan anak perempuan lebih mampu untuk menyatakan hak asasinya</p>			

<p>PENGEMBANGAN SUMBER DAYA DAN MANFAAT. Pengurangan ketidaksetaraan laki-laki dan perempuan dalam akses dan kontrol terhadap sumber daya dan manfaat pembangunan</p>	<p>Aset produksi dan kehidupan. Peningkatan kontrol perempuan terhadap aset produksi (lahan, modal/kredit, teknologi, keahlian) dan peningkatan akses terhadap tingkat pekerja</p>	<p>Kapasitas institusional. Peningkatan kapasitas pada organisasi mitra untuk merencanakan dan mengimplementasikan kebijakan, program, dan proyek yang mencerminkan prioritas dan kepentingan perempuan dan laki-laki.</p>	<p>Pelatihan pengelola perpustakaan sekolah, dusun, dan tempat ibadah. Kegiatan ini berhasil dilaksanakan dengan melibatkan 100 orang peserta.</p>	<p>Terdapat keterlibatan perempuan sebanyak 80% dalam kegiatan pelatihan tersebut.</p>	<p>Rata-rata</p>
<p>Perubahan kebijakan. Adopsi kebijakan-kebijakan yang mendukung kesetaraan gender oleh institusi yang mengelola sumber dan manfaat.</p>	<p>Kelayakan dan kebutuhan dasar. Akses perempuan terhadap layanan dasar dan layak yang mendukung kebaikan dan kualitas hidup.</p>				

4. SKPD Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP)

Lembar Evaluasi Kegiatan Responsif Gender					
Pertanyaan					
Hasil kesetaraan gender	Indikator	Elemen hasil	Hasil dalam area yang ditentukan? Jika ada, apa hasil yang dicapai?	Bukti dari hasil capaian? (Kualitatif dan/atau kuantitatif)	Signifikansi hasil
	PEMBUATAN KEPUTUSAN. Lebih setaranya partisipasi perempuan dengan laki-laki sebagai pengambil keputusan dalam pembentukan pembangunan berkelanjutan dalam masyarakatnya	Kapasitas untuk partisipasi publik. Peningkatan kapasitas perempuan dan organisasi perempuan untuk advokasi dan untuk keterlibatan dalam kehidupan publik dan pengambilan keputusan			
		Representasi dalam pengambil keputusan. Peningkatan representasi perempuan dalam proses demokrasi dan dalam pengambilan keputusan organisasi, sektor sasaran, dan mitra komunitas. Pengambilan keputusan rumah tangga dan			

	<p>Individual. Lebih setaranya hubungan laki-laki dan perempuan dalam level rumah tangga, peningkatan kapasitas perempuan dalam pengambilan keputusan individual</p>			
<p>Hak, Perempuan dan anak, perempuan lebih mampu untuk menyatakan hak asasinya.</p>	<p>Sistem hukum. Penguatan promosi dan proteksi hak asasi perempuan dan anak perempuan dalam hukum dan tindakan polisi, pendakwa, hakim, dan pengadilan.</p> <p>Kesadaran publik Peningkatan pengetahuan dan penerimaan publik umum (laki-laki dan perempuan) dan pengambil keputusan tentang hak asasi perempuan dan anak perempuan.</p>			
	<p>Respon terhadap pelanggaran hak khusus gender. Peningkatan layanan dan mekanisme yang merespon hambatan spesifik isu gender seperti pelanggaran hak laki-laki dan</p>	<p>Kegiatan yang dilakukan berupa operasi pemeriban Pekerja Seks Komersial (PSK) ditujukan kepada kelompok</p>	<p>Hasil dari kegiatan ini adalah dikeluarkannya teguran bagi pelanggar dan pengajuan ke pengadilan</p>	<p>Lemah</p>

<p>PENGEMBANGAN SUMBER DAYA DAN MANFAAT. Pengurangan ketidakesetaraan laki-laki dan perempuan dalam akses dan kontrol terhadap sumber daya dan manfaat pembangunan</p>	<p>perempuan, <i>trafficking</i>, kekerasan seksual.</p>	<p>masyarakat, Badan Hukum, dan perorangan yang diindikasikan melakukan tindak pelanggaran Perda.</p>		
<p>Aset produksi dan kehidupan. Peningkatan kontrol perempuan terhadap aset produksi (lahan, modal/kredit, teknologi, keahlian) dan peningkatan akses terhadap tingkat pekerjaan</p>	<p>Kapasitas institusional. Peningkatan kapasitas pada organisasi mitra untuk merencanakan dan mengimplementasikan kebijakan, program, dan proyek yang mencerminkan prioritas dan kepentingan perempuan dan laki-laki.</p>			
<p>Adopsi kebijakan-kebijakan yang mendukung kesetaraan gender oleh institusi yang mengelola sumber dan</p>	<p>Perubahan kebijakan.</p>			

	manfaat		
	Kelayakan dan kebutuhan dasar. Akses perempuan terhadap layanan dasar dan layak yang mendukung kebaikan dan kualitas hidup.		

5. SKPD Badan Koordinasi Kesejahteraan Keluarga Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana BKK.PPKB

Lembar Evaluasi Kegiatan Responsif Gender			
Hasil kesetaraan gender	Pertanyaan		
Indikator	Elemen hasil	Hasil dalam area yang ditentukan? Jika ada, apa hasil yang dicapai?	Bukti dari hasil capaian? (Kualitatif dan/atau kuantitatif)
PEMBUATAN KEPUTUSAN. Lebih setaranya partisipasi perempuan dengan laki-laki sebagai pengambil keputusan dalam pembentukan pembangunan berkelanjutan dalam masyarakatnya	Kapasitas untuk partisipasi publik. Peningkatan kapasitas perempuan dan organisasi perempuan untuk advokasi dalam kehidupan publik dan pengambilan keputusan	- Peningkatan advokasi dan vasilitasi PUG bagi perempuan	- Meningkatkan jumlah stke* hadir perempuan
	Representasi dalam	Pengembangan materi	Signifikansi hasil
			Signifikan
			Terbentuknya focal point

<p>Hak, Perempuan dan anak perempuan lebih mampu untuk menyatakan hak asasinya.</p>	<p>Sistem hukum. Penguatan promosi dan proteksi hak asasi perempuan dan anak perempuan dalam hukum dan tindakan polisi.</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Pengembangan sistem informasi gender dan anak 	<ul style="list-style-type: none"> - Penerbitan buku laporan data terpilih dan informasi gender 	
<p>Pengambil keputusan. Peningkatan representasi perempuan dalam proses demokrasi dan dalam pengambilan keputusan organisasi, sektor sasaran, dan mitra komunitas.</p> <p>Pengambilan keputusan rumah tangga dan individual. Lebih setaranya hubungan laki-laki dan perempuan dalam level rumah tangga, peningkatan kapasitas perempuan dalam pengambilan keputusan individual</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Penyuluhan bagi ibu rumah tangga dalam membangun keluarga sejahtera - Pedampingan manajemen usaha bagi perempuan yang mengelola usaha - Sinkronisasi peningkatan penanggulangan keluarga miskin - Pengembangan posdaya tingkat dusun 	<ul style="list-style-type: none"> - Tersedianya data ekonomis produktif bagi ibu rumah tangga - Peningkatan hasil usaha kelompok - Penurunan Kagin menjadi 47.015 - Terbentuknya 933 kelompok posdaya 	<p>gender pada SKPD terkait</p>	

	<p>pendakwa, hakim, dan pengadilan.</p> <p>Kesadaran publik Peningkatan pengetahuan dan penerimaan publik umum (laki-laki dan perempuan) dan pengambil keputusan tentang hak asasi perempuan dan anak perempuan.</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Sosialisasi kebijakan perlindungan perempuan di daerah - Peningkatan perlindungan hak reproduksi individu - Promosi perlindungan kelangsungan hidup ibu, bayi dan anak - Pembinaan PUS melalui kader IMP supaya menjadi peserta KB lestari. - Penyuluhan konseling KB dan pelayanan KB. - Pendampingan kegiatan Harganas - jambore PKB/PLKB 	<ul style="list-style-type: none"> - Tersosialisasinya UU PKDRT & UU perlindungan perempuan dan mekanisme FPKZ PA - PPKB memahami pengawasan usia nikah, melahirkan, dan jarak kelahiran yang ideal. - Jumlah peserta 1500 orang - 50 orang kader KB berhasil melakukan penyuluhan pada PUS yang mempunyai balita. - 6791 kader berhasil membina 100.800 peserta KB - Tersedianya obat-obatan KB dan sarana pendukung, mengayomi 500 peserta KB - Tidak ada bukti kuantitatif mengenai keberhasilan program kegiatan. Belum 	
--	---	---	--	--

		<ul style="list-style-type: none"> - Advokasi dan KIE tentang kesehatan reproduksi remaja - Orientasi program KB-KR bagi sub PPKBD. - Penyuluhan kegiatan ibu, bayi dan anak melalui kegiatan di masyarakat - Pengasuhan dan pembinaan tumbuh kembang anak. - Pengembangan model BKB, Posyandu dan PADU 	<p>ada pemilahan data</p> <ul style="list-style-type: none"> - Tidak ada bukti kuantitatif mengenai keberhasilan program kegiatan. Belum ada pemilahan data - Jumlah peserta 770 orang (belum tersedia data terpilah) - Ibu hamil, menyusui, dan punya anak balita lebih memahami kesehatan reproduksi dan pola asuh. Sebanyak 326 perwakilan kelompokkader sub PPKB mendapat promosi sosialisasi pel KHIBA. - Ibu hamil, menyusui, dan punya anak balita lebih memahami kesehatan reproduksi dan pola asuh. Di ikuti oleh 60 kader sub PPKB. - Berhasil di bentuk 34 kelompok ADITUKA. - Terjadi peningkatan dari 	
--	--	--	--	--

<p>PENGEMBANGAN SUMBER DAYA DAN MANFAAT. Pengurangan ketidaksetaraan laki-laki dan perempuan dalam akses dan kontrol terhadap sumber daya dan manfaat pembangunan</p>	<p>Respon terhadap pelanggaran hak khusus gender. Peningkatan layanan dan mekanisme yang merespon hambatan spesifik isu gender seperti pelanggaran hak laki-laki dan perempuan, <i>trafficking</i>, kekerasan seksual.</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Fasilitasi upaya perlindungan perempuan terhadap tindak kekerasan - Pelayanan konseling KB - Pelayanan KB medis operasi dengan target PUS yang sudah tidak ingin punya anak lagi. - Pelayanan pemasangan kontrasepsi KB 	<p>150 kelompok menjadi 225 kelompok.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Terselurnya laporan KDRT dan penanganan korban melalui jejaring - Semua klinik KB mengadakan konseling berhasil di kirim 9 gymbed dan 18 implant kit (belum ada data terpilah) - Berhasil di layani MOP = 17 orang, MOW 3 orang - Berhasil di layani Ps IUD/imp = 190 orang dan Cbt implant 106 orang 	<p>150 kelompok menjadi 225 kelompok.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Berkurangnya angka pengangguran perempuan dan terbentuknya jaringan kerja. - 192 tenaga kerja terampil dari keluarga miskin (Belum ada data terpilah) - Di ikuti oleh 25.000 keluarga miskin (belum ada
<p>Aset produksi dan kehidupan. Peningkatan kontrol perempuan terhadap aset produksi (lahan, modal/kredit, teknologi, keahlian) dan peningkatan akses terhadap tingkat pekerja</p>	<p>Kegiatan yang dilakukan SKPD adalah .</p> <ul style="list-style-type: none"> - Pembinaan organisasi perempuan - Pelatihan ketrampilan bagi keluarga miskin - Pendampingan intensif penggunaan modal kerja keluarga 	<p>Kegiatan yang dilakukan SKPD adalah .</p> <ul style="list-style-type: none"> - Pembinaan organisasi perempuan - Pelatihan ketrampilan bagi keluarga miskin - Pendampingan intensif penggunaan modal kerja keluarga 	<p>Berkurangnya angka pengangguran perempuan dan terbentuknya jaringan kerja.</p> <p>192 tenaga kerja terampil dari keluarga miskin (Belum ada data terpilah)</p> <p>Di ikuti oleh 25.000 keluarga miskin (belum ada</p>	<p>Berkurangnya angka pengangguran perempuan dan terbentuknya jaringan kerja.</p> <p>192 tenaga kerja terampil dari keluarga miskin (Belum ada data terpilah)</p> <p>Di ikuti oleh 25.000 keluarga miskin (belum ada</p>

<p>Kapasitas institusional. Peningkatan kapasitas pada organisasi mitra untuk merencanakan dan mengimplementasikan kebijakan, program, dan proyek yang mencerminkan prioritas dan kepentingan perempuan dan laki-laki.</p>	<p>miskin</p> <p>Kegiatan yang dilakukan adalah :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Pelayanan administrasi perkantoran. Hasilnya berupa Meningkatnya kualitas layanan administrasi perkantoran - Peningkatan sarana dan prasarana aparatur. Hasilnya berupa peningkatan kualitas layanan aparatur. - Sosialisasi program kegiatan SKPD melalui media - Peningkatan disiplin aparatur pengembangan sistem pelaporan dan capaian kinerja. Pendampingan program PAKET (PNPM) dan P2KP - Diklat peningkatan p 	<p>data terpilih)</p> <ul style="list-style-type: none"> - Belum terdapat data terpilih - Belum terdapat data terpilih - Belum ada data terpilih - Belum ada data terpilih - Belum ada data terpilih - Terimplementasinya Anggaran kegiatan responsif gender - Tersusunya perencanaan lembaga berbasis gender - IMP Juara tingkat nasional, PLKB Juara tingkat propinsi. - Terlaksananya pameran
--	---	---

		<p>eran serta kesetaraan dan keadilan gender</p> <ul style="list-style-type: none"> - Pemberdayaan lembaga berbasis gender. - Peningkatan prestasi kader IMP dan pengelola program KB - Pameran hasil produk kelompok usaha keluarga miskin melalui bantul Expo. - Pengolahan dan updating data statistik daerah - Penyusunan dan pengumpulan data statistik daerah - Pendampingan program askeskin, jamkesos dan jamkesda - Pendampingan survey dan pemetaan keluarga miskin 	<p>produk untuk G8 kelompok PEKM (Belum ada data terpilah)</p> <ul style="list-style-type: none"> - Tersusunya buku data gakin penerima bantuan modal kerja dan ternak kambing th 2008 yang terdiri dari data lokasi jenis usaha dan kelompok usaha (belum ada data terpilah) - Tersusunya data KK miskin ril tahun 2009 dalam bentuk buku dan web site (belum ada data terpilah) - Tersedianya data keluarga miskin, calon penerima jamkemas, jamkesos dan jamkesda. (Belum ada data terpilah) - Tersusunya data atlas kemiskinan kab Bantul. (belum ada data terpilah) 	
--	--	--	--	--

6. SKPD Kelautan dan Perikanan

Lembar Evaluasi Kegiatan Responsif Gender				
Pertanyaan				
Hasil kesetaraan gender Indikator	Elemen hasil	Hasil dalam area yang ditentukan? Jika ada, apa hasil yang dicapai?	Bukti dari hasil capaian? (Kualitatif dan/atau kuantitatif)	Signifikansi hasil
PEMBUATAN KEPUTUSAN. <i>Lebih setaranya partisipasi perempuan dengan laki-laki sebagai pengambil keputusan dalam pembentukan pembangunan berkelanjutan dalam masyarakatnya</i>	Kapasitas untuk partisipasi publik. <i>Peningkatan kapasitas perempuan dan organisasi perempuan untuk advokasi dan untuk keterlibatan dalam kehidupan publik dan pengambilan keputusan</i>			
	Representasi dalam pengambil keputusan. <i>Peningkatan representasi perempuan dan dalam pengambilan keputusan organisasi, sektor sasaran, dan mitra komunitas.</i>			

	<p>Pengambilan keputusan rumah tangga dan individual. <i>Lebih setaranya hubungan laki-laki dan perempuan dalam level rumah tangga, peningkatan kapasitas perempuan dalam pengambilan keputusan individual</i></p>			
<p>Hak. Perempuan dan anak perempuan lebih mampu untuk menyatakan hak asasinya.</p>	<p>Sistem hukum. Penguatan promosi dan proteksi hak asasi perempuan dan anak perempuan dalam hukum dan tindakan polisi, pendakwa, hakim, dan pengadilan.</p>			
	<p>Kesadaran publik. Peningkatan pengetahuan dan penerimaan publik umum (laki-laki dan perempuan) dan pengambil keputusan tentang hak asasi perempuan dan anak perempuan.</p>			

<p>Respon terhadap pelanggaran hak khusus gender. Peningkatan layanan dan mekanisme yang merespon hambatan spesifik isu gender seperti pelanggaran hak laki-laki dan perempuan, <i>trafficking</i>, kekerasan seksual.</p>	<p>Aset produksi dan kehidupan. Peningkatan kontrol perempuan terhadap aset produksi (lahan, modal/kredit, teknologi, keahlian) dan peningkatan akses terhadap tingkat pekerja</p>	<p>Kegiatan yang dilakukan SKPD berkaitan dengan aset produksi dan kehidupan adalah berupa Pelatihan pengolahan hasil perikanan dan Penyuluhan peningkatan konsumsi hasil perikanan. Hasil dari kegiatan ini adalah meningkatnya pengetahuan kelompok pengolah hasil perikanan tentang iversifikasi pangan dari ikan dan meningkatnya</p>	<p>Belum ditemukan bukti kuantitatif maupun kualitatif dalam dokumen yang tersedia berkaitan dengan ukuran keberhasilan kegiatan.</p>	<p>Lemah</p>
<p>PENGEMBANGAN SUMBER DAYA DAN MANFAAT. Pengurangan ketidaksiaraan laki-laki dan perempuan dalam akses dan kontrol terhadap sumber daya dan manfaat pembangunan</p>				

			pengetahuan kelompok perikanan mengenai manfaat konsumsi ikan.	
Kapasitas institusional. Peningkatan kapasitas pada organisasi mitra untuk merencanakan dan mengimplementasikan kebijakan, program, dan proyek yang mencerminkan prioritas dan kepentingan perempuan dan laki-laki.	Upaya peningkatan kapasitas institusional di lakukan melalui kegiatan Promosi atas hasil produksi perikanan. Capaian dari kegiatan ini adalah mening-katnya jaring-an pemasaran dan pendapatan pengolah hasil perikanan		Belum ditemukan bukti kuantitatif maupun kualitatif dalam dokumen yang tersedia berkaitan dengan ukuran keberhasilan kegiatan.	Lemah
Perubahan kebijakan. Adopsi kebijakan-kebijakan yang mendukung kesetaraan gender oleh institusi yang mengelola sumber dan manfaat.				
Kelayakan dan kebutuhan dasar. Akses perempuan terhadap layanan dasar dan layak yang mendukung kebaikan dan kualitas hidup.				

7. SKPD Pertanian dan Kehutanan

Lembar Evaluasi Kegiatan Responsif Gender Pertanyaan					
Hasil kesetaraan gender	Indikator	Elemen hasil	Hasil dalam area yang ditentukan? Jika ada, apa hasil yang dicapai?	Bukti dari hasil capaian? (Kualitatif dan/atau kuantitatif)	Signifikansi hasil
	<p>PEMBUATAN KEPUTUSAN. <i>Lebih setaranya partisipasi perempuan dengan laki-laki sebagai pengambil keputusan dalam pembentukan pembangunan berkelanjutan dalam masyarakatnya</i></p>	<p>Kapasitas untuk partisipasi publik. <i>Peningkatan kapasitas perempuan dan organisasi perempuan untuk advokasi dan keterlibatan dalam kehidupan publik dan pengambilan keputusan</i></p>			
		<p>Representasi dalam pengambil keputusan. <i>Peningkatan representasi perempuan dalam proses demokrasi dan dalam pengambilan keputusan organisasi, sektor sasaran, dan mitra komunitas.</i></p>			

<p>Hak, Perempuan dan anak perempuan lebih mampu untuk menyatakan hak asasinya.</p>	<p>Pengambilan keputusan rumah tangga dan individual. <i>Lebih setaranya hubungan laki-laki dan perempuan dalam level rumah tangga, peningkatan kapasitas perempuan dalam pengambilan keputusan individual</i></p>			
<p>Sistem hukum.</p>	<p>Penguatan promosi dan proteksi hak asasi perempuan dan anak perempuan dalam hukum dan tindakan polisi, pendakwa, hakim, dan pengadilan.</p>			
	<p>Kesadaran publik. Peningkatan pengetahuan dan penerimaan publik umum (laki-laki dan perempuan) dan pengambil keputusan tentang hak asasi perempuan dan anak perempuan.</p>			

<p>PENGEMBANGAN SUMBER DAYA DAN MANFAAT. Pengurangan ketidaksetaraan laki-laki dan perempuan dalam akses dan kontrol terhadap sumber daya dan manfaat pembangunan</p>	<p>Respon terhadap pelanggaran hak khusus gender. Peningkatan layanan dan mekanisme yang merespon hambatan spesifik isu gender seperti pelanggaran hak laki-laki dan perempuan, <i>trafficking</i>, kekerasan seksual.</p>	<p>Aset produksi dan kehidupan. Peningkatan kontrol perempuan terhadap aset produksi (lahan, modal/kredit, teknologi, keahlian) dan peningkatan akses terhadap tingkat pekerja</p>	<p>Kegiatan yang dilakukan SKPD adalah :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Budaya tanaman bawah tegakan dengan sasaran KT (kelompok laki-laki) dengan melibatkan KTW (Kelompok Tani Wanita) Hasil dari kegiatan ini adalah produksi garut untuk bahan olahan makanan - Bantuan bibit 	<p>Menjanjikan</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Belum ada data terpilah terkait jumlah perempuan yang terlibat dalam kegiatan ini. - Belum ada data terpilah terkait jumlah perempuan yang terlibat dalam kegiatan ini.
---	--	---	---	--------------------	--

		<p>penghijauan lingkungan dengan sasaran PKK, organisasi wanita, kel.masy sekolah dan instansi. Hasilnya adalah populasi tanaman penghijauan lingkungan meningkat.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Pembuatan persemaian dengan target KT dan KTW. <p>Hasilnya adalah produksi bibit tanaman hutan.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Penguatan modal (penerapan GOP/SOP bawang merah) - Penguatan modal (pengembangan kawasan bawang merah). Hasilnya adalah bertambahnya 	<ul style="list-style-type: none"> - Belum ada data terpilah terkait jumlah perempuan dan laki-laki yang terlibat dalam kegiatan ini - Terdapat data prosentase keterlibatan perempuan sebesar 20% dari 50 peserta - Terdapat data prosentase keterlibatan perempuan sebesar 20% dari 50 peserta yang terdaftar - Terdapat data prosentase keterlibatan perempuan sebesar 20% dari 50 peserta yang terdaftar. - Terdapat data prosentase keterlibatan perempuan sebesar 20% dari 100 peserta yang terdaftar 	
--	--	--	--	--

		<p>areal bawah merah.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Penguatan modal (Sekolah lapang Pengendali hama terpadu) dengan hasil meningkatnya pengetahuan dan ketrampilan - Penguatan modal (penyediaan benih bawah merah). Hasilnya adalah meningkatnya penggunaan benih berlabel. - Penguatan modal (Pengembangan jamur). Hasilnya adalah bertambahnya areal jamur. - Sekolah lapang iklim. 	<ul style="list-style-type: none"> - Terdapat data prosentase keterlibatan perempuan sebesar 20% dari 80 peserta yang terdaftar - Terdapat data kuantitatif prosentase keterlibatan perempuan. Signifikansi dari kegiatan ini adalah perempuan bisa menentukan keputusan dalam usaha tani. - Terdapat data kuantitatif keterlibatan perempuan, 34 posdaya di 17 kecamatan yang seluruhnya beranggotakan perempuan. - Sasaran adalah KWT seluruh Bantul. - Sasaran adalah KWT 	
--	--	---	---	--

		<ul style="list-style-type: none"> - Aplikasi pupuk organik pada usaha tani tingkat kelompok tani. Hasilnya adalah terlaksananya aplikasi pupuk organik dan pemanfaatan pekarangan. - Pengolahan dan pelatihan dengan hasil peserta telah dapat memproduksi emping jagung yang telah di pasarkan - Penguatan modal untuk pengolahan dan pemasaran hortikultura. - Pelatihan P2HP Kelapa - Pelatihan P2HP tembakau 	<p>seluruh Bantul.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Belum terdapat data terpilah dan prosentase keterlibatan perempuan - Belum terdapat data terpilah dan prosentase keterlibatan perempuan 	
--	--	--	---	--

	<p>Kapasitas institusional. Peningkatan kapasitas pada organisasi mitra untuk merencanakan dan mengimplementasikan kebijakan, program, dan proyek yang mencerminkan prioritas dan kepentingan perempuan dan laki-laki.</p>			
	<p>Perubahan kebijakan. Adopsi kebijakan-kebijakan yang mendukung kesetaraan gender oleh institusi yang mengelola sumber dan manfaat</p>			
<p>Kelayakan dan kebutuhan dasar. Akses perempuan terhadap layanan dasar dan layak yang mendukung keabakan dan kualitas hidup.</p>	<p>Sosialisasi peduli ASUH (Aman, sehat, Utuh dan Hala)</p>	<p>Target sasaran adalah perempuan namun belum terdapat bukti capaian dari kegiatan tersebut.</p>		

8. SKPD Dinas Sosial (Dinsos)

Lembar Evaluasi Kegiatan Responsif Gender Pertanyaan					
Hasil kesetaraan gender	Indikator	Elemen hasil	Hasil dalam area yang ditentukan? Jika ada, apa hasil yang dicapai?	Bukti dari hasil capaian? (Kualitatif dan/atau kuantitatif)	Signifikansi hasil
		Kapasitas untuk partisipasi publik. <i>Peningkatan kapasitas perempuan dan organisasi perempuan untuk advokasi dan untuk keterlibatan dalam kehidupan publik dan pengambilan keputusan.</i>			
	PEMBUATAN KEPUTUSAN. Lebih setaranya partisipasi perempuan dengan laki-laki sebagai pengambil keputusan dalam pembentukan pembangunan berkelanjutan dalam masyarakatnya	Representasi dalam pengambil keputusan. <i>Peningkatan representasi perempuan dalam proses demokrasi dan dalam pengambilan keputusan organisasi, sektor sasaran, dan mitra komunitas.</i>			
		Pengambilan keputusan rumah tangga dan individual. <i>Lebih setaranya</i>			

	<p><i>hubungan laki-laki dan perempuan dalam level rumah tangga, peningkatan kapasitas perempuan dalam pengambilan keputusan individual</i></p>			
	<p>Sistem hukum. Penguatan promosi dan proteksi hak asasi perempuan dan anak perempuan dalam hukum dan tindakan polisi, pendakwa, hakim, dan pengadilan.</p>			
<p>Hak, Perempuan dan anak perempuan lebih mampu untuk menyatakan hak asasinya.</p>	<p>Kesadaran publik. Peningkatan pengetahuan dan penerimaan publik umum (laki-laki dan perempuan) dan pengambil keputusan tentang hak asasi perempuan dan anak perempuan.</p>			
	<p>Respon terhadap pelanggaran hak khusus gender. Peningkatan layanan dan mekanisme yang merespon hambatan spesifik isu gender seperti pelanggaran hak laki-laki dan perempuan, <i>trafficking</i>.</p>			

	<p>kekerasan seksual.</p> <p>Aset produksi dan kehidupan. Peningkatan kontrol perempuan terhadap aset produksi (lahan, modal/kredit, teknologi, keahlian) dan peningkatan akses terhadap tingkat pekerjaan</p> <p>Kapasitas institusional. Peningkatan kapasitas pada organisasi mitra untuk merencanakan dan mengimplementasikan kebijakan, program, dan proyek yang mencerminkan prioritas dan kepentingan perempuan dan laki-laki.</p> <p>Perubahan kebijakan. Adopsi kebijakan-kebijakan yang mendukung kesetaraan gender oleh institusi yang mengelola sumber dan manfaat.</p> <p>Kelayakan dan kebutuhan dasar. Akses perempuan terhadap layanan dasar dan layak yang mendukung kebaikan dan kualitas hidup.</p>	<p>Bantuan modal WTS eks PSKW (tidak ada data terpilah)</p>	<p>13 orang klien PSKW</p>	<p> Lemah</p>
<p>PENGEMBANGAN SUMBER DAYA DAN MANFAAT. Pengurangan ketidaksetaraan laki-laki dan perempuan dalam akses dan kontrol terhadap sumber daya dan manfaat pembangunan</p>				<p> Lemah</p>

9. SKPD Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi (Disperindagkop)

Lembar Evaluasi Kegiatan Responsif Gender				
Pertanyaan				
Hasil kesetaraan gender	Elemen hasil	Hasil dalam area yang ditentukan? Jika ada, apa hasil yang dicapai?	Bukti dari hasil capaian? (Kualitatif dan/atau kuantitatif)	Signifikansi hasil
PEMBUATAN KEPUTUSAN. Lebih setaranya partisipasi perempuan dengan laki-laki sebagai pengambil keputusan dalam pembentukan pembangunan berkelanjutan dalam masyarakatnya	Kapasitas untuk partisipasi publik. Peningkatan kapasitas perempuan dan organisasi perempuan untuk advokasi dan untuk keterlibatan dalam kehidupan publik dan pengambilan keputusan	Fasilitas Pengembangan UKM (sosialisasi) Peningkatan sarana dan prasarana (pendidikan, pelatihan perkoperasian); (tidak ada data terpilah)	120 UKM 60 koperasi wanita	Lemah
	Representasi dalam pengambil keputusan. Peningkatan representasi perempuan dalam proses demokrasi dan dalam pengambilan keputusan	Pelatihan Manajemen Koperasi (tidak ada data terpilah)	50 koperasi	Lemah

	<p>dan mekanisme yang merespon hambatan spesifik isu gender seperti pelanggaran hak laki-laki dan perempuan, <i>trafficking</i>, kekerasan seksual.</p>		
<p>PENGEMBANGAN SUMBER DAYA DAN MANFAAT. Pengurangan ketidaksetaraan laki-laki dan perempuan dalam akses dan kontrol terhadap sumber daya dan manfaat pembangunan</p>	<p>Aset produksi dan kehidupan. Peningkatan kontrol perempuan terhadap aset produksi (lahan, modal/kredit, teknologi, keahlian) dan peningkatan akses terhadap tingkat pekerjaan</p> <p>Kapasitas institusional. Peningkatan kapasitas pada organisasi mitra untuk merencanakan dan mengimplementasikan kebijakan, program, dan proyek yang mencerminkan prioritas dan kepentingan perempuan dan laki-laki.</p> <p>Perubahan kebijakan. Adopsi kebijakan-kebijakan yang mendukung kesetaraan gender oleh institusi yang mengelola sumber dan manfaat.</p>	<p>Pembinaan Industri Rumah Tangga dan UKM</p> <p>Promosi dan Propaganda Pameran</p> <p>Pelatihan kewirausahaan</p>	<p>50 UKM</p> <p>40 UKM</p> <p>240 UKM</p> <p>Lemah</p>

	Kelayakan dan kebutuhan dasar. Akses perempuan terhadap layanan dasar dan layak yang mendukung kebaikan dan kualitas hidup.		
--	--	--	--

10. SKPD Tenaga Kerja dan Transmigrasi

Lembar Evaluasi Kegiatan Responsif Gender					
Pertanyaan					
Hasil kesetaraan gender	Indikator	Elemen hasil	Hasil dalam area yang ditentukan? Jika ada, apa hasil yang dicapai?	Bukti dari hasil capaian? (Kualitatif dan/atau kuantitatif)	Signifikansi hasil
PEMBUATAN KEPUTUSAN. <i>Lebih setaranya partisipasi perempuan dengan laki-laki sebagai pengambil keputusan dalam pembentukan pembangunan berkelanjutan dalam masyarakatnya</i>		Kapasitas untuk partisipasi publik. <i>Peningkatan kapasitas perempuan dan organisasi perempuan untuk advokasi dan untuk keterlibatan dalam kehidupan publik dan pengambilan keputusan</i>			
		Representasi dalam pengambil keputusan. <i>Peningkatan representasi</i>			

	<p>perempuan dalam proses demokrasi dan dalam pengambilan keputusan organisasi, sektor sasaran, dan mitra komunitas.</p> <p>Pengambilan keputusan rumah tangga dan individual. Lebih setaranya hubungan laki-laki dan perempuan dalam level rumah tangga, peningkatan kapasitas perempuan dalam pengambilan keputusan individual</p>			
<p>Hak. Perempuan dan anak perempuan lebih mampu untuk menyatakan hak asasinya.</p>	<p>Sistem hukum. Penguatan promosi dan proteksi hak asasi perempuan dan anak perempuan dalam hukum dan tindakan polisi, pendakwa, hakim, dan pengadilan.</p> <p>Kesadaran publik. Peningkatan pengetahuan dan penerimaan publik umum (laki-laki dan perempuan) dan pengambil keputusan tentang hak asasi perempuan dan anak perempuan.</p> <p>Respon terhadap pelanggaran hak khusus</p>			

<p>PENGEMBANGAN SUMBER DAYA DAN MANFAAT. Pengurangan ketidakesetaraan laki-laki dan perempuan dalam akses dan kontrol terhadap sumber daya dan manfaat pembangunan</p>	<p>gender. Peningkatan layanan dan mekanisme yang merespon hambatan spesifik isu gender seperti pelanggaran hak laki-laki dan perempuan, <i>trafficking</i>, kekerasan seksual.</p>	<p>Aset produksi dan kehidupan. Peningkatan kontrol perempuan terhadap aset produksi (lahan, modal/kredit, teknologi, keahlian) dan peningkatan akses terhadap tingkat pekerja</p>	<p>Kegiatan yang dilakukan SKPD berkaitan dengan aset produksi dan kehidupan adalah berupa pelatihan ketrampilan. Hasil dari aktifitas ini adalah terciptanya wirausaha.</p>	<p>Di ikuti oleh 110 orang namun belum ada data terpilah berbasis jenis kelamin.</p>	<p>Lemah</p>
<p>Kapasitas institusional. Peningkatan kapasitas pada organisasi mitra untuk merencanakan dan mengimplementasikan kebijakan, program, dan proyek yang mencerminkan prioritas dan kepentingan perempuan dan laki-laki.</p>	<p>Perubahan kebijakan. Adopsi kebijakan-kebijakan yang mendukung kesetaraan</p>				

	gender oleh institusi yang mengelola sumber dan manfaat.			
	Kelayakan dan kebutuhan dasar. Akses perempuan terhadap layanan dasar dan layak yang mendukung kebaikan dan kualitas hidup.			

11. SKPD Kesatuan Bangsa, Politik, dan Perlindungan Masyarakat (Kesbangpollinmas)

Lembar Evaluasi Kegiatan Responsif Gender				
Hasil kesetaraan gender		Pertanyaan		
Indikator	Elemen hasil	Hasil dalam area yang ditentukan? Jika ada, apa hasil yang dicapai?	Bukti dari hasil capaian? (Kualitatif dan/atau kuantitatif)	Signifikansi hasil
PEMBUATAN KEPUTUSAN. Lebih setaranya partisipasi perempuan dengan laki-laki sebagai pengambil keputusan dalam pembentukan pembangunan	Kapasitas untuk partisipasi publik. Peningkatan kapasitas perempuan dan organisasi perempuan untuk advokasi dan untuk keterlibatan dalam kehidupan publik dan pengambilan keputusan			

<p><i>berkelanjutan dalam masyarakatnya</i></p>	<p>Representasi dalam pengambilan keputusan. <i>Peningkatan representasi perempuan dalam proses pengambilan keputusan organisasi, sektor sasaran, dan mitra komunitas.</i></p>			
	<p>Pengambilan keputusan rumah tangga dan individual. <i>Lebih setaranya hubungan laki-laki dan perempuan dalam level rumah tangga, peningkatan kapasitas perempuan dalam pengambilan keputusan individual</i></p>			
<p>Hak. <i>Perempuan dan anak perempuan lebih mampu untuk menyatakan hak asasinya.</i></p>	<p>Sistem hukum. <i>Penguatan promosi dan proteksi hak asasi perempuan dan anak perempuan dalam hukum dan tindakan polisi, pendakwa, hakim, dan pengadilan.</i></p> <p>Kesadaran publik.</p>			<p><i>Peningkatan pengetahuan dan penerimaan publik umum (laki-laki dan perempuan) dan pengambil</i></p>

	<p>keputusan tentang hak asasi perempuan dan anak perempuan.</p>			
	<p>Respon terhadap pelanggaran hak khusus gender. Peningkatan layanan dan mekanisme yang merespon hambatan spesifik isu gender seperti pelanggaran hak laki-laki dan perempuan, <i>trafficking</i>, kekerasan seksual.</p>			
<p>PENGEMBANGAN SUMBER DAYA DAN MANFAAT. Pengurangan ketidaksetaraan laki-laki dan perempuan dalam akses dan kontrol terhadap sumber daya dan manfaat pembangunan</p>	<p>Aset produksi dan kehidupan. Peningkatan kontrol perempuan terhadap aset produksi (lahan, modal/kredit, teknologi, keahlian) dan peningkatan akses terhadap tingkat pekerjaan</p>			
	<p>Kapasitas institusional. Peningkatan kapasitas pada organisasi mitra untuk merencanakan dan mengimplementasikan kebijakan, program, dan proyek yang mencerminkan prioritas dan kepentingan</p>	<p>Sarasehan dan kerukunan umat beragama dengan melibatkan tokoh pemuda dan perempuan dari 5 agama</p>	<p>Terciptanya toleransi dan keukunan di antara umat beragama di Kabupaten Bantul</p>	<p>Lemah</p>

	perempuan dan laki-laki.	Pendidikan pendahuluan Bela Negara (PPRN) untuk Karang Taruna	Tumbuhnya kesadaran cinta tanah air dan bangsa di kalangan pemuda	Lemah
	Perubahan kebijakan. Adopsi kebijakan-kebijakan yang mendukung kesetaraan gender oleh institusi yang mengelola sumber dan manfaat.			
	Kelayakan dan kebutuhan dasar. Akses perempuan terhadap layanan dasar dan layak yang mendukung kebaikan dan kualitas hidup.			

12. SKPD Badan Kepegawaian Daerah (BKD)

Lembar Evaluasi Kegiatan Responsif Gender			
Pertanyaan			
Hasil kesetaraan gender			
Indikator	Elemen hasil	Hasil dalam area yang ditentukan? Jika ada, apa hasil yang dicapai?	Bukti dari hasil capaian? (Kualitatif dan/atau kuantitatif)
PEMBUATAN KEPUTUSAN, Lebih	Kapasitas untuk partisipasi publik, Peningkatan	Peningkatan kapasitas sumber	Diikuti oleh CPNS 100%= 349 orang dan PNS 108%=
			Signifikansi hasil
			Lemah

<p><i>setaranya partisipasi perempuan dengan laki-laki sebagai pengambil keputusan dalam pembentukan pembangunan berkelanjutan dalam masyarakatnya</i></p>	<p>kapasitas perempuan dan organisasi perempuan untuk advokasi dan untuk keterlibatan dalam kehidupan publik dan pengambilan keputusan</p>	<p>daya aparatur (Prajabatan dan ujian dinas) Pendidikan kedinasan (Pendidikan Perjenjangan Struktural dan diklat teknis) Peningkatan mutu pendidik dan tenaga pendidik (sertifikasi dan bantuan pendidikan)</p>	<p>65 orang</p> <p>Pejabat struktural 110%=32 orang Pejabat struktural 151%=212 orang</p> <p>Guru 100%= 2060 orang PNS dan non-PNS= 165%= 165 orang (Tidak ada data terpilih peserta)</p>
	<p>Representasi dalam pengambil keputusan. <i>Peningkatan representasi perempuan dalam proses demokrasi dan dalam pengambilan keputusan organisasi, sektor sasaran, dan mitra komunitas.</i></p>		
	<p>Pengambilan keputusan rumah tangga dan individual. Lebih setaranya</p>		

				<p><i>hubungan laki-laki dan perempuan dalam level rumah tangga, peningkatan kapasitas perempuan dalam pengambilan keputusan individual</i></p>	
				<p>Sistem hukum. Penguatan promosi dan proteksi hak asasi perempuan dan anak perempuan dalam hukum dan tindakan polisi, pendakwa, hakim, dan pengadilan.</p> <p>Kesadaran publik. Peningkatan pengetahuan dan penerimaan publik umum (laki-laki dan perempuan) dan pengambil keputusan tentang hak asasi perempuan dan anak perempuan.</p>	
<p>Hak. Perempuan dan anak perempuan lebih mampu untuk menyatakan hak asasinya.</p>				<p>Respon terhadap pelanggaran hak khusus gender. Peningkatan layanan dan mekanisme yang merespon hambatan spesifik isu gender seperti pelanggaran hak laki-laki dan perempuan, <i>trafficking</i>, kekerasan seksual.</p>	

<p>PENGEMBANGAN SUMBER DAYA DAN MANFAAT. Pengurangan ketidaksetaraan laki-laki dan perempuan dalam akses dan kontrol terhadap sumber daya dan manfaat pembangunan</p>	<p>Aset produksi dan kehidupan. Peningkatan kontrol perempuan terhadap aset produksi (lahan, modal/kredit, teknologi, keahlian) dan peningkatan akses terhadap tingkat pekerjaan</p> <p>Kapasitas institusional. Peningkatan kapasitas pada organisasi mitra untuk merencanakan dan mengimplementasikan kebijakan, program, dan proyek yang mencerminkan prioritas dan kepentingan perempuan dan laki-laki.</p> <p>Perubahan kebijakan. Adopsi kebijakan-kebijakan yang mendukung kesetaraan gender oleh institusi yang mengelola sumber dan manfaat.</p> <p>Kelayakan dan kebutuhan dasar. Akses perempuan terhadap layanan dasar dan layak yang mendukung keabakan dan kualitas hidup.</p>			
---	--	--	--	--

13. SKPD Dinas Pekerjaan Umum (DPU)

Lembar Evaluasi Kegiatan Responsif Gender				
Pertanyaan				
Hasil kesetaraan gender Indikator	Elemen hasil	Hasil dalam area yang ditentukan? Jika ada, apa hasil yang dicapai?	Bukti dari hasil capaian? (Kualitatif dan/atau kuantitatif)	Signifikansi hasil
<p>PEMBUATAN KEPUTUSAN. Lebih setaranya partisipasi perempuan dengan laki-laki sebagai dalam pembentukan pembangunan berkelanjutan dalam masyarakatnya</p>	<p>Kapasitas untuk partisipasi publik <i>Peningkatan kapasitas perempuan dan organisasi/perempuan untuk advokasi dan untuk keterlibatan dalam kehidupan publik dan pengambilan keputusan</i> Representasi dalam <i>Pengambil keputusan. Peningkatan representasi perempuan dalam proses demokrasi dan dalam pengambilan keputusan organisasi, sektor sasaran, dan mitra komunitas.</i></p>			
	<p>Pengambilan keputusan rumah tangga dan individual. Lebih setaranya</p>			

			<p><i>hubungan laki-laki dan perempuan dalam level rumah tangga, peningkatan kapasitas perempuan dalam pengambilan keputusan individual</i></p>	
			<p>Sistem hukum. Penguatan promosi dan proteksi hak asasi perempuan dan anak perempuan dalam hukum dan tindakan polisi, pendakwa, hakim, dan pengadilan.</p>	
			<p>Kesadaran publik. Peningkatan pengetahuan dan penerimaan publik umum (laki-laki dan perempuan) dan pengambilan keputusan tentang hak asasi perempuan dan anak perempuan.</p>	
<p>Hak. Perempuan dan anak perempuan lebih mampu untuk menyatakan hak asasinya.</p>			<p>Respon terhadap pelanggaran hak khusus gender. Peningkatan layanan dan mekanisme yang merespon hambatan spesifik isu gender seperti pelanggaran hak laki-laki dan perempuan, <i>trafficking</i>.</p>	

<p>PENGEMBANGAN SUMBER DAYA DAN MANFAAT. Pengurangan ketidaksetaraan laki-laki dan perempuan dalam akses dan kontrol terhadap sumber daya dan manfaat pembangunan</p>	<p>kekerasan seksual. Aset produksi dan kehidupan. Peningkatan kontrol perempuan terhadap aset produksi (lahan, modal/kredit, teknologi, keahlian) dan peningkatan akses terhadap tingkat pekerja Kapasitas institusional. Peningkatan kapasitas pada organisasi mitra untuk merencanakan dan mengimplementasikan kebijakan, program, dan proyek yang mencerminkan prioritas dan kepentingan perempuan dan laki-laki.</p>	<p>Rehabilitasi/pemeliharaan pasar pedesaan Rehabilitasi/pemeliharaan jalan dan jembatan desa Pembangunan perumahan/rusunawa</p>	<p>Tidak ada bukti kuantitatif maupun kualitatif yang tercantum dalam dokumen yang tersedia perihal ukuran keberhasilan kegiatan (tidak ada data terpilah)</p>	<p>Lemah</p>
	<p>Perubahan kebijakan. Adopsi kebijakan-kebijakan yang mendukung kesetaraan gender oleh institusi yang mengelola sumber dan manfaat Kelayakan dan kebutuhan dasar. Akses perempuan terhadap layanan dasar dan</p>	<p>Rehabilitasi/pemeliharaan sarana dan prasarana air minum.</p>	<p>Tidak ada bukti kuantitatif maupun kualitatif yang</p>	<p>Lemah</p>

	layak yang mendukung kebaikan dan kualitas hidup.	Rehabilitasi sedang/berat Puskesmas	tercantum dalam dokumen yang tersedia perihal ukuran keberhasilan kegiatan (tidak ada data terpilah)	
--	---	--	--	--